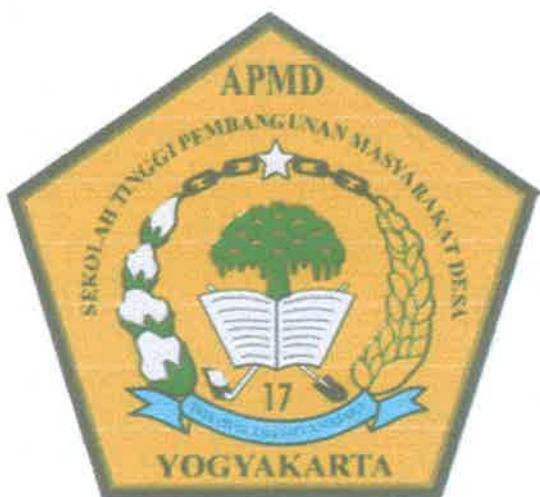


**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN  
MENENGAH OLEH PEMERINTAH KALURAHAN  
PANGGUNGHARJO KABUPATEN BANTUL**



**Disusun Oleh :**

**FLORIDA MARIA SALVI INAQ LEUMARA  
(21520070)**

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

**2025**



**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH  
OLEH PEMERINTAH KALURAHAN PANGGUNGHARJO  
KABUPATEN BANTUL**

**SKRIPSI**

**Diajukan Guna Memenuhi Persyaratan untuk Memperoleh Gelar Sarjana  
Jenjang Pendidikan Strata Satu (SI)**



**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN  
JENJANG PROGRAM STUDI STRATA 1  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA “APMD”  
YOGYAKARTA  
2025**

## HALAMAN PENGESAHAN

Skripsi ini telah diuji dipertahankan di depan tim penguji untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta Pada

Hari : Kamis

Tanggal : 13 Maret 2025

Jam : 10.00 WIB

Tempat : Ruang Ujian Skripsi STPMD “APMD” Yogyakarta

### TIM PENGUJI

Nama

Tanda Tangan

Dr. R. Widodo Triputro, MM., M.Si  
Ketua Penguji / Pembimbing

Analius Giawa, S.IP., M.Si  
Penguji Samping I

Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si  
Penguji Samping II

Mengetahui,

Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan

Dr. Gregorius Sahdan, S.IP., M.A

## HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Florida Maria Salvi Inaq Leumara

Nim : 21520070

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Menyatakan bahwa skripsi ini yang berjudul "**PENGEMBANGAN USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH OLEH PEMERINTAH KALURAHAN PANGGUNGHARJO KABUPATEN BANTUL**" adalah karya tulis yang saya buat sendiri, disusun sebagai salah satu kewajiban guna menyelesaikan jenjang strata satu (S1) di Kampus Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

Semua data yang saya gunakan dalam penelitian ini telah saya cantumkan sesuai dengan penulisan karya ilmiah. Apabila di kemudian hari ternyata ditemukan adanya kekurangan data atau pernyataan yang tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademis yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 04 Maret 2025

Yang menyatakan,



Florida Maria Salvi Inaq Leumara  
21520070

## HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya :

Nama Lengkap : Florida Maria Salvi Inaq Leumara  
NIM : 21520070  
Telp : 081237510323  
Email : floridadodot524@gmail.com  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta

Dengan ini **memberikan ijin dan hak kepada Program Studi Ilmu Pemerintahan Strata Satu Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta** untuk menyimpan, mengalih-media atau memformat-kan, mengelola dalam pangkalan data (database), mendistribusikan dan menampilkan atau mempublikasikannya di internet atau media lain untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta karya ilmiah atas karya ilmiah saya yang berjudul:"

**"Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo Kabupaten Bantul"**

Ijin dan hak sebagaimana tersebut di atas termasuk juga **Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (Non-exclusive Royalty-Free Right)**

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi apabila dikemudian hari timbul segala bentuk tuntutan hukum atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Yogyakarta, 04 Maret 2025

Yang menyatakan,



Florida Maria Salvi Inaq Leumara  
21520070

## **MOTTO**

***In the Name of Jesus Christ***

“Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu”

( 1 Korintus 10:13)

“Orang lain tidak akan bisa paham *struggle* dan masa sulitnya kita, yang mereka ingin tahu hanya bagian *succes stories*. Berjuanglah untuk diri sendiri walaupun tidak ada yang tepuk tangan. Kelak diri kita di masa depan akan sangat bangga dengan apa yang kita perjuangkan hari ini”

(Florida M. S. I. Leumara)

“Tuhan menaruhmu di tempat yang sekarang, bukan karena kebetulan. Orang yang hebat tidak dihasilkan melalui kemudahan melainkan melalui kesukaran, dan air mata”

( Ulangan 30 : 5)

## **HALAMAN PERSEMBAHAN**

Segala puji dan syukur saya panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, kasih dan rahmat-Nya maka saya menyelesaikan skripsi ini dalam keadaan sehat walafiat tidak kekurangan sesuatu apapun. Saya persembahkan skripsi ini kepada orang-orang yang sangat berarti dalam proses hidup saya:

1. Terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa atas segala cinta, dan berkatnya selama ini dan selalu menyertai saya dalam perjalanan hidup saya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta saya, Bapak Yohanes Kara dan Ibu saya Rosalia Ohaq yang telah bersusah payah, dan selalu dengan sabar dalam mendidik dan membesarkan saya, serta memberikan doa-doa yang terbaik untuk saya selama saya berada di tanah rantau, dan selalu menjadi sumber tenaga bagi saya untuk terus melangkah maju, terima kasih orang tuaku tercinta saya bangga memiliki kalian berdua.
3. Kepada saudara dan saudari saya tercinta Nikolaus, Allamsha, Monna dan Robinson yang telah mendukung dan memberikan semangat dalam hidup, saya bangga memiliki kalian.
4. Kepada diri saya sendiri Florida Maria Salvi Inaq Leumara, terima kasih sudah bertahan sejauh ini. Terima kasih tetap memilih berusaha dan merayakan dirimu sendiri di titik ini, walau sering kali merasa putus asa atas apa yang diusahakan dan belum berhasil, namun terima kasih tetap menjadi manusia yang selalu mau berusaha dan tidak lelah untuk mencoba. Terima kasih karena tidak menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini dan telah menyelesaiannya sebaik dan semaksimal mungkin. Ini merupakan pencapaian yang patut dirayakan untuk diri sendiri. Apapun kurang dan lebihmu mari merayakan diri sendiri. Selamat merayakan kecemasan-kecemasan di tangga berikutnya, selamat berpetualang di level kehidupan selanjutnya.

## **KATA PENGANTAR**

Puji Syukur Penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya sehingga penelitian yang berjudul: “Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah Oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kabupaten Bantul” skripsi ini merupakan salah satu persyaratan yang harus dipenuhi oleh mahasiswa dalam memperoleh gelar Sarjana (S1) Program Studi Ilmu Pemerintahan, Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna karena keterbatasan kemampuan serta pengetahuan yang penulis dapatkan. Oleh karena itu, dengan kerendahan hati penulis mohon maaf atas segala kekurangan yang ada, kemudian tanpa adanya bantuan dari berbagai pihak tidak mungkin bagi penulis untuk menyelesaikan studi dan penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu penulis ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Dr. Sutoro Eko Yunanto, M.Si selaku Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
2. Dr. Gregorius Sahdan, S.I.P., M.A. selaku Ketua Program Studi Ilmu Pemerintahan Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta;
3. Drs. R Julianus Gatot, M.Si. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah membimbing dan selalu memberikan motivasi, ptunjuk dan arahan selama penulis belajar di STPMD “APMD” Yogyakarta;
4. Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang dengan penuh kesabaran, membimbing dan memberikan arahan dan saran selama penyusunan skripsi ini;
5. Pengaji 1 : Analius Giawa, S.I.P., M.Si
6. Pengaji ll : Dra. B Hari Saptaning Tyas, M.Si
7. Bapak Ibu dan Dosen pengajar di Program Studi Ilmu Pemerintahan STPMD “APMD” Yogyakarta yang telah mengajar, mendidik dan

membagikan ilmunya kepada penulis. Terima kasih atas semua ilmu yang telah Bpak dan Ibu berikan. Semoga penulis dapat mengamalkan dan mempergunakan ilmunya dengan baik;

8. Pihak Pemerintah Kalurahan Panggunharjo karena telah memberikan ijin penelitian kepada penulis di Kalurahan Panggunharjo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta;

Skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, sehingga mohon masukan untuk lebih baiknya skripsi ini.

Yogyakarta, 04 Maret 2025

Penyusun,

Florida Maria Salvi Inaq Leumara

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN COVER .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK .....</b>	<b>v</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>viii</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR GAMBAR .....</b>	<b>xiv</b>
<b>INTISARI .....</b>	<b>xv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	12
C. Fokus Penelitian .....	13
D. Tujuan Penelitian.....	13
E. Manfaat Penelitian.....	13
F. Literatur Review.....	14
G. Kerangka Konseptual .....	20
1. Konsep Governing.....	20
2. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM) .....	25
3. Pengembangan UMKM.....	33
4. Kewenangan Pemerintah Kalurahan .....	39
H. Metode Penelitian.....	50
1. Jenis Penelitian.....	50
2. Unit Analisis.....	50
3. Subjek Penelitian.....	51

4. Teknik Pengumpulan Data .....	52
5. Teknik Analisis Data .....	54
<b>BAB II PROFIL KALURAHAN PANGGUNGHARJO .....</b>	<b>57</b>
A. Selayang Pandang Kalurahan Panggungharjo.....	57
B. Kondisi Demografi.....	61
1. Jumlah Penduduk .....	61
2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan .....	62
3. Komposisi Penduduk Menurut Agama .....	63
C. Keadaan Ekonomi .....	64
D. Kondisi Sosial .....	65
E. Pemerintah Kalurahan Panggungharjo .....	66
F. Lembaga-Lembaga Kalurahan .....	68
1. Badan Permusyawaratan Kalurahan.....	68
2. Karang Taruna .....	69
3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) .....	71
G. Sarana dan Prasarana Kalurahan .....	73
H. UMKM Kalurahan .....	76
<b>BAB III ANALISIS DATA .....</b>	<b>81</b>
A. Analisis Upaya Pengembangan UMKM .....	82
1. Peraturan mengenai UMKM .....	83
2. Program pemerintah dalam pengembangan UMKM .....	87
3. Kolaborasi Pemerintah dalam Upaya Pengembangan UMKM.....	99
4. Pengembangan Sumber Daya (SDM) Pelaku UMKM .....	107
5. Peningkatan Kualitas Produk UMKM .....	118
6. Strategi yang dilakukan pelaku UMKM dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar .....	129
7. Upaya pelaku UMKM didalam mengatasi keterbatasan fasilitas produksi dan dampaknya.....	139
8. Upaya Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam menyediakan platform digital bagi pelaku UMKM .....	144
9. Upaya Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan pasar .....	158

10. Upaya Pemerintah Kalurahan dalam Perijinan .....	170
B. Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM di Kalurahan Panggunharjo.....	179
1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan.....	181
2. Sumber Daya Manusia .....	189
3. Sarana dan Prasarana.....	204
4. Pemasaran dan teknologi.....	214
<b>BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....</b>	<b>228</b>
A. Kesimpulan.....	228
B. Saran .....	230
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>233</b>
<b>PEDOMAN WAWANCARA .....</b>	<b>238</b>
<b>DOKUMENTASI PENELITIAN .....</b>	<b>241</b>

## **DAFTAR TABEL**

Tabel 1. 1 Deskriptif Informan.....	52
Tabel 2. 1 Data Peruntukan Tanah Kalurahan .....	60
Tabel 2. 2 Data Penduduk Kalurahan.....	61
Tabel 2. 3 Data Tingkat Pendidikan Kalurahan .....	62
Tabel 2. 4 Data Agama Kalurahan .....	63
Tabel 2. 5 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan.....	64
Tabel 2. 6 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo .....	68
Tabel 2. 7 Karang Taruna Kalurahan Panggungharjo .....	70
Tabel 2. 8 Struktur PKK Kalurahan Panggungharjo .....	71
Tabel 2. 9 Data Pelaku Usaha Mikro Kalurahan Panggungharjo.....	76

## **DAFTAR GAMBAR**

Gambar 2. 1 Bagan Pemerintah Kalurahan.....	67
Gambar 2. 2 Sumber:Dokumen Peneliti (23 Januari 2025) .....	78
Gambar 3. 1 Rencana Kerja Pemerintah Desa .....	85
Gambar 3. 2 Rumah Produksi Komunitas .....	88
Gambar 3. 3 Pasar Online .....	89
Gambar 3. 4 APBKal .....	91
Gambar 3. 5 Peta Analisis Penyebaran UMKM .....	93
Gambar 3. 6 Kunjungan dari Dinkes Bantul.....	101
Gambar 3. 7 Kunjungan dari Dinkes Bantul.....	104
Gambar 3. 8 Produk Batik Madani .....	120
Gambar 3. 9 Produk Ampyang Coklat .....	121
Gambar 3. 10 Produk Rempah Nenek.....	123
Gambar 3. 11 Produk Peyek Kremes .....	125
Gambar 3. 12 Produk Batik Daliman.....	126
Gambar 3. 13 Pelatihan Pengemasan di RPK .....	127
Gambar 3. 14 Demonstrasi Batik di Thailand.....	130
Gambar 3. 15 Produk Ampyang coklat .....	132
Gambar 3. 16 Produk Kacang Rempah.....	133
Gambar 3. 17 Produk Peyek.....	135
Gambar 3. 18 Pembuatan Batik .....	136
Gambar 3. 19 Pemasaran di Show Room RPK.....	138
Gambar 3. 20 Pelatihan Workshop digital marketing .....	146
Gambar 3. 21 Pelatihan Workshop digital marketing .....	148
Gambar 3. 22 Media sosial UMKM.....	149
Gambar 3. 23 Media sosial UMKM.....	151
Gambar 3. 24 Media sosial UMKM.....	156
Gambar 3. 25 MACIT FEST .....	159
Gambar 3. 26 Bantul Expo.....	161

## INTISARI

Skripsi ini membahas tentang perbuatan pemerintah dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Piyungan Kabupaten Bantul. Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) adalah suatu bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dalam skala yang besar atau skala menengah yang memiliki kedudukan yang strategis dalam mewujudkan perekonomian nasional jika dikembangkan dengan baik. Oleh karena itu pemerintah harus mampu mengembangkan UMKM secara berkelanjutan melalui program dan kebijakan seperti pendampingan dan pelatihan sumber daya pelaku UMKM, membangun kerja sama, meningkatkan pengembangan pemasaran, memudahkan pengaturan dan perijinan, meningkatkan saran dan prasarana produksi, dan meningkatkan desain dan teknologi. Hal tersebut terjadi pada Kalurahan Panggungharjo, Rumusan masalah penelitian ini Bagaimana Pengembangan UMKM Oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo?

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan teknik pengeumpulan data yaitu observasi, wawancara dan dokumentasi. Subjek penelitian ini yaitu Lurah, Mantan Lurah, Carik, Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPMKal), Koordinator Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa) Koordinator Rumah Produksi, dan Pelaku UMKM. Objek penelitian ini adalah Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kabupaten Bantul. Teknik untuk menentukan subjek yaitu menggunakan purposive. Teknik analisis data yaitu pengumpulan data reduksi data penyajian data dan penarikan kesimpulan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemerintah telah membuat peraturan mengenai pengembangan UMKM dan melakukan tindakan dalam mengembangkan UMKM yaitu menyediakan sarana berupa Rumah Produksi Komunitas dan membantu pelaku UMKM di dalam hal perijinan usaha, bazar, membantu mempromosi hasil produksi UMKM, Bantu Expo UMKM, kampung ramadhan Panggungharjo dan melakukan pembinaan melalui pelatihan digital marketing, pelatihan pemasaran dan promosi, pelatihan manajemen keuangan, pelatihan pemotretan produk dan mental. Akan tetapi di dalam upaya tersebut ada beberapa kendala yang terjadi yaitu pelaku UMKM kurang terlibat dalam program dan pelatihan yang dibuat sehingga program tersebut kurang efektif hal tersebut terjadi karena adanya kesenjangan diantara pelaku UMKM yang bergabung di Rumah Produksi Komunitas dan yang tidak bergabung. Pelaku UMKM yang sudah bergabung artinya pelaku UMKM yang sudah lolos dari pelatihan yang dilakukan pemerintah, kemudian yang tidak lolos beranggapan bahwa mereka gagal sehingga tidak memiliki minat lagi dalam bergabung dengan pemerintah dan memilih usaha mandiri tanpa adanya keterlibatan dari pemerintah. Hal ini menjadi perhatian karena pemerintah sebagai fasilitator seharusnya memiliki alternatif lain di dalam membantu pelaku UMKM yang tidak lolos. Pelaku UMKM yang tidak mengikuti RPK sama sekali hal ini dikarena kurangnya informasi tentang program yang dibuat oleh pemerintah dan kurangnya akses internet atau media sosial sehingga informasi yang disampaikan oleh pemerintah Kalurahan melalui media sosial tidak dapat dijangku.

**Kata Kunci : Pengembangan, UMKM, Pemerintah Kalurahan**

## **BAB I**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang Masalah**

Indonesia merupakan negara yang memiliki potensi ekonomi yang berskala besar di dunia karena mempunyai sumber daya manusia, sumber daya alam, investasi yang memberikan peluang dan keseimbangan ekonomi khusunya dalam pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM ini merupakan salah satu pilar yang penting bagi perekonomian di Indonesia dan memiliki peranan yang strategis bagi pertumbuhan ekonomi dan mengurangi angka kemiskinan.

Berdasarkan data Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian menyatakan bahwa jumlah UMKM di Indonesia mencapai 64,19 juta, dengan komposisi UMK sebesar 64,13 juta (99,92%) dari keseluruhan sektor usaha. Oleh karena itu UMKM di Indonesia telah berkontribusi 99% dari jumlah total semua perusahaan yang aktif di Indonesia. Tidak hanya itu UMKM juga menyumbang sekitar 60% dari PDB Indonesia dan menciptakan lapangan pekerjaan kepada 108 juta orang di Indonesia. Ini berarti bahwa UMKM merupakan tulang punggung perekonomian di Indonesia yang mana membawa dampak baik bagi Indonesia ditengah persaingan global. Dari pernyataan di atas dapat disimpulkan bahwasanya UMKM sangat membantu perekonomian masyarakat, menciptakan lapangan pekerjaan, dan mengurangi kemiskinan.

Oleh karena itu UMKM menjadi salah satu tulang punggung perekonomian di Indonesia.

UMKM di maknai sebagai usaha perorangan yang berdasarkan pada usaha ekonomi produktif yang berada di tingkat desa, dan berpatokan pada kriteria berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). UMKM dapat diartikan sebagai suatu bisnis atau usaha perorangan atau rumah tangga yang badan usahanya berukuran kecil, Pengelolaan UMKM sendiri didasari oleh batasan omset pendapatan pertahunnya. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dikelola oleh individu, atau badan usaha yang bukan dari cabang perusahaan yang dimiliki atau yang menjadi bagian langsung maupun tidak langsung dari usaha menengah atau usaha besar yang telah memenuhi kriteria sebgaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini. Sedangkan Usaha Menengah merupakan usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh individu atau badan usaha yang tidak merupakan cabang anak perusahaan yang dimiliki, atau menjadi bagian langsung maupun tidak langsung.

UMKM adalah bagian integral ekonomi kerakyatan yang mempunyai kedudukan yang strategis untuk mewujudkan sistem perekonomian nasional yang semakin berimbang, berkembang dan berkeadilan. Dalam mencapai tujuan terebut pelaksanaan ekonomi nasional lebih ditekankan pada perekonomian yang pro terhadap ekonomi kerakyatan, berkeadilan, akuntabel memiliki daya saing baik global maupun regional dan transparansi. Oleh karena itu UMKM perlu dikembangkan demi mewujudkan demokrasi ekonomi. (Hakim,

H.,& Wahyudi,E.Y.(2024). Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan suatu bisnis atau usaha yang dijalankan oleh perorangan atau kelompok dalam skala kecil atau skala menengah. UMKM ini memiliki kedudukan yang strategis dalam mewujudkan sistem perekonomian nasional jika dikembangkan secara baik.

UMKM ini menjadi salah satu bisnis yang banyak diminati oleh masyarakat dan sebagai sumber penghasilan bagi masyarakat. Karena dengan memanfaatkan sumber daya yang ada maka dapat mengatasi persoalan karena selain menyediakan lapangan pekerjaan, meningkatkan perekonomian lokal, dan pemberdayaan masyarakat, UMKM ini juga memberikan dampak yang positif seperti peningkatan pengetahuan sumber daya manusia (SDM), dan dapat melatih kemandirian pada diri dalam menciptakan hal-hal yang baru. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didefinisikan sebagai berikut:

1. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang ini
2. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini.

3. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang di miliki, dikuasai, ataupun menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan.

Pasal 25 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi kegiatan kerjasama dengan berbagai pola kemitraan baik yang dilakukan oleh sesama UMKM maupun kemitraan yang dilakukan oleh UMKM dengan Usaha Besar.

Pada Pasal 7 menyatakan tentang Penumbuhan Iklim Usaha yaitu: Pemerintah dan Pemerintah Daerah menumbuhkan iklim usaha dengan menetapkan aturan perundang-undangan dan kebijakan aspek:

- a. Pendanaan
- b. Sarana dan prasarana
- c. Kemitraan
- d. Perizinan usaha
- e. Kesempatan berusaha
- f. Promosi dagang
- g. Dukungan kelembagaan

Berdasarkan konteks Undang-Undang tersebut Peraturan ini diatur lebih lanjut dalam Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha. Pada Pasal 1 ayat 1 dikatakan

bahwa Penyelenggaraan Perizinan Berusaha adalah kegiatan Perizinan Berusaha yang proses pengelolaannya secara elektronik mulai dari tahap permohonan sampai dengan terbitnya dokumen yang dilakukan secara terpadu dalam satu pintu. Dan dalam ayat 2 Perizinan Berusaha adalah legalitas yang diberikan kepada Pelaku Usaha untuk memulai dan menjalankan usaha dan/atau kegiatannya. Perda ini bertujuan untuk mengatur penyelenggaraan perijinan berusaha di Bantul. Selain itu dalam mewujudkan Perda tersebut Pemerintah juga telah melakukan berbagai kebijakan-kebijakan yang mencakup pelatihan-pelatihan yang dilakukan setiap tahun, bantul creativ expo yang dilakukan setiap tahun untuk mempromosi produk UMKM dan hasil inovasi daerah, kerja sama dengan berbagai pihak seperti pos Indonesia, pendanaan, sarana dan prasarana dan lain-lain.

Perda ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah pada Pasal 1 ayat 6 Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Dalam ayat 12 Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Menurut Peraturan Gubernur DIY Nomor 93 Tahun 2020, Desa Preneur merupakan konsep yang memungkinkan desa untuk mengembangkan unit-unit usaha skala desa yang dikelola oleh penduduk desa sendiri. Ini dilakukan melalui penguatan pengetahuan dan keterampilan berwirausaha, peningkatan mutu produk/jasa, penambahan nilai tambah, serta peningkatan daya saing dengan tujuan untuk meningkatkan perekonomian desa dan meningkatkan kesejahteraan penduduknya. Desa Preneur merupakan konsep pemberdayaan ekonomi desa yang berbasis kewirausahaan, yang bertujuan untuk menggali potensi lokal dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa. Konsep ini sangat erat kaitannya dengan pengembangan UMKM karena UMKM menjadi tulang punggung ekonomi desa. Dalam penerapannya, Desa Preneur membantu masyarakat desa untuk mengembangkan usaha berbasis sumber daya lokal, seperti pertanian, kerajinan tangan, kuliner, dan pariwisata. Dengan adanya pelatihan dan pendampingan, para pelaku UMKM di desa bisa meningkatkan keterampilan dalam manajemen usaha, pemasaran, serta inovasi produk agar lebih berdaya saing. Selain itu, Desa Preneur juga membuka akses pasar yang lebih luas bagi UMKM, baik melalui jaringan distribusi lokal maupun pemanfaatan teknologi digital seperti e-commerce dan media sosial. Tidak hanya itu, dukungan modal dari berbagai pihak, seperti pemerintah, koperasi, atau investor, semakin memperkuat daya tahan UMKM dalam menghadapi persaingan.

Kabupaten Bantul merupakan salah satu dari empat kabupaten yang ada di Provinsi DIY. Kabupaten Bantul memiliki 17 Kapanewon dengan 75 Kalurahan dan 933 Padukuhan. Kabupaten Bantul terkenal dengan berbagai hal seperti

wisata alam dan budaya yang menarik, penghasil ternak, kerajinan, kuliner dan lain-lain. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bantul jumlah penduduk pada pertengahan tahun adalah 2024 976.573 jiwa. Oleh karena itu dengan adanya UMKM dapat menciptakan lapangan pekerjaan dan mengurangi pengangguran. Dinas koperasi UMKM mencatat jumlah perkembangan UMKM di Bantul pada 2023 adalah 128.000.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah beberapa kali terkait dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2024 tentang Desa pada Pasal 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 2 disebutkan ada empat kewenangan desa yaitu 1)Menyelenggarakan Pemerintahan 2)Pembangunan 3)Pembinaan Kemasyarakatan dan 4) Pemberdayaan Masyarakat. Undang-Undang tersebut selanjutnya diatur dalam ketentuan umum pada Pasal 1 ayat 12 bahwa Pemberdayaan Masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran, serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa.

Kewenangan Kalurahan juga diatur dalam Peraturan Bupati (Perbup) Nomor 86 Tahun 2020 dalam Pasal 1 bahwa: 1)Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. 2)Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DI, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. 3)Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat dan 4)Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakasa masyarakat Kalurahan.

Undang-Undang desa ini tidak hanya membawa sumber pendapatan bagi desa saja tetapi membawa angin segar bagi masyarakat untuk mentransformasi wajah desa. Artinya Undang-undang desa lebih memposisikan masyarakat desa sebagai subjek atau pelaku utama dan tidak hanya sebagai objek sasaran saja. Pemberdayaan masyarakat merupakan usaha yang memperhatikan dan memberikan dorongan dalam semua aspek tatanan kehidupan masyarakat

dengan sasaran untuk seluruh lapisan masyarakat sehingga mereka lebih kreatif, dan inovasi sehingga mereka mampu membangkitkan kemampuan diri dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat dengan cara berpikir, bersikap dan bertingkah laku untuk maju karena terkadang mereka tidak mengetahui apa saja potensinya. Oleh karena itu bidang pemberdayaan merupakan salah satu titik yang strategis yang harus diperluas.

Pemerintah desa mempunyai peranan yang sangat penting dalam pemberdayaan masyarakat yang selaras dengan amanat Undang-Undang Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 yang di dalamnya secara tegas menyatakan bahwa tujuan didirikannya Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah untuk memajukan kesejahteraan dan mencerdaskan kehidupan bangsa. Tentunya hal ini berkaitan dengan kapasitas pemerintah desa dalam pemberdayaan desa karena pembangunan pada sektor pemberdayaan di desa merupakan langkah yang strategis untuk mewujudkan indonesia yang sejahtera. Kapasitas atau *capacity* bisa diartikan sebagai suatu kemampuan individu atau organisasi tertentu dalam menjalankan fungsinya sebagaimana secara efektif, efisien dan terus-menerus (Milen, 2004, h.16) dalam (Ratnasari et al., 2013) kemampuan berasal dari kata mampu yang berhubungan dalam tugas atau pekerjaan (kata sifat) yang melakukan tugas atau pekerjaan sehingga menghasilkan barang atau jasa yang diharapkan. Oleh karena itu kapasitas dalam hal ini berkaitan dengan bagaimana tindakan atau perbuatan dari instansi pemerintah di tingkat desa dalam pemberdayaan masyarakat.

Peneliti memilih tempat lokasi penelitian yaitu di Kalurahan Panggungharjo Kapanewon Sewon Kabupaten Bantul. Karena ada beberapa hal seperti Pemerintah Desa yang Progresif yang di mana mantan Lurah Panggungharjo mendapatkan 3 penghargaan sekaligus pada acara *Paralagel Justice Award* 2023, Kamis (01/06/2023) yaitu yang pertama medali *Anubhawa Sasana Desa Jagaddita*, sebagai apresiasi atas kontribusi dalam mendorong pertumbuhan ekonomi pemberdayaan masyarakat. Kedua *pin profesi Non Litigasi Peacemaker (NLP)* di mana lurah dinobatkan sebagai hakim perdamaian desa dengan tugas utamanya yaitu membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang dihadapi warga desa diluar pengadilan dan ketiga apresiasi top Paralegal Justice Award. Kemudian pada tahun 2014 Kalurahan Panggungharjo dinobatkan oleh KPK sebagai pemerintah desa yang bebas korupsi sampai dibuat film dengan judul “Merah Putih di Panggungahrjo” dan juga memperoleh predikat desa terbaik secara nasional di tahun 2015 oleh Kemendagri yang mengalahkan sekitar 72.000 desa yang ada di seluruh Indonesia. Oleh karena itu Kalurahan Panggungharjo menjadi model bagi desa-desa di Indonesia.

Kalurahan Panggungharjo dikenal sebagai Desa Mandiri Budaya dan menjadi rujukan belajar mengelolah desa dengan baik. Hal ini tentunya karena kolaborasi antara pemerintah desa dan masyarakat yang baik, dan di dukung juga dengan program-program dari pemerintah desa atau supra desa. Di balik kesuksesan desa Panggungahrjo juga karena desa mampu mengelola kewenangan dan potensi yang di miliki seperti sanggar kesenian, kuliner yang terkenal seperti mangut lele dan nasi tumpang, penghasil kerajinan seperti

gamelan, kain batik, dan wayang serta lokasi yang bersejarah seperti Situs Yoni Karanggede dan Panggung Krapyak. Kalurahan Panggungharjo juga menjadi model daerah potensial komunitas sebagai pusat pengembangan dan pembinaan UMKM. Di Kalurahan Panggungharjo ada juga yang namanya Rumah Produksi Komunitas (RPK) yang membantu pelaku UMKM.

Rumah Produksi Komunitas ini berdiri pada tahun 2021 yang merupakan inkubasi dari BUM Desa Panggung Lestari. Inkubasi adalah pendekatan yang dilakukan oleh BUM Desa Panggung Lestari dalam mewujudkan transformasi kemandirian ekonomi desa. Program inkubasi ini merupakan hasil kolaborasi dengan PT Penggadaian yang mana mereka membantu pelaku UMKM untuk menghasilkan produk yang layak jual, tetapi yang juga memenuhi persyarakan sehat aman dan halal. Rumah Produksi Komunitas ini (RPK) terdiri dari ibu-ibu, karang taruna, mahasiswa dan lain-lain. Pemerintah Kalurahan menyediakan Rumah Produksi Komunitas ini untuk mendorong masyarakat dalam memanfaatkan sumber daya lokal dan meningkatkan keterampilan wirausaha.

Tujuan dari Rumah Produksi Komunitas ini untuk memfasilitasi, memberi edukasi dan dampingan kepada pelaku UMKM, mereka yang baru merintis, bahkan untuk ibu rumah tangga. Hal ini sangat membantu pelaku UMKM Panggunharjo dalam pelatihan pengemasan produk, manajemen, maupun pemasaran. Hal ini sangat membawa dampak positif bagi para pelaku UMKM di Panggungahrjo dalam berusaha dan menyukseskan program pemerintah dalam pemulihan ekonomi nasional. Karena melalui Rumah Produksi Komunitas ini para pelaku UMKM dibina, didik, diberi pelatihan, dan diwadahi

dalam memasarkan produk-produknya baik secara offline maupun online di swalayan desa Panggungharjo dan di Kampoeng Mataram. Oleh karena itu peneliti mau meneliti terkait Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo.

Disini peneliti menggunakan perspektif 5G yakni Governing untuk meneliti terkait Governing Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah di Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Piyungan, Kabupaten Bantul, Yogyakarta yang mana pihak pemerintah Kalurahan mempunyai langkah atau perbuatan yang baik untuk mencari solusi dalam proses Usaha Mikro Kecil Menengah ini. Pihak pemerintah Kalurahan Panggungharjo sebagai fasilitator harus berperan aktif menemukan permasalahan yang dialami oleh UMKM kemudian mencarikan solusi yang tepat. Pemerintah Kalurahan juga harus memiliki peran menjaga kondisi lingkungan usaha tetap kondusif serta dapat membuat kebijakan dan program tentang aturan-aturan persaingan usaha. Peneliti berpikir bahwa pemerintah adalah pihak yang mampu menerapkan aturan agar kehidupan dapat berjalan baik dan dinamis karena pemerintah memiliki peranan yang penting dalam tatanan kehidupan masyarakat. Sehingga, peneliti mengaitkan topik ini dengan perspektif Governing.

## B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dikemukakan di atas, maka rumusan masalah dari penelitian ini adalah Bagaimana Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo?

### **C. Fokus Penelitian**

1. Bagaimana Upaya Pemerintah Kalurahan Panggunharjo Dalam Pengembangan UMKM
2. Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM di Kalurahan Panggunharjo

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan pada rumusan masalah, adapun tujuan dari penelitian ini adalah

1. Untuk Mendeskripsikan Upaya Pemeritah Kalurahan Panggunharjo dalam Pengembangan UMKM
2. Untuk Mengetahui Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM.

### **E. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Akademis: Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memperluas wawasan keilmuan pada kajian Ilmu Pemerintahan mengenai Pengembangan UMKM oleh Pemerintah atau bahan referensi bagi peneliti berikut yang tertarik dengan penelitian mengenai Pengembangan UMKM oleh Pemerintah.
2. Manfaat Praktis: Diharapkan penelitian ini dapat memberi masukan kepada pihak terkait dan menjadi bahan refleksi dalam Pengembangan UMKM

3. Manfaat Bagi Penulis: Sebagai bahan pengetahuan dan melatih kemampuan berfikir dalam menganalisis pengembangan UMKM oleh pemerintah di Kabupaten Bantul secara umum dan di Kalurahan Panggungahrjo secara khusus.

## F. Literatur Review

Pada literatur review penulis akan menggambarkan beberapa penelitian terdahulu yang berkaitan dengan Pengembangan UMKM.

1. Nikmatus Sholicha, Renny Oktafia dengan Judul “Strategi Pemasaran Dalam Upaya Peningkatakan Omset Penjualan UMKM Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto” Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam Vol. 7 No 2 (2021). Metode yang digunakan kualitatif dengan pendekatan studi kasus. Didapatkan hasil yaitu yang pertama di Desa Sumber para pelaku UMKM belum ada inovasi yang baru terkait produk-produknya karena mereka masih menjajakan produk lama sehingga adanya kebosanan pembeli. Yang kedua ada dampak positif dan negatif dari penerapan strategi pemasaran peningkatan omset. Dampak negatifnya belum bersaing secara nasional dan positifnya mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa sendiri (Sholicha & Oktafia,2021). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, jenis penelitian, waktu penelitian, penelitian terdahulu belum adanya inovasi yang baru terkait produk-produknya dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya mampu membuka lapangan pekerjaan bagi warga desa sendiri.

2. Ajeng Wulansari DKK dengan Judul “Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM”. Dalam Jurnal penelitian administrasi publik Vol 7 No. 1 (2021), jurnal ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kasus. Didapatkan hasil penelitian yaitu strategi pemberdayaan Diskpo dan UMKM Kabupaten Karawang belum berjalan secara optimal dilihat dari pembinaan dan bantuan perijinan yang belum dirasakan secara keseluruhan oleh seluruh pelaku UMKM. Kemudian UMKM tidak mendapatkan bantuan dari Pemda hanya sebagian saja (Wulansari et al., 2021). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, jenis penelitian, waktu penelitian dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya tidak mendapatkan bantuan dari Pemda hanya sebagian saja.
3. Ita Rosita DKK, dengan Judul “Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai” Jurnal Niara Vol. 14 No 3 (2022). Jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Didapatkan hasil yaitu program UMKM di Kota Dumai yang dibuat oleh Diskop dan UMKM adalah upaya untuk meningkatkan pemberdayaan UMKM khususnya di Kecamatan Sungai Sembilan. Perubahan nyata bahwa pelaksanaan program UMKM telah efektif dilaksanakan, namun ada juga faktor penghambat seperti kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai teori dan sistem yang ada di lapangan. Sedangkan faktor pendukungnya yaitu mudahnya akses untuk

membuat perijinan dan pemerintah yang sudah mulai mensosialisasikan perizinan ke masyarakat (Ita Rosita,2021). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, waktu penelitian, metode penelitian, dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya kurangnya pengetahuan para pelaku UMKM mengenai teori dan sistem yang ada di lapangan.

4. Wawan Kurniawan DKK, dengan Judul “Strategi Pengembangan UMKM Kerajinan Ukir Kayu di Kabupaten Subang” Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM) Vol. 1 No 1 (2023), metode yang digunakan yaitu tahap persiapan, tahap pelaksanaan dan tahap evaluasi. Didapatkan hasil yaitu pengabdian terkait strategi pengembangan UMKM kerajinan ukir kayu di Kabupaten Subang terlihat bahwa pemberdayaan Industri Kecil Menengah Pengarjin Ukiran Kayu oleh Dinas Perindustrian dan Tenaga Kerja sudah berjalan baik tetapi masih kurang dalam segi pemasaran. Hal ini disebabkan karena ketersediaan bahan baku dan modal usaha pengrajin kayu (Rohman et al., 2023). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, jenis penelitian, waktu penelitian, dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya pengembangan UMKM sudah berjalan dengan baik tetapi masih kurang dalam segi pemasaran.
5. Riyanti Idayua DKK, dengan Judul “Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten

Pandeglang Banten” Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo Vol. 7 No 7 (2021), jurnal ini menggunakan metode kualitatif. Didapatkan hasil yaitu di Desa Nebol Kecamatan Mandalawangi pengembangan UMKM belum terlaksanakan dengan baik karena ada permasalahan pada setiap pelaku UMKM seperti permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia, sarana dan prasarana, pengenalan teknologi, dan sosial ekonomi. Oleh karena itu strategi yang tepat dilakukan untuk pengembangan UMKM di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi yaitu Strategi SO (growth) adalah strategi yang memanfaatkan kekuatan yang ada untuk meningkatkan keunggulan kompetitifnya (Idayu et al., 2021). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, waktu penelitian, dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaanya penelitian terdahulu dalam pengembangan UMKM belum maksimal karena kendala permodalan, produksi, pemasaran, sumber daya manusia dan lain-lain.

6. Ahmad Kholik Setiawan, Dewi Rahmi dengan Judul “Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung” Jurnal Riset Ilmu Ekonomi dan Bisnis Vol. 3 No (2023) jurnal ini menggunakan metode deskriptif kuantitatif. Didapatkan hasil yaitu (1) faktor yang menjadi kekuatan UMKM makanan dan minuman di Kalurahan Tamansari Kota Bandung yaitu memiliki hubungan kerja sama yang baik antara karyawan dan pemilik, target pasar tersendiri dan keahlian dalam hal produksi sedangkan kelemahanya kualitas SDM yang kurang dan

modal yang terbatas. (2) Peluang yang dimiliki UMKM makanan dan minuman yaitu program pembinaan yang dilakukan pemerintah bersama stakholder melalui Diskop dan UMKM. Sedangkan ancamannya adalah tidak adanya produk berciri khas, harga bahan baku yang tidak stabil dan tingkat persaingan yang tinggi (Ahmad Kholik & Dewi Rahmi, 2023). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, jenis penelitian, waktu penelitian dan penelitian terdahulu belum adanya produk berciri khas, bahan baku yang tidak stabil dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya target pasar tersendiri dan keahlian dalam hal produksi sedangkan kelemahanya kualitas SDM yang kurang dan modal yang terbatas.

7. Anita Karunia DKK, dengan Judul “Kajian Startegi Pengembangan UMKM di Kota Tegal” dalam Jurnal Riset Ekonomi Pembangunan Vol. 5 No 1 (2020). Metode yang digunakan adalah deskriptif kuantitatif. Didapatkan hasil yaitu bahwa pengembangan UMKM di Kota Tegal terdapat permasalahan pada setiap aspek seperti permodalan, teknologi, produksi, pemasaran Sumber Daya Manusia, Birokrasi saran prasarana dan sosial ekonomi. Oleh karena itu digunakan startegi SO (*Strength Opportunities*) yang menunjukan bahwa UMKM di sektor perdagangan di Kota Tegal berkembang dengan pesat (Rochmadi & Rohmah, 2019). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, waktu penelitian, jenis penelitian dan penelitian sekarang tidak menggunakan strategi SO (*Strength Opportunities*) dalam menyelesaikan

permasalahan UMKM dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya yaitu permasalahan pada setiap aspek seperti permodalan, teknologi, produksi, pemasaran Sumber Daya Manusia.

8. Robert Tua Siregar DKK, dengan Judul “Strategi Pengembangan UMKM di Kota Pematangsiantar” dalam Jurnal Konsep Bisnis dan Manajemen Vol. 6 No 2 (2020). Metode penelitian yang digunakan adalah kualitatif. Didapatkan hasil yaitu diharapkan peran serta pemerintah dalam melakukan pendampingan, pelatihan kepada pelaku UMKM di Kota Pematangsiantar dan pelaku UMKM juga sebaiknya lebih kreatif dan inovatif dalam memproduksi barang (Siregar et al., 2020). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian waktu penelitian, jenis penelitian dan penelitian terdahulu dalam strategi pengembangan UMKM peran pemerintah belum maksimal dan pelaku UMKM belum kreatif dan inovatif.
9. Yenni Vera Fibriyanti DKK, dengan Judul “Pengembangan UMKM Kerajinan Anyaman Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan” dalam jurnal Karya Abdi Vol. 4 No 3 (2020). Metode yang digunakan deskriptif kualitatif. Didapatkan hasil yaitu bahwa masyarakat di Desa Sumberjo, Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan sangat termotivasi dan tertarik untuk mengembangkan UMKM kerajinan anyaman dengan cara mengikuti sosialisasi, pelatihan dan pendampingan tentang kerajinan anyaman serta pembuatan laporan keungan karena hal ini dapat meningkatkan

perekonomian masyarakat di desa (Fibriyanti et al., 2021). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, waktu penelitian dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif.

10. Buyung Romadhon DKK, dengan Judul “Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat di Kabupaten Gowa” dalam Jurnal Ilmiah MEA Vol. 6 No 3 (2023). Metode yang digunakan kualitatif deskriptif. Didapatkan hasil yaitu ada beberapa kendala yang dihadapi UMKM di Kabupaten Gowa adalah rendahnya produktivitas, terbatasnya akses UMKM pada sumber daya produktif oleh karena itu peneliti menggunakan startegi analis SWOT dalam mengembangkan UMKM. Dalam hal ini analisis SWOT dapat di lakukan untuk menganalisis faktor-faktor lingkungan eksternal maupun internal bagi pelaku UMKM dan menentukan strategi pemasaran pada UMKM (Romadhoni et al., 2022). Perbedaan dari peneliti terdahulu dan peneliti sekarang adalah perbedaan dalam lokasi penelitian, waktu penelitian, peneliti terdahulu menggunakan analisis SWOT dan peneliti sekarang menggunakan konsep Governing. Persamaannya terbatasnya akses UMKM pada sumber daya produktif.

## **G. Kerangka Konseptual**

### **1. Konsep Governing**

Stephen Cook (2007) dalam bukunya yang berjudul Rulling But Not Governing menunjukkan bahwa perbedaan antara pemerintah (*Governing*) dan

menguasai (*Ruling*) tulisan ini berangkat dari sejarah perkembangan militer dan politik di Mesir yang mana kekuatan militer lebih dominasi di segala lini kehidupan masyarakat Mesir. Tetapi, kekuatan militer ini bukan merupakan tindakan memerintah karena mereka tidak menjalankan tugas mengatur dan mengurus. Dalam konteks ini, dominasi kekuatan militer itu hanya berhenti pada tataran menguasai (*ruling*).

*Rulling* dan *governing* mempunyai perbedaan. *Rulling* dapat dilakukan oleh siapapun termasuk oleh tentara atau non pemerintah. *Rulling* punya makna menguasai yang di dalamnya mengandung unsur dominasi. Sedangkan *governing* melekat pada pemerintah atau otoritas yang terlegitimasi untuk memerintah atau menyelenggarakan pemerintah. Pengertian dasar memerintah yaitu *Excercizing Political Authority*, penggunaan otoritas politik yang dipegang oleh pemerintah. Memerintah adalah menyelenggarakan pemerintahan.

Soetoro Eko (2021:64-65) Governing membahas mengenai mengatur dan mengurus yang diambil dari tradisi Belanda, mengatur berarti membuat keputusan terutama membuat hukum (*law making*), mengurus (*bestuur*) mengurus dan mengelola. Jadi, makna mengatur dan megurus itu adalah perbuatan hukum dan perbuatan administrasi dan agak mengabaikan perbuatan politik. Konsep ini menjalankan beberapa fungsi yaitu mengarahkan (*steering*), menata (*ordering*), memerintah (*governing*), dan menguasai (*rulling*).

*Governing* mengandung proses politik, hukum, dan administrasi sebab politik adalah sebuah kegiatan membuat keputusan dan hukum dan administrasi adalah sebagai bentuk teknis eksekusi dari hukum atau keputusan tersebut.

Fungsi pemerintahan adalah *protecting* atau melindungi bukan hanya *promoting*.

*Protecting* artinya melindungi rakyat jelata dari rampasan elit ekonomi dan menyelesaikan sengketa. *Governing* artinya mengatur dan mengurus ekonomi, sosial, dan lain-lainnya yang dilakukan oleh Pemerintah.

*Governing* adalah arena kontestasi sehingga dibutuhkan pemerintah yang kuat, berdaulat, dan demokratis dan tidak diintervensi oleh elit, dan pihak lainnya tetapi lebih tegak lurus. Desa, sebagai kesatuan masyarakat hukum atau badan hukum publik juga memiliki wewenang meskipun seluas kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah daerah. Kewenangan desa adalah hak desa untuk mengatur, mengurus, dan bertanggung jawab atas urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Mengatur dan mengurus mempunyai beberapa makna:

- a. Mengeluarkan dan menjalankan aturan main (peraturan), dan tentang apa yang boleh dan tidak boleh, sehingga mengikat kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Misalnya desa menetapkan besaran jasa pelayanan air minum yang dikelola oleh BUM Desa Air Bersih; atau desa menetapkan larangan truck besar masuk ke jalan kampung.
- b. Bertanggung jawab merencanakan, menganggarkan dan menjalankan kegiatan pembangunan atau pelayanan, serta menyelesaikan masalah yang muncul. Sebagai contoh, karena posyandu merupakan kewenangan lokal, maka desa bertanggung jawab melembagakan posyandu ke dalam perencanaan desa, sekaligus menganggarkan untuk kebutuhan posyandu, termasuk menyelesaikan masalah yang muncul.

- c. Memutuskan dan menjalankan alokasi sumber daya (baik dana, peralatan maupun personil) dalam kegiatan pembangunan atau pelayanan, termasuk membagi sumber daya kepada penerima manfaat. Sebagai contoh, desa memutuskan alokasi dana sekian rupiah dan menetapkan personil pengelola posyandu.
- d. Mengurus berarti menjalankan, melaksanakan maupun merawat *public goods* yang telah diatur tersebut. Implementasi pembangunan maupun pelayanan publik merupakan bentuk konkret mengurus.

Jika desa berwenang mengurus, dengan sendirinya desa juga mengurus terhadap hal-hal yang diatur. Hal ini berkaitan dengan kekuasaan mengatur dan mengurus terhadap asset atau hak milik desa. Namun demikian, konsep mengurus tidak mesti merupakan konskuensi dari kuasa mengatur atas hak milik tersebut. Mengurus, dalam hal ini, berarti mengelola atau menjalankan urusan yang diberikan oleh pemerintah kepada desa, atau bisa juga disebut sebagai hak kelola desa. Sebagai contoh hutan desa. Hutan desa merupakan hak milik negara Kementerian Kehutanan merupakan institusi negara yang mempunyai kuasa/kewenangan mengatur hutan desa tersebut dengan cara harus memperoleh izin dari Kementerian Kehutanan mengatur hutan desa sebagai hak kelola desa.

Kewenangan mengatur dan mengurus tersebut ditujukan kepada urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat. Urusan pemerintahan pada dasarnya mencakup tiga fungsi yang dijalankan oleh pemerintah; yaitu: pengaturan (*public regulation*), pelayanan publik (*public goods*), dan pemberdayaan masyarakat (*empowerment*). Pengaturan merupakan kegiatan

mengatur (membuat peraturan tentang perintah yang harus dijalankan dengan larangan yang harus dihindari) tentang pemanfaatan barang-barang publik seperti pendidikan, kesehatan, jalan, laut, sungai, hutan, kebun, air, udara, uang, dan lain-lain. Sedangkan pemberdayaan adalah fungsi pemerintah memperkuat kemampuan masyarakat dalam mengakses atau memanfaatkan barang-barang publik tersebut serta mengembangkan potensi dan aset yang dimiliki masyarakat.

Dengan demikian Peneliti dapat menyimpulkan bahwa *Governing* pemerintah Desa terhadap pelaku UKMK di Kalurahan Panggunharjo merupakan perbuatan pemerintah yang harus dikoneksikan dengan kebijakan yang dapat melindungi potensi sumber daya yang ada. Sehingga peran Pemerintah Kalurahan tidak hanya sampai pada pola lama yaitu menjadi penonton dan terjebak pada masalah sistem pemerintahan tanpa menyentuh ranah sosial masyarakat (*problem social*).

Mengontrol seluruh kebijakan dari proses sampai pada hasilnya adalah tanggung jawab pemerintahan sebagai pelaku pemangku kepentingan. Artinya pemerintah dalam membuat kebijakan harus mampu membangun dan mengembangkan potensi yang dapat memajukan sumberdaya manusia (SDM) dan ekonomi masyarakat desa, sehingga sejatinya dalam mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya dapat melihat seluruh ranah masyarakat desa baik itu ekonomi, politik, dan sosial budaya. Ini artinya bahwa pihak pemerintah desa sebagai tiang penyangga dalam pembangunan desa juga yang menentukan arah kebijakan desa perlu mengambil langkah penting dan nyata dalam upaya

pengembangan UMKM yang ada di Kalurahan Panggunharjo untuk meningkatkan perekonomian masyarakat Kalurahan. Hal ini dapat dilihat dari langkah pemerintah dalam menyusun Kebijakan dalam pengembangan UMKM.

## **2. Usaha Kecil dan Menengah (UMKM)**

Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang sering disingkat sebagai UMKM ini menjadi salah satu bagian yang penting dari perekonomian suatu negara maupun daerah begitupun juga dengan negara indonesia. UMKM adalah kegiatan ekonomi rakyat yang berskala kecil dan menengah yang perlu dilindungi, diperhatikan agar terhindar dari persaingan usaha yang tidak sehat. Warkum Sumitro (2017:10) dalam ((Adolph, 2020) mendefinisikan UMKM merupakan usaha yang dilakukan oleh suatu perusahaan tenaga kerja yang tidak melebihi 50 orang. Usaha skala mikro adalah sebagian besar dari bentuk usaha mikro dan usaha kecil seperti kerajinan, pedagang kaki lima, usaha soviner dan lain-lain . Hal ini karena UMKM memiliki peranan dalam penyerapan tenaga kerja dan pertumbuhan ekonomi. UMKM adalah usaha yang memberikan pelayanan ekonomi secara luas dan usaha yang dapat mampu memperluas lapangan kerja serta dapat berperan dalam pemerataan dan peningkatan pendapatan masyarakat. Selain itu UMKM merupakan salah satu utama pilar perekonomian nasional yang harus dilindungi, diberi kesempatan utama, diberi dukungan dan pengembangan seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan, kepedulian terhadap kelompok usaha ekonomi rakyat tanpa mengabaikan juga peranan dari usaha besar dan Badan Usaha Milik Negara (Hanim et al., 2022). Salah satu pemain penting dalam perekonomian nasional adalah UMKM.

Sebagai salah satu aspek terpenting dalam perekonomian, UMKM memberikan kontribusi yang besar terhadap kehidupan masyarakat bangsa, antara lain dengan memperluas lapangan pekerjaan, mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya lokal yang tersedia di suatu daerah, meningkatkan kreativitas, meningkatkan nilai PDB (Produk Domestik Bruto), memberikan solusi efektif terhadap permasalahan perekonomian kelas kecil serta mengurangi dan meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD). UMKM semakin digencarkan oleh setiap daerah untuk meningkatkan kehidupan perekonomian masyarakat dalam persaingan global yang semakin memuncak. UMKM merupakan usaha yang meningkatkan perekonomian masyarakat dan menciptakan lapangan pekerjaan serta juga mempunyai kontribusi terhadap perekonomian nasional. Berdasarkan data Kementerian Koperasi Usaha Kecil dan Menengah (KUKM) pada tahun 2024 yaitu 64,19 juta yang terus mengalami pertumbuhan setiap tahunnya. Dari data tersebut bahwa UMKM menjadi salah satu solusi bagi pertumbuhan angkatan pekerjaan baru di Indonesia dengan jumlah penyerapan tenaga kerja yang cukup tinggi.

Menurut pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha yang mampu meningkatkan perekonomian masyarakat, memperluas lapangan pekerjaan, dan mengoptimalkan pemanfaataan sumber daya lokal. UMKM ini dapat dilakukan perorangan ataupun kelompok yang berskala besar atau kecil yang menyerap tenaga kerja jika dikembangkan dengan baik. Hal ini tentunya membutuhkan peranan pemerintah di dalam memberikan perlindungan,

dukungan yang seluas-luasnya untuk pelaku UMKM agar tetap berkembang dan berdaya saing baik di tingkat daerah maupun di tingkat nasional sekalipun.

Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN) mendefenisikan pengertian tentang UMKM sebagai pelaku usaha ekonomi yang digolongkan sebagai perusahaan yang berskala kecil yang dikelola sendiri menggunakan teknologi tradisional. UMKM adalah unit usaha produksi yang berdiri sendiri, lakukan oleh orang perorangan atau semua badan usaha di sektor ekonomi. Tambunan (2013:2). Dalam ((Adolph, 2016) Oleh karena itu UMKM dijelaskan sebagai 30 perusahaan yang dimiliki dan yang dikelola seorang atau yang dimiliki sekelompok kecil orang dengan pendapat tertentu atau jumlah kekayaan tertentu. Selain itu Tambunan (2013:2) juga mengklasifikasikan UMKM menjadi 4 kelompok di antaranya:

- a. *Livelihood Activvities* yaitu UMKM yang dijadikan peluang kerja untuk mencari nafka seperti pedagang kaki lima.
- b. Usaha Mikro yaitu UMKM yang bersifat pengrajin tetapi belum bersifat wirausaha.
- c. *Small Dynamic Enterprise* yaitu UMKM yang telah memiliki jiwa wirausaha dan mampu menerima pekerjaan subkontrak dan eksport.
- d. *Fast Moving Enterprise* yaitu UMKM yang sudah berjiwa wirausaha dan akan bertransformasi menjadi bigbusiness (UB)

Menurut (BPS) Badan Pusat Statistik pengertian UMKM berdasarkan kuantitas tenaga kerja. Usaha kecil adalah usaha yang memiliki tenaga kerja yang berjumlah 5 orang sampai 19 orang sedangkan usaha menengah adalah

usaha yang memiliki jumlah tenaga kerja 20 orang sampai dengan 99 orang. Menurut Kementerian Koperasi dan UMKM Aufar (2014:8) dalam ((Dzulhadi et al., 2022) Usaha Kecil (UK) termasuk usaha mikro (UMI) merupakan jumlah usaha yang mempunyai kekayaan bersih paling banyak Rp.200.000.000 yang tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha dan memiliki penjualan tahunan paling banyak Rp.1.000.000.000. Sedangkan Usaha Menengah (UM) merupakan jumlah usaha milik warga negara Indonesia yang memiliki kekayaan bersih lebih besar dari Rp.200.000.000 s.d Rp.10.000.000 tidak termasuk tanah dan bangunan.

Pada Tahun 2008 Pemerintah telah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM pada pasal 2 Pemerintah menegaskan bahwa Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya menyelenggarakan pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah dan upaya pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah yang meliputi beberapa poin yang penting yaitu perizinan, pengembangan usaha, kemitraan dan koordinasi dan pengendalian. Dan dalam Bab 1 Pasal 1 menjelaskan defenisi UMKM adalah sebagai berikut:

- a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro yang memiliki kriteria sebagai berikut:
  - a) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan paling banyak Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah).
- b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari Usaha Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi kriteria Usaha Kecil sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau
  - b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp300.000.000,00 (tiga ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp2.500.000.000,00 (dua miliar lima ratus juta rupiah).
- c. Usaha Menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dengan Usaha Kecil atau Usaha Besar dengan jumlah kekayaan bersih atau hasil penjualan tahunan sebagaimana yang memiliki kriteria sebagai berikut:
- a) Memiliki kekayaan bersih lebih dari Rp500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp10.000.000.000,00 (sepuluh miliar rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

- b) Memiliki hasil penjualan tahunan lebih dari Rp2.500.000.000,00 (dua milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak Rp50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah)

Dalam rangka meningkatkan daya saing nasional, melalui peraturan Presiden Nomor 27 Tahun 2013 tentang inkubator wirausaha pemerintah merasa perlu bahwa dalam dunia wirausaha baru harus kreatif, inovasi tangguh dan profesional karena wirausaha merupakan wahana yang efektif dalam mengembangkan jiwa kewirausahaan, jejaringan, dan kemampuan wawasan berusaha. Dalam bab 1 pasal 1 dalam peraturan Presiden ini menjelaskan inkubator wirausaha adalah lembaga intermediasi yang melakukan proses ikubasi bagi peserta inkubasi atau wirausahawan atau calon wirausahawan yang melakukan kegiatan ekonomi di indonesia atau berdomisili di Indonesia. Dalam hal implementasi dari Peraturan Presiden ini juga disambut oleh regulasi lain yang di tingkat kementerian sampai pada tingkat daerah sebagai unsur penyelenggaran pemerintahan. Kemudian pemerintah mengeluarkan peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang kemudahan, perlindungan dan Pemberdayaan UMKM yang di lakukan melalui pembinaan dan pemberian fasilitasi.

Berdasarkan pasal 2 UU Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM menjelaskan asas UMKM adalah:

- a. Kekeluargaan;
- b. Demokrasi ekonomi;
- c. Kebersamaan;

- d. Efisiensi berkeadilan;
- e. Berkelanjutan;
- f. Berwawasan lingkungan;
- g. Kemandirian;
- h. Keseimbangan kemajuan; dan
- i. Kesatuan ekonomi nasional.

Pada defenisi di atas dapat disimpulkan bahwa UMKM merupakan usaha miliki perorangan atau usaha yang bukan dari cabang perusahaan lain yang didasarkan pada kriteria modal usaha dan batas-batas tertentu yang diatur dalam peraturan-peraturan yang kemudian harus dikembangkan sehingga dapat menciptkan inovasi-inovasi baru.

Bambang Riyanto dalam bukunya yang berjudul “Dasar-dasar Pembelanjaan Usaha” menjelaskan bahwa modal di golongkan berdasarkan pada sumber, bentuk, kepemilikan dan sifat. Berdasarkan sumber, modal digolongkan menjadi dua yaitu modal sendiri dan modal asing. Modal sendiri itu seperti setoran dari pihak pemilik usaha, dan modal asing itu seperti pinjaman dari lembaga keuangan maupun non-keuangan. Dan berdasarkan bentuk, modal di golongkan menjadi dua juga yaitu modal konkret dan modal abstrak. Modal konkret itu seperti mesin, gedung, kendaraan dan perusahaan. Sedangkan modal abstrak itu seperti hak merk dan nama baik perusahaan. Berdasarkan kepemilikan, modal juga dibagi menjadi dua yaitu modal individu dan modal masyarakat. Modal individu seperti rumah pribadi yang disewa dan modal masyarakat seperti rumah sakit umum milik perusahaan, dan jembatan. Dan

berdasarkan sifat modal terbagi menjadi modal tetap dan modal lancar. Modal tetap ini yakni bangunan dan mesin, dan modal lancar yakni bahan-bahan baku. Dengan adanya modal dalam UMKM tersebut dapat bermanfaat untuk keperluan yakni memperluas pasar, membuka cabang baru dan keperluan lainnya. Jenis modal berdasarkan sumber dibagi menjadi dua yakni modal internal dan modal eksternal. Modal internal ini adalah modal kekayaan dari pihak yang terlibat bisnis, yang bersumber dari modal kekayaan pemilik, modal saham atau modal laba perusahaan seperti gedung, tanah, tabungan pribadi, keuntungan perusahaan, tabungan pribadi dan lain-lain. Sedangkan modal eksternal adalah modal yang didapatkan dari kekayaan perusahaan yang bersumber dari investor atau kredit yakni bank, pinjaman personal ataupun dari koperasi.

UMKM juga menjadi alternatif dalam mengurangi angka kemiskinan dan dapat membantu menurunkan angka pengangguran di Indonesia. UMKM juga memiliki peran yang sangat penting dalam membantu pemerataan ekonomi masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwasanya UMKM beda dengan perusahaan besar lainnya yang mana UMKM dapat tumbuh dan berkembang di mana saja baik di daerah yang jauh dari pusat perkotaan. Melalui keberadaan UMKM di berbagai provinsi hal ini dapat menjadi acuan sarana bisnis untuk pemerataan perekonomian di berbagai belahan wilayah.

UMKM meskipun menjadi salah satu penggerak perekonomian di Indonesia tetapi dalam pelaksanaannya masih memiliki permasalahan-permasalahan yang kerap terjadi seperti masih kurangnya inovasi-inovasi baru dalam pengembangan produk sehingga produk-produk yang dihasilkan itu-itu

saja, relasi pasar yang belum meluas sehingga daya jualnya pun tidak dapat dijangau oleh masyarakat luas, keterbatasan sumber pembiayaan dalam hal ini modal yang belum terlalu cukup atau mendukung oleh karena itu banyak pelaku usahanya mandek atau tidak berlangsung lama. Dan kurangnya kemampuan atau skil dalam memanfaatkan teknologi dalam membantu pemasaran produk-produk UMKM.

Berdasarkan atas permasalahan tersebut, seperti halnya yang terjadi di Kalurahan Panggunharjo maka pemerintah menjadi tolak ukur keberhasilan UMKM dalam mempertahankan dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Pemerintah Kalurahan harus memecahkan permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh masyarakat salah satunya dengan pengembangan UMKM. Bahwasanya UMKM juga memiliki kontribusi besar terhadap masyarakat dan melalui UMKM juga masyarakat yang pendidikan rendah dapat masuk dalam dunia kerja ataupun mengembangkan usaha. Sehingga angka pengangguran dan kemiskinan dapat teratasi di Kalurahan Pangunharjo UMKM menjadi salah satu sumber pemasukan bagi masyarakat, melalui pengembangan bahan baku lokal ataupun inovasi-inovasi dari masyarakat yang menjadikan usaha tersebut memiliki nilai jual.

### **3. Pengembangan UMKM**

Pengembangan dapat diartikan sebagai suatu usaha untuk meningkatkan kemampuan konseptual, teoritis, teknis dan moral individu yang sesuai dengan kebutuhan pekerjaan atau melalui suatu jabatan pelatihan dan pendidikan. Pengembangan atau *Research and Development* (R&D) adalah aktivitas riset

dasar dalam mendapatkan informasi kebutuhan pengguna (*need assessment*) setelah itu dilanjutkan pengembangan (*development*) untuk menghasilkan produk dan mengkaji keefektifan produk tersebut. Pengembangan merupakan proses, cara pengembangan sedangkan mengembangkan merupakan perintah selalu berusaha secara bertahap, teratur yang bertujuan pada sasaran yang diinginkan. Menurut Sugiyono (2009:297) dalam ((Adolph, 2016). Pengembangan (*development*) mencakup kesempatan belajar yang bertujuan untuk dapat meningkatkan pengetahuan (*knowledge*) dan keahlian (*skill*) yang dibutuhkan dalam pekerjaan yang sedang dijalani, pengembangan lebih difokuskan untuk jangka panjang. Pengembangan UKM ini lebih difokuskan menjadi pelaku ekonomi yang berdaya saing, melalui perkuatan kewirausahaan dan peningkatan produktivitas yang didukung dengan peningkatan kebutuhan pasar, penerapan teknologi dan pemanfaatan hasil inovasi. (Afifudin, 2010:180). Dalam (Egim & Nenengsih, 2019) Pengembangan UMKM merupakan upaya yang di lakukan oleh pemerintah, dunia usaha dan masyarakat dalam mendorong UMKM untuk meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku melalui penyediaan fasilitas, bimbingan, pendampingan, dan bantuan perkuatan.

Dapat disimpulkan bahwa pengembangan merupakan upaya yang dilakukan di setiap bidang yang dibutuhkan didalam pekerjaan yang sedang dijalani yang difokuskan untuk jangka panjang. Dalam hal ini pengembangan UMKM yang dibutuhkan di dalam pengembangan UMKM adalah upaya untuk menciptakan inovasi-inovasi baru, design dan teknologi fasilitas, sumber daya manusianya dan pemasaran. Bahwasanya upaya dalam mengembangkan

UMKM ini perlu diperhatikan agar dapat membawa pada perubahan dan meningkatkan daya saing pelaku UMKM dalam berwirausaha.

Pengaruh pengembangan UMKM di Indonesia dan melihat peran serta pemerintah untuk meningkatkan pertumbuhan UMKM di Indonesia memiliki dampak yang positif baik itu secara langsung maupun secara tidak langsung. Pengembangan UMKM pada hakikatnya adalah merupakan tanggung jawab bersama antara pemerintah masyarakat dan stackholder dengan memperhatikan permasalahan yang dihadapi oleh pelaku UMKM agar diperlukan upaya hal-hal seperti penciptaan iklim, bantuan permodalan, usaha yang kondusif, perlindungan usaha, pelatihan, pengembangan kemitraan, mengembangkan promosi dan mengembangkan kerja sama yang setara (Tambunan 2009:04) dalam (Hafsah 20024-44) (Alyas, 2017).

Berdasarkan beberapa uraian penjelasan di atas maka dapat disimpulkan bahwa pengembangan UMKM merupakan suatu usaha atau strategi yang dilakukan secara bertahap, dengan tujuan untuk memberdayakan atau membawa pada suatu perubahan terhadap level usaha ke arah yang lebih baik melalui peningkatan usaha, kualitas produksi dan terutama *skil* atau kemampuan sumber daya manusia sebagai pelaku UMKM dengan melibatkan berbagai pihak di dalamnya seperti pemerintah, dunia usaha dan masyarakat. Namun seringkali yang terjadi di lapangan bahwa kualitas sumber daya manusia yakni dalam pengelolaan UMKM masih termasuk golongan rendah. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memberikan bantuan bagi pelaku usaha, misalnya dalam memberikan pelatihan, pendampingan, permodalan dan lain sebagainya.

Pengembangan menurut Kamus Bahasa Indonesia merupakan tindakan, metode atau langkah-langkah yang dilakukan untuk meningkatkan sesuatu pengembangan ini merupakan meningkatkan pengetahuan, keterampilan. Abdurohim ((2021:2008) juga berpendapat pengembangan usaha adalah upaya yang dilakukan oleh pemerintah dalam hal ini pemerintah desa, masyarakat, serta pihak-pihak lainnya untuk meningkatkan daya saing. Melalui pengembangan ini bertujuan untuk meningkatkan produktivitas, meningkatkan daya saing ekonomi dengan memperkuat kewirausahaan yang ada, memanfaatkan inovasi, beradaptasi dengan pasar dan menerapkan teknologi yang baru.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang UMKM Pada pasal 16 ayat (1) menyatakan bahwa:

- a. Pemerintah dan Pemerintah Daerah memfasilitasi pengembangan usaha dalam bidang:
  - a) Produksi dan Pengolahan;
  - b) Pemasaran;
  - c) Sumber Daya Manusia; dan
  - d) Desain dan Teknologi.
- b. Dunia usaha dan masyarakat berperan serta secara aktif melakukan pengembangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Dalam hal ini untuk meningkatkan teknik produksi dan pengelolaan dilakukan dengan cara memberikan kemudahan dalam pengadaan sarana dan prasarana pengolahan bahan baku dan kemasan bagi UMKM. Dalam melaksanakan pemasaran harus menyediakan sarana seperti penyediaan rumah

dagang, dan promosi UMKM dan dalam hal pengembangan di bidang sumber daya manusia harus meningkatkan pendidikan dan pelatihan serta mampu menguasai teknologi untuk mengembangkan desain dan teknologi baru.

Pada Pasal 16 ayat (1) huruf c di katakan bahwa pengembangan UMKM dalam bidang sumber daya manusia dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut sebagai berikut:

- a. Memasyarakatkan dan membudayakan kewirausahaan;
- b. Meningkatkan keterampilan teknis dan manajerial; dan
- c. Membentuk dan mengembangkan lembaga pendidikan dan pelatihan untuk melakukan pendidikan, pelatihan, penyuluhan, motivasi dan kreativitas bisnis, dan penciptaan wirausaha baru.

Berdasarkan tiga hal tersebut maka diperlukan peningkatan pada kualitas aspek sumber daya manusia karena merupakan salah satu subjek yang paling penting di dalam upaya pengembangan UMKM agar mampu menciptakan masyarakat yang berwirausaha, mandiri sehingga tetap berjalan dalam kondisi apapun, dan agar tentunya mampu menghadapi resiko sehingga usaha yang dijalankan dapat terus berkembang dalam menghadapi persaingan ekonomi di tengah pasar global di dalam pengembangan UMKM yang perlu dikembangkan yaitu: a. Perluasan jaringan pemasaran produk UMKM, b. Peningkatan kualitas produk, c. Peningkatan kemampuan sumber daya manusia, dan d. Meningkatkan inovasi-inovasi baru. Pengembangan pada dasarnya itu merupakan tanggung jawab bersama antara masyarakat dan pemerintah. Untuk mengatasi masalah-masalah yang dihadapi oleh pelaku usaha maka diperlukan beberapa langkah

seperti: memberikan bantuan permodalan, melindungi usaha, memperkuat kerja sama, dan mengembangkan kemitraan. Dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pengembangan UMKM ada beberapa hal yang perlu dikembangkan seperti:

a. Peningkatan kualitas sumber daya manusia

Kualitas sumber daya manusia sangat penting di dalam pengembangan UMKM hal ini agar dapat menciptakan masyarakat yang mandiri, berinovasi, kreatif dan berwirausaha sehingga terus berkembang dalam menghadapi persaingan.

b. Peningkatan kualitas produk

Dalam pengembangan UMKM peningkatan kualitas produk harus diperhatikan seperti penggunaan bahan baku yang berkualitas dan aman, menggunakan kemasan yang baik, memperkuat nama merk agar konsumen tidak kesulitan, dan pelayanan yang baik

c. Meningkatkan inovasi-inovasi baru

Inovasi-inovasi baru sangat mempengaruhi perkembangan suatu produk. Karena produk yang itu-itu saja dapat menyebabkan kebosanan pada konsumen oleh karena itu dalam mengembangkan UMKM perlu meningkatkan inovasi-inovasi baru agar dapat berdaya saing dalam tingkat daerah maupun nasional.

d. Pengadaan sarana dan prasarana produksi

Sarana dan prasarana produksi harus dikembangkan agar dapat menunjang keberadaan UMKM seperti rumah produksi atau dagang, dan alat-alat yang membantu pelaku UMKM.

e. Peningkatan desain dan teknologi

Desain dan teknologi yang canggih dapat meningkatkan daya beli yang tinggi oleh karena itu pengembangan kemampuan dalam menguasai dan menggunakan teknologi sangat membantu pelaku UMKM.

f. Pemasaran

Strategi pemasaran yang tepat dapat membantu pelaku UMKM untuk bersaing seperti pemasaran lewat media sosial, atau secara langsung maupun di event-event tertentu dan penetapan harga dan distribusi yang menentukan keberhasilan dalam pemasaran. Oleh karena itu skill dalam pengembangan pemasaran perlu dikembangkan.

Berkaitan dengan hal di atas bahwasanya ada beberapa hal yang perlu dikembangkan di dalam pengembangan UMKM agar pelaku UMKM dapat berdayasaing dan dengan memperhatikan beberapa aspek tersebut UMKM lebih berkembang dan unggul di dalam menciptakan usaha dan peluang. Pengembangan UMKM yang terdapat di Kalurahan Panggunharjo bahwa Pemerintah sudah berupaya melakukan berbagai pelatihan, memfasilitasi, dan program-program yang menunjang keberadaan UMKM guna meningkatkan kemampaun dan daya saing pelaku UMKM.

#### **4. Kewenangan Pemerintah Kalurahan**

Kewenangan merupakan elemen penting bagi sebuah desa dalam mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri. Bahwasanya kewenangan ini bukan semata-mata hanya memperhatikan kekuasaan yang dimiliki oleh penguasa tetapi juga harus memperhatikan subjek yang menjalankan atau

menerima kekuasaan itu agar kewenangan itu seimbang. Negara melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa mengakui dan menghormati bahwa desa memiliki kewenangan desa. Kewenangan desa ini bukan pelimpahan dari pemerintah supradesa melainkan pengakuan (rekognisi) dan penghormatan (subsidiaritas) dari negara. Harapannya agar desa bisa bertenaga secara sosial dan berdaulat secara politik sebagai demokrasi desa serta berdaya secara ekonomi dan bermartabat secara budaya. Artinya bahwa desa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun, mengembangkan dan memandirikan dengan demikian desa atau yang disebut dengan nama lain yang dipahami sebagai satukesatuan masyarakat hukum yang memiliki hak dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat menuju kesejahteraan bersama.

Kewenangan dapat diartikan sebagai sebuah kekuasaan dan hak seseorang ataupun lembaga dalam melakukan sesuatu, baik di dalam membuat kebijakan, mengambil suatu keputusan atau mengorganisir masyarakat untuk ikut terlibat di dalam setiap kegiatan yang berkaitan dengan kesejhteraan masyarakat. Kewenangan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu sementara kekuasaan adalah kemampuan untuk melakukan sesuatu. (Sutoro Eko, 2014:16). Dalam (Lasoma, 2015). Berdasarkan pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan desa adalah kemampuan pemerintah desa dalam mengurus rumah tangganya sendiri yang meliputi urusan pemerintahan, pemberdayaan, pembangunan dan pembinaan masyarakat.

Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa disebutkan pada Pasal 1 bahwa Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 18 menyatakan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan ada istiadat di desa. Dalam Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan desa pada Pasal 1 menyebutkan Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang di sebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pada Pasal 6 menyatakan kewenangan desa meliputi:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul;
- b. Kewenangan lokal berskala Desa;
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota;
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh Pemerintah,

Pemerintah Daerah Provinsi, atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Kewenangan Desa juga diatur di dalam Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 tentang kewenangan Kalurahan yang pada Pasal 1 menyebutkan bahwa a. Kalurahan adalah sebutan Desa di wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang terdiri atas gabungan beberapa padukuhan yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kapanewon. b. Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang ditugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. c. Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat. d. Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah dijalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan. Pada Pasal 2 Kewenangan Kalurahan Meliputi a. Penyelenggaraan Pemerintahan; b. Pembangunan; c. Pembinaan kemasyarakatan; d. Pemberdayaan masyarakat; e. Pelaksanaan penugasan urusan keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan dan tata ruang dalam Kalurahan

berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat dan nilai-nilai kearifan lokal.

Peraturan Bupati Bantul mengenai pengembangan UMKM juga diatur pada Nomor 122 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata kerja Dinas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kabupaten Bantul yang mana dalam Pasal 24 menyatakan bahwa seksi pengembangan mempunyai tugas penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha mikro diantaranya:

- a. Penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan bidang pengembangan usaha mikro
- b. Penguatan dan pengembangan usaha mikro dengan orientasi peningkatan skala usaha menjadi usaha kecil
- c. Pengoordinasian penguatan dan pengembangan kewirausahaan
- d. Perancangan akses pasar bagi produk usaha di dalam dan luar negeri
- e. Promosi akses pasar bagi produk usaha di dalam dan luar negeri
- f. Pelaksanaan fasilitasi pengembangan bagi usaha
- g. Penyiapan bahan pemberian bimbingan teknis dan supervisi bidang pengembangan usaha mikro

Dapat disimpulkan bahwa kewenangan dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam hal ini pengembangan UMKM telah diatur dalam berbagai regulasi yang artinya bahwa dalam pengembangan UMKM pemerintah harus memperhatikan, memfasilitasi, dan mendorong pelaku UMKM agar dapat menghasilkan produk-produk yang unggul dan berdaya saing dalam pasar baik di dalam negeri maupun di luar negeri.

Berdasarkan konteks Undang-Undang tersebut Kewenangan Kalurahan ini diatur lebih lanjut di dalam Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2020 yang menyatakan bahwa Kewenangan Kalurahan adalah kewenangan yang dimiliki Kalurahan meliputi kewenangan berdasarkan hak asal usul, kewenangan lokal berskala Kalurahan, kewenangan yang di tugaskan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah DIY, atau Pemerintah Daerah serta kewenangan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kewenangan ini meliputi penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, pemberdayaan masyarakat dan pelaksanaan penugasan urusan Keistimewaan di bidang kelembagaan, kebudayaan, pertanahan, dan tata ruang dalam Kalurahan berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, adat istiadat, dan nilai-nilai kearifan lokal.

Kewenangan Berdasarkan Hak Asal Usul adalah hak yang merupakan warisan yang masih hidup dan prakarsa Kalurahan atau prakarsa masyarakat Kalurahan sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat di antaranya seperti sistem organisasi masyarakat adat, kelembagaan hukum adat, tanah khas, dan kesepakatan dalam kehidupan masyarakat. Dan Kewenangan Lokal Berskala Kalurahan adalah kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat Kalurahan yang telah di jalankan oleh Kalurahan atau mampu dan efektif dijalankan oleh Kalurahan atau yang muncul karena perkembangan Kalurahan dan prakarsa masyarakat Kalurahan di antaranya meliputi pasar, tempat pemandian umum, saluran irigasi, sanitasi lingkungan,

sanggar seni dan belajar, pos pelayanan terpadu, embung kalurahan, dan jalan yang ada di Kalurahan.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa dengan adanya hak otonomi yang dimiliki desa tersebut maka desa dapat melaksanakan urusan pemerintah tertentu yang berkaitan dengan pendeklegasian atau penugasan dari pusat maupun daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, yang artinya bahwa desa harus memanfaatkan kesempatan ini untuk membangun, mengembangkan memandirikan agar desa sebagai subjek pembangun dan desa dapat berperan di dalam kesejahteraan masyarakat serta pelayanan publik. Peraturan Desa Panggungharjo Nomor 2 Tahun 2024 tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa mengenai pengembangan UMKM yang mana pada bab IIII poin C tentang Identifikasi masalah menjelaskan bahwa perumusan permasalahan di kalurahan bertujuan untuk mengidentifikasi berbagai faktor yang mempengaruhi keberhasilan /kegagalan kinerja pembangunan kalurahan, khususnya yang berhubungan dengan yang berhubungan dengan kemampuan manajemen pemerintahan dalam memberdayakan kewenangan yang dimiliki kalurahan. Daftar Permasalahan ini didapat dari hasil pengkajian kalurahan melalui kegiatan workshop atau FGD yang menghadirkan masingmasing perwakilan dusun dan lembaga masyarakat yang berkompeten dan mewakili unsur-unsur yang ada didalamnya dengan menggunakan alat kaji potret kalurahan, hubungan kelembagaan dan kalender musim. Salah satunya yaitu dalam bidang pelaksanaan pembangunan yang meliputi pengembangan usaha ekonomi produktif serta pembangunan, pembangunan, pemanfaatan dan

pemeliharaan sarana dan pra sarana ekonomi, yaitu BUM Desa, Irigasi UMKM. Pembangunan ini tidak hanya bersifat infrastruktur saja tetapi meliputi pembangunan sumber daya manusia. Dalam infrastruktur aset prasarana ekonomi meliputi tokoh buah, kios/warung kelontong, warung makan, jas (loundry, cuci mobil, dan lain-lain) dan wisata kuliner. Berdasarkan peraturan diatas bahwasanya dalam pengembangan UMKM pemerintah tidak hanya mengembangkan infrastruktur saja dalam hal ini fisiknya saja tetapi harus juga dengan kualitas sumber daya manusianya juga agar seimbang dan berdampak pada perubahan.

Peraturan Desa nomor 6 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMdes). RPJMDes adalah dokumen perencanaan pembangunan desa yang memuat visi, misi, dan arah kebijakan pembangunan. Penyusunan arah kebijakan pembangunan ini didasarkan pada pendekatan kondisi, permasalahan aspirasi masyarakat dan kebutuhan nyata yang sejalan dengan perkembangan Desa Panggungharjo. Permasalahan dan kebutuhan nyata di Kalurahan Panggungharjo bahwasanya dalam hal pengembangan UMKM masih lemah di dalam beberapa aspek yang berdasarkan pada FGD. Hal ini juga berdasarkan pada misi ketiga RPJMdes yaitu “Meningkatkan Potensi dan Daya Dukung Lingkungan Untuk Menciptakan Peluang Usaha” dengan tujuan:

- a. Mewujudkan kemandirian dalam pengelolaan sumber daya alam
- b. Meningkatkan etos kerja dan motivasi berwirausaha
- c. Meningkatkan pemberdayaan industri kecil dan koperasi

- d. Meningkatkan kerjasama dengan lembaga pemerintah dan non pemerintah agar meningkatkan keterampilan kerja

Misi ketiga ini memiliki arah kebijakan dalam pembangunan ekonomi sebagai berikut:

- a. Meningkatkan mutu SDM dan pengelolaan aset
- b. Meningkatkan kualitas sarana fisik, sarana umum dan sarana pra sarana ekonomi
- c. Meningkatkan usaha produktif masyarakat
- d. Meningkatkan kualitas produk, SDM dan kelembagaan UMKM kreatif
- e. Meningkatkan ketersediaan lapangan pekerjaan dan kemudahan usaha

Berdasarkan beberapa aspek diatas bahwa kewenangan pemerintah dalam pengembangan UMKM diharapkan pemerintah Kalurahan dapat meningkatkan inovasi produk, Sumber daya manusia, akses permodalan, perluasan jangkauan pemasaran, dan menjalin kerja sama dengan pihak-pihak terkait serta peningkatakan sarana dan prasarana.

Dapat di simpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Kalurahan lebih pada hak untuk melakukan sesuatu yang mana kewenangan itu dilakukan untuk mengurus rumah tangganya sendiri baik di dalam pemerintahan, pembangunan, pemberdayaan dan pembinaan yang mana dalam hal pengembangan UMKM pemerintah Kalurahan memiliki kewenangan untuk mengatur, mewadahi keberadaan UMKM tersebut agar dapat berkembang dan meningkatkan perekonomian masyarakat. Dalam hal ini kewenangan Pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam pengembangan UMKM sudah di upayakan dan di dukung

juga dengan peraturan Bupati yang menjelaskan beberapa aspek mengenai pengembangan UMKM seperti perancangan akses pasar, fasilitas pengembangan bagi pelaku usaha, pembinaan dan bimbingan bagi pelaku usaha, pengordinasian wirausaha dan dalam RKPDes Panggunharjo yang menyatakan bahwa dalam pengembangan UMKM tidak hanya infrastruktur luarnya saja tetapi di dalamnya juga seperti kualitas sumber daya manusianya juga. Serta diatur juga di dalam RPJMDes Panggunharjo yang mana dalam pengembangan UMKM beberapa aspek yang perlu diperhatikan seperti sumber daya manusia, inovasi produk, akses permodalan, perluasan jangkauan pemasaran, peningkatan sarana dan pra sarana fisik dan kerja sama dengan pihak-pihak terkait. dari beberapa hal di atas dapat disimpulkan bahwa kewenangan Pemerintah Kalurahan dalam upaya membantu pengembangan UMKM dapat dilakukan sebagai berikut:

a. Membuat Kebijakan

Pemerintah Kalurahan dapat membuat kebijakan atau peraturan yang di dalamnya memuat kerja sama antara pemerintah Kalurahan, dan pelaku UMKM, kebijakan mengenai perlindungan usaha, perijinan usaha, dan kebijakan dalam pembangunan infrastruktur.

b. Membuat Program

Pemerintah Kalurahan dapat membuat program seperti memberikan bantuan kepada pelaku UMKM dalam berbagai bentuk seperti uang tunai, program kerja sama, pelatihan dalam penggunaan teknologi.

c. Meningkatkan pengembangan sumber daya manusia

Sumber daya manusia yang dimiliki UMKM masih rendah baik dalam hal keterampilan dan pengetahuan. Oleh karena itu pemerintah harus membuat melakukan pembinaan, diklat, pelatihan dan seminar karena pengetahuan dan keterampilan SDM berperan langsung dalam usaha tersebut.

d. Meningkatkan pengembangan pasar

Dengan adanya pasar bebas dapat memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM. Hal ini Pemerintah dapat mendukung dan menunjang pelaku UMKM dalam melakukan promosi usaha

e. Pengaturan dan perijinan

Pengaturan dan perijinan dapat dilakukan dengan memantau atau turun langsung untuk mengetahui kondisi UMKM yang sesungguhnya sedangkan dalam hal perijinan dapat memberikan kemudahan dalam pengurusan ijin usaha dan pengembangan usaha

f. Kerjasama dan Koordinasi

Dalam hal kerja sama dan koordinasi pemerintah Kalurahan dapat meningkatkan kerja sama atau membangun hubungan dengan sektor akademi, sektor swasta, dan sektor publik dalam membantu pengembangan UMKM.

Berdasarkan beberapa aspek di atas bahwa kewenangan Pemerintah di dalam pengembangan UMKM perlu dilakukan karena, dapat meningkatkan ekonomi lokal dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat. Dengan adanya pengembangan UMKM yang baik dapat menciptakan lapangan pekerjaan, mengurangi pengangguran dengan begitu tingkat pendapatan masyarakat

meningkat, penguatan identitas lokal dengan mendukung UMKM memanfaatkan bahan baku lokal dapat membantu melestarikan budaya dan identitas daerah dengan produk-produk khas yang dihasilkan. Dengan begitu pelaku UMKM dapat menghadapi persaingan ekonomi secara luas, dengan upaya dan dukungan dari pemerintah seperti pelatihan keterampilan, meningkatkan daya saing produk, kerja sama dengan pihak-pihak terkait, akses modal dan akses pasar.

## **H. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian deskriptif adalah penelitian yang berusaha menggambarkan fenomena yang terjadi secara nyata berdasarkan temuan-temuan di lapangan seperti kata-kata, atau lisan dari orang-orang atau perilaku yang diamati. Menurut Suharsimi Arikunto (2003:3) menjelaskan penelitian deskriptif merupakan penelitian untuk menyelidiki keadaan, kondisi atau hal-hal lainnya yang kemudian dijabarkan kedalam laporan penelitian.

### **2. Unit Analisis**

Objek pada penelitian ini adalah sebuah pengamatan yang dilakukan terhadap kegiatan yang terjadi di sekitar kemudian akan diolah menjadi informasi berupa data penelitian. Menurut Supriati (2012:38) objek penelitian merupakan permasalahan yang akan diteliti atau diriset oleh peneliti yang akan dilakukan di tempat penelitian. Maka objek pada penelitian ini adalah:

Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul Daerah Istimewa Yogyakarta.

### **3. Subjek Penelitian**

Subjek penelitian adalah orang, organisasi atau barang yang dijadikan narasumber atau informan dalam memberikan informasi mengenai topik pada penelitian. Narasumber atau informan dalam penelitian ini bertujuan untuk mengetahui serta menentukan sejauh mana pengembangan UMKM oleh Pemerintah.

Penentuan narasumber di dalam penelitian ini menggunakan teknik *purposive*. Konsep tentang *purposive* menurut Notoatmodjo (2018) yaitu informan dipilih berdasarkan suatu pertimbangan yang dibuat oleh peneliti sendiri. Hal ini berarti peneliti memilih individu-individu dan tempat yang sudah diteliti karena secara spesifik mereka secara spesifik memberi pemahaman mengenai problem fenomena dalam studi tersebut.

Informan merupakan orang yang mampu memberikan informasi tentang hal yang ingin diketahui penulis. Informan adalah orang yang mengetahui tentang kasus yang sedang diteliti atau orang yang terlibat langsung dengan permasalahan yang hendak diteliti. Adapun informan dalam penelitian ini antara lain:

**Tabel 1. 1 Deskriptif Informan**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan
1	Wahyudi Anggoro Hadi, S. Farm., Apt,	S1	Mantan Lurah
2	Ari Suryanto, S.E.,	S1	Lurah
3	Yuli Trisniati, S.H.	S1	Carik
4	Agung Prananto	SMA	Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu)
5	Drs. Abdul Razak, M.Pd	S2	Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kalurahan (LPMKal)
6	Ahamd Arief Rohamn	SI	Koordinator Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa)
7	Siti Aisyah	S1	Koordinator Rumah Produksi
8	Dwi Hening	S1	Pelaku UMKM
9	Ani	SMP	Pelaku UMKM
10	Amin	SD	Pelaku UMKM
11	Martina	SD	Pelaku UMKM
12	Daniman	SMP	Pelaku UMKM

*Sumber Data: Hasil Wawancara Peneliti*

Dalam hal ini peneliti melakukan wawancara dengan berbagai elemen masyarakat yang sudah ditentukan oleh peneliti (*purposive sampling*) yang mempunyai keterkaitan dengan objek penelitian mulai dari Pemerintah Kalurahan, BUMKal, RPK dan pelaku UMKM.

#### **4. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data merupakan bagian yang penting dalam penelitian yang digunakan untuk mengumpulkan data dengan prosedur yang berlaku agar data yang dihasilkan akurat sesuai dengan yang terjadi di lapangan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode observasi,

wawancara, dan dokumentasi (Burhan Bungin 2007:110), yang didefinisikan sebagai berikut:

a. Observasi

Metode observasi atau pengamatan adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan peneliti berdasarkan kegiatan keseharian dengan menggunakan pancaindra mata sebagai alat bantu utama untuk memahami objek dan fokus penelitian dalam lapangan penelitian atas kejadian atau fenomena lapangan seperti aktivitas pelaku usaha, aktivitas pemangku kepentingan dan kebijakan, masyarakat umum, serta sasaran produk-produk yang dikembangkan oleh pelaku usaha kecil dan menengah. Dalam penelitian ini yang dikumpulkan peneliti adalah data primer dan data sekunder. Dalam melakukan observasi, peneliti melakukan observasi langsung dimana peneliti melihat objek untuk diselidikinya seperti melihat fasilitas dari pemerintah kalurahan terhadap pelaku UMKM, dan kebijakan pemerintah. Dalam proses pemerolehan data informasi, peneliti mendapatkannya dari tangan pertama maupun secara tidak langsung. Semua proses ini pertamanya dilakukan dengan pengamatan dan dalam proses observasi berjalan dengan lancar. Dalam menjalankan observasi, peneliti melakukan satu kali obsevasi.

b. Wawancara

Metode wawancara adalah proses memperoleh keterangan untuk tujuan penelitian dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara

pewawancara dan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa pedoman wawancara.

Adapun empat proses yang dilakukan oleh peneliti:

- 1) Diawali dengan memperkenalkan identitas peneliti
- 2) Menulis identitas narasumber
- 3) Mengeksplorasi pertanyaan peneliti lebih luas
- 4) Mempersiapkan alat rekam

Melakukan wawancara dengan 12 narasumber. Peneliti melakukan wawancara dengan pedoman wawancara dan wawancara berjalan dengan lancar.

c. Dokumentasi

Metode dokumentasi adalah salah satu metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian sosial. Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk surat-surat, catatan harian, laporan dan sebagainya. Dalam metode ini, pengumpulan data akan dilakukan dengan menelusuri data historis Kalurahan seperti dokumen sejarah berdirinya Kalurahan Panggungharjo Rencana Pembangunan Jangka Panjang Desa (RPJM Desa), Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa), Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB Desa), Peraturan Desa, dan dokumen lain yang berkaitan dengan masalah penelitian seperti jumlah UMKM Kalurahan.

## 5. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data adalah sebuah rangkaian kegiatan yang dilakukan peneliti untuk memperoleh data berdasarkan permasalahan atau pernyataan yang

ada di lapangan kemudian peneliti menelaah, penafsiran, pengelompokan dan verifikasi data agar permasalahan tersebut memiliki sebuah nilai sosial, ilmiah dan akademisi.

Menurut Bodgan dalam Zakariah dkk, (2020:52) teknik analis data merupakan proses mencari data, menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh melalui hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan cara mengelompokan data ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting untuk dipelajari dan membuat kesimpulan yang bisa di mengerti oleh diri sendiri atau orang lain. Pada tahap analisis kualitatif ini peneliti menggunakan beberapa tahap yaitu:

a. Pengumpulan Data

Dalam penelitian ini, pengumpulan data dilakukan dengan teknik wawancara, observasi, dan dokumentasi. Pada tahap ini, pengumpulan data sesuai dengan fokus penelitian, dimana di dalam hal ini peneliti langsung berinteraksi dengan semua informan yang menjadi subjek dalam penelitian.

b. Reduksi Data

Mereduksi data yaitu merangkum, memilih, dan melihat hal-hal pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya.

### c. Penyajian Data

Pada tahap ini, peneliti menyajikan data yang telah dipilih dan dikelompokkan secara sistematis dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sejenisnya. Kemudian dalam penyajian data kualitatif ini adalah dengan teks yang bersifat naratif. Penyajian data ini, bertujuan untuk mempermudah dalam mengkonstruksikan dan menyimpulkan data-data yang telah dipilih tersebut.

## **BAB II**

### **PROFIL KALURAHAN PANGGUNGHARJO**

#### **A. Selayang Pandang Kalurahan Panggunharjo**

Kalurahan Panggunharjo adalah gabungan dari tiga Kalurahan yaitu Kalurahan Cabayan, Kalurahan Prancak, dan Kalurahan Krapyak. Keberadaan Kalurahan Panggunharjo tidak dapat dipisahkan dari keberadaan “Panggung Krapyak” atau masyarakat sekitar sering menyebut sebagai “Kandang Menjangan” yang berada di Padukuhan Krapyak Kulon, Kalurahan Panggunharjo. Panggung Krapayak ini adalah salah satu elemen dari “Sumbu Imaginer” yang membelah Kota Yogyakarta yaitu garis Gunung Merapi-Tugu, Pal Putih-Kraton Ngayogyokarto, Hadiningrat-Panggung Krapayak dan Parangkusumo yang keberadaanya di pantai selatan.

Kalurahan Panggunharjo dibentuk atas Keputusan Dewan Pemerintah Daerah Yogyakarta Nomor 148/D.Pem.D/OP pada 23 September 1947. Bersamaan dengan Keputusan Dewan Pemerintah tersebut, Hardjo Sumarto diangkat sebagai Lurah yang pertama di Kalurahan Panggunharjo. Berdasarkan fakta dan bukti sejarah akar budaya di Kalurahan Panggunharjo tumbuh dan berkembang dan dipengaruhi oleh komunitas dan intervensi budaya yang berkembang pada masanya yaitu dapat dijelaskan sebagai berikut Pertama: Pada abad ke 9-10 Kalurahan Panggunharjo adalah merupakan kawasan agraris, karena hal ini dibuktikan dengan adanya Situs Yoni Karang Gede di Pedukuhan Ngireng-Ireng. Oleh karena itu dari budaya agraris ini munculah budaya seperti: Gejok lesung, Thekthek/Kothek-an, Upacara Merti Dusun, Upacara Wiwitan,

Tingkep Tandur, dan budaya-budaya lainnya yang sifatnya adalah merupakan penghormatan kepada alam yang telah menumbuhkan makanan sehingga bermanfaat bagi keberlangsungan kehidupan umat manusia. Kedua : Pada abad ke 16 wilayah Krapyak Kulon dan Glogo adalah kawasan wisata berburu (Pangeran Sedo Krapyak – 1910) sedangkan pada abad ke 17 kawasan ini merupakan tempat olaragah memanah kijang/menanjang dan sebagai tempat pertahanan (Sultan HB 1- Panggung Krapyak 1760). Budaya yang berkembang karena pengaruh keberadaan Kraton Mataram sebagai pusat menumbuhkan budaya adiluhung seperti: Panembromo, Karawitan, Mocopat, Wayang, Ketoprka, Kerajinan Tatah, Sugging, Kearjinan Blakon, Kerajinan Tenun Lurik, Industri Gamelan, Tarian-tarian Kalsik dan lain-lain.

Ketiga : Pada tahun 1911 di wilayah Krapyak Kulon didirikan Pondok Pesantren AL-Munawir, oleh karena itu berkembanglah budaya seperti: Sholawatan. Dzibaaan, Qoasidah, Hadroh, Rodad, Marawis, dan juga budaya-budaya yang melekat pada kegiatan peribadatan seperti : Suran (peringatan 1 Muharram) Mauludan (peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW), Rejeban (peringatan Isro” Mi”roj”), Ruwuhan/Nyadran (mengirim doa untuk leluhur menjelang bulan Ramadhan), Selikuran (Nuzulul Qur”an), dan lain-lain. Keempat : Pada tahun 1900-1930 berkembanglah budaya karena kebutuhan bersosialisasi di masyarakat, antara lain berkembang bermacam-macam dolanan anak seperti: Egrang, Gobak Sodor, Benthik, Nekeer-an, Umbul Ular/Layang, Wil-wo dan lain-lain. Bahkan di kampung Pandes berkembang sebuah komunitas “Kampung Dolanan” yang mana memproduksi permaninan anak

tempo dulu seperti : Othok-Othok, Kitiran, Angkrek, Keseran, Wayang Kertas dan lain-lain. Dan Kelima : Pada tahun 1980 di Kalurahan Panggungharjo yang adalah merupakan wilayah sub-urban mulai berkembang budaya moderen perkotaan dan banyak mempengaruhi generasi muda sehingga berkembanglah kesenian band, drumband, karnaval takbiran, tari-tarian modern, campur sari, outbond, playstation/game rental dan lain-lain. Selain sejarah dan intervensi budaya yang berada di Kalurahan Panggungharjo yang berkembang dari tahun ke tahun ini karena perubahan sosial, kemajuan teknologi, generasi baru, dan kondisi ekonomi dan politik yang terus berkembang. Oleh karena itu Kalurahan Panggungharjo yang dulunya merupakan gabungan dari 3 Padukuhan sekarang Kalurahan Panggungharjo sudah berkembang menjadi 14 Padukuhan yang terbagi menjadi 118 RT dengan batas wilayah Kalurahan Panggungharjo sebelah Utara yaitu Kotamadya Yogyakarta. Batas sebelah Selatan yaitu Desa Timbulharjo, Kecamatan Sewon. Kemudian batas sebelah Kecamatan Kasihan serta sebelah Timur berbatasan dengan Desa Bangunharjo, Kecamatan Sewon. Berikut ini merupakan nama-nama Padukuhan di Kalurahan Panggungharjo yakni:

- a. Dukuh Garon
- b. Dukuh Cabeyan
- c. Dukuh Ngireng-ngireng
- d. Dukuh Geneng
- e. Dukuh Jaranam
- f. Dukuh Prancak Glondong

- g. Dukuh Pandes
- h. Dukuh Sawit
- i. Dukuh Palemsewu
- j. Dukuh Kweni
- k. Dukuh Dongkelan
- l. Dukuh Glugo
- m. Dukuh Krapyak Kulon
- n. Dukuh Krapyak Wetan

Luas wilayah Kalurahan Panggunharjo yaitu 560,966 Ha. Luas tersebut kemudian terbagi dalam beberapa peruntukan tanah, antara lain:

**Tabel 2. 1 Data Peruntukan Tanah Kalurahan**

No	Data Peruntukan Tanah	Luas (Ha)	Presentase %
1	Jalan	24,2108	43,15
2	Sawah dan Ladang	269,6193	0,04
3	Perumahan	246,2225	438,92
4	Jalur Hijau	6,8525	12,21
5	Perkuburan	7,9200	14,11
6	Lain-lain	6,1409	10,94
Jumlah		560,966	51,937

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggunharjo Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2. 1 di atas dapat diketahui bahwa ada 6 peruntukan tanah yang ada di Kalurahan Panggunharo. Tabel 2. 1 di atas menunjukkan bahwa data peruntukan tanah yang paling luas digunakan adalah untuk sawah dan ladang dengan luas 269, 6193. Hal ini mencerminkan arah pembangunan Kalurahan karena Kalurahan mampu memanfaatkan lahan dengan bijak yang

sesuai dengan potensi lokal dan kebutuhan masyarakat baik untuk ekonomi maupun lingkungan. Hal ini didukung dengan bentuk wilayahnya yang dataran dan curah hujan yang ada di Kalurahan Panggunharjo yaitu 2. 233 mm/tanah dengan suhu udara rata-rata 29 c dengan keadaan iklim yang beriklim tropis dengan dua musim yaitu musim hujan dan musim kemarau serta Kalurahan Panggunharjo terletak pada ketinggian 45 meter dari permukaan laut.

## B. Kondisi Demografi

### 1. Jumlah Penduduk

Pada penelitian ini sesuai dengan data yang diperoleh pada data monografi Kalurahan Panggunharjo tahun 2024 yang mana berdasarkan jumlah penduduknya sebesar 28. 461 jiwa dengan perincianya data penduduk dapat dilihat pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 2 Data Penduduk Kalurahan**

No	Penduduk	Jumlah	Presentase %
1	Laki-laki	14.531	51,055
2	Perempuan	13.930	48,944
	Jumlah	28. 461	100,00

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggunharjo Tahun 2024*

Berdasarkan tabel data di atas jumlah penduduk menurut jenis kelamin laki-laki lebih banyak, yaitu 14. 531 jiwa. Sedangkan jumlah perempuan lebih sedikit yaitu 13.930 jiwa. Jadi dapat disimpulkan bahwa jumlah penduduk laki-laki di Kalurahan Panggunharjo lebih banyak dibandingkan jumlah penduduk perempuan.

## 2. Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan

Dalam meningkatkan kecerdasan masyarakat, pendidikan adalah salah satu faktor yang utama di dalam proses perkembangannya. Pola pikir seseorang dapat dipupuk dengan menempuh pendidikan setinggi mungkin, yang semakin majunya pola pikir seseorang itu dapat diharapkan bisa membantu dan berguna untuk diri sendiri dalam kehidupan maupun di lingkungan sekitarnya. Untuk mengetahui sejauh mana tingkat pendidikan penduduk di Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel berikut :

**Tabel 2. 3 Data Tingkat Pendidikan Kalurahan**

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah	Presentase %
1	TK	3.043	10,69
2	PAUD	548	1,92
3	SD	3.611	12,68
4	SMP	4.098	14,39
5	SMU/SMK	9.524	33,46
6	Akademik (D1-D3)	1.269	4,45
7	Sarjana (S1-S3)	2.362	8,29
8	Pendidikan Khusus	538	1,89
9	Tidak Sekolah	1.325	4,65
10	Belum Sekolah	1.207	4,24
Jumlah		28. 461	100,00

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2.3 diatas menunjukan bahwa tingkat pendidikan di Kalurahan Panggungharjo yang terbanyak yaitu pada tingkat pendidikan SMU/SMK. Hal ini menunjukan bahwa kesadaran akan pendidikan di Kalurahan panggungharjo cukup baik. Di Kalurahan Panggungharjo juga

dikenal sebagai daerah yang memiliki lembaga pendidikan non formal seperti pondok pesantren yang mendorong berdirinya SMU/SMK dan letak lokasi yang strategis sehingga mudah bagi siswa daerah sekitar untuk mengakses.

### 3. Komposisi Penduduk Menurut Agama

Sesuai dengan data monografi Kalurahan Panggungharjo yang berdasarkan jumlah agama penduduknya dikomposisikan pada tabel sebagai berikut:

**Tabel 2. 4 Data Agama Kalurahan**

No	Agama	Jumlah	Presentase %
1	Islam	26.979	94,79
2	Kristen	674	2,36
3	Katholik	699	2,45
4	Hindu	43	0,15
5	Budha	38	0,13
6	Percaya Terhadap Tuhan Yang Maha Esa	28	0,09
Jumlah		28.461	100,00

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2.4 diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat di Kalurahan Panggungharjo memeluk 6 agama dengan mayoritas agama Islam yang penganutnya berjumlah 26. 979 orang dan yang terbanyak kedua adalah Katolik dengan jumlah 699 orang. Meski dengan jumlah penganutnya yang lebih dominan dari agama lain, tetapi tidak pernah terjadi konflik apapun mengenai agama dan tetap hidup rukun berdampingan satu sama yang lain.

### C. Keadaan Ekonomi

Mata pencaharian penduduk sangat menentukan kondisi dan keadaan ekonomi pada suatu desa. Oleh karena itu penting untuk dibahas untuk itu mata pencaharian masyarakat Kalurahan Panggungharjo dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

**Tabel 2. 5 Data Penduduk Berdasarkan Jenis Pekerjaan**

No	Jenis Pekerjaan	Jumlah	Presentase %
1	Pegawai Negeri Sipil (PNS)	675	2,37
2	TNI	109	0,38
3	POLRI	137	0,48
4	Swasta	6.619	23,25
5	Wiraswasta/Pedagang	783	2,75
6	Tani	750	2,63
7	Buruh	6.408	22,51
8	Buruh Tani	219	0,76
9	Pensiunan	338	1,18
10	Jasa	300	1,05
11	Pengangguran	633	2,22
12	Ibu Rumah Tangga	2.372	8,33
13	Nelayan	1	0,00
14	Pemulung	17	0,05
15	Belum bekerja	7.621	26,77
16	Lain - lain	1.341	4,71
Jumlah		28.461	100,00

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggungharjo tahun 2024*

Berdasarkan tabel 2.5 di atas dapat diketahui bahwa yang belum bekerja di Kalurahan Panggungharjo yaitu sebanyak 7.621 ini merupakan sebagian besar pelajar/mahasiswa yang masih menempuh pendidikan.

Kemudian jenis pekerjaan yang paling banyak di Kalurahan Panggungharjo adalah mereka yang bekerja di sektor swasta dengan jumlah 6.619 orang dan jenis pekerjaan terbanyak kedua yaitu buruh dengan jumlah 6.408 hal ini menunjukan bahwa, adanya pergeseran struktur ekonomi dari agraris menuju ekonomi modern. Hal ini karena penduduk tidak hanya bergantung pada sektor pertanian tetapi sektor-sektor lainnya juga, kemudian dikarenakan Kalurahan Panggungharjo menjadi sebagian wilayah pinggiran kota Yogyakarta hal ini yang menyebabkan aktivitas ekonominya yang lebih bervariasi.

#### **D. Kondisi Sosial**

Masyarakat Kalurahan Panggungharjo sampai sekarang masih melestarikan beberapa tradisi yang menjadi keunggulan dan nilai positif dalam terjaganya norma-norma sosial, seperti tradisi gotong-royong, pemberdayaan masyarakat desa yang manfaatnya dapat dirasakan di waktu yang akan datang, dan menjunjung tinggi norma-norma yang berlaku didalam masyarakat. Tingginya akan jiwa sosial di masyarakat dan saling membantu masih menjadi kebiasaan atau tradisi masyarakat Panggungharjo sehingga mendorong persepsi dari para pendatang bahwa sifat warga Kalurahan Panggungharjo sangat ramah dan baik.

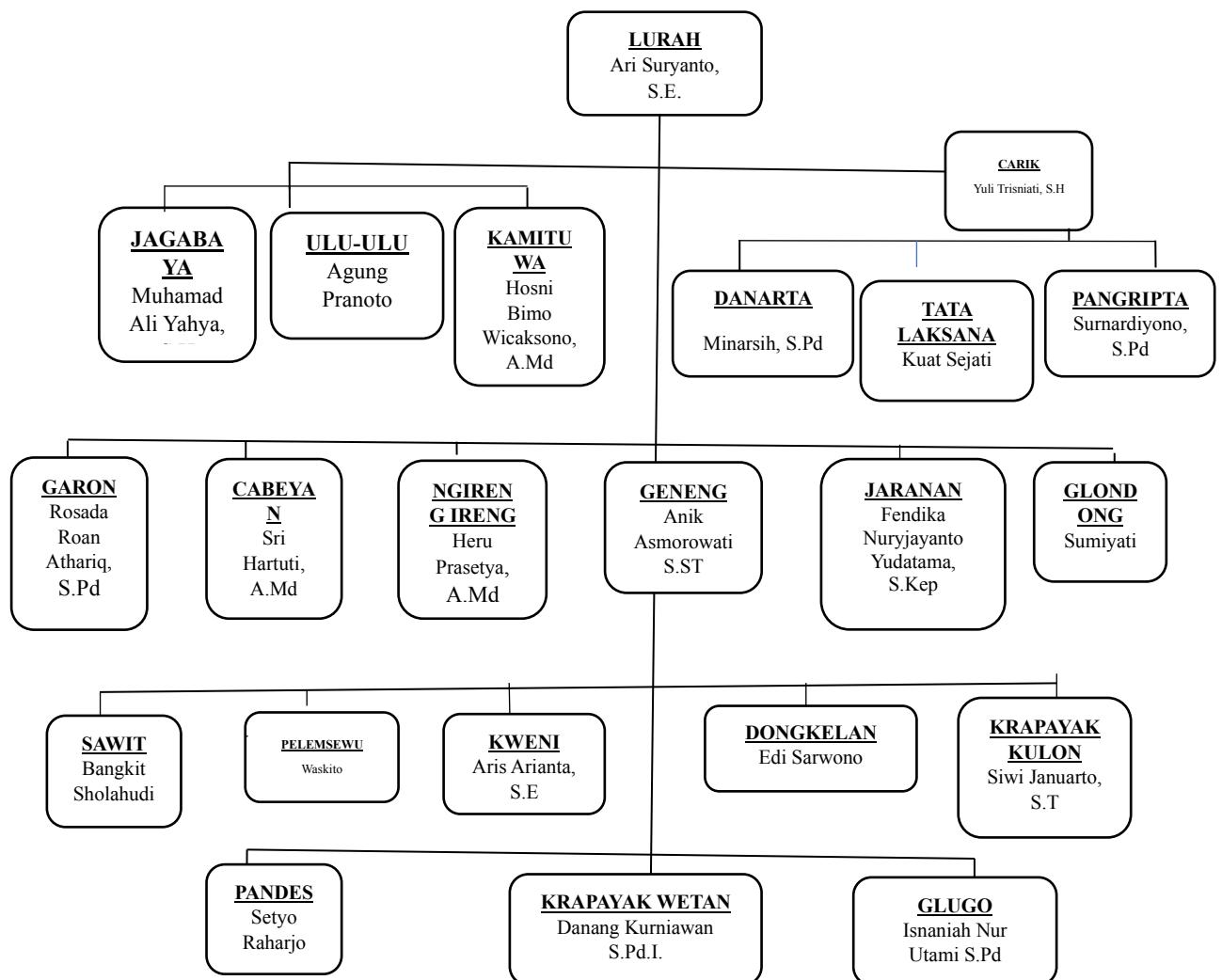
Kondisi sosial di wilayah Kalurahan Panggungharjo memiliki keunikan tersendiri, yakni tidak ada pembatasan sosial yang terjadi di kalangan masyarakat. Terutama antar warga yang miskin dan yang kaya. Hal itu disebabkan karena kuatnya pengaruh dari kondisi sosial masyarakat yang

terjaga, menjadikan keberagaman sosial yang bersifat positif. Selain itu, terdapat keunikan dalam aspek ekonomi masyarakat, yaitu perbedaan mata pencaharian tergantung dari masing-masing wilayah. Pada kawasan pertanian (Kring Selatan) didominasi oleh masyarakat Desa Panggunharjo yang berprofesi sebagai petani, kawasan pusat pemerintahan (Kring Tengah) terdapat beragam profesi yang diambil warga desa, salah satunya sebagai aparatur desa dan petani. Pada kawasan aglomerasi perkotaan (Kring Utara) banyak masyarakat desa yang memilih profesi sebagai pedagang, wirausaha, dan Pegawai Negeri Sipil (PNS). Keberagaman mata pencaharian tersebut, diharapkan tidak menimbulkan adanya klasifikasi atau stratifikasi sosial. Pemerintah desa justru mengharapkan adanya pemberdayaan masyarakat agar saling bekerja sama untuk memajukan Kalurahan Panggunharjo.

#### **E. Pemerintah Kalurahan Panggunharjo**

Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dipimpin oleh Lurah dan dibantu oleh Carik dan lembaga kalurahan. Didalam tugasnya seorang Lurah bertanggung jawab kepada Panewu. Dukuh dibantu oleh carik dan Badan Permusyawaratan Kalurahan (BPK) beserta lembaga-lembaga lainnya didalam menjalankan roda pemerintahan dan pemberdayaan di tingkat kalurahan. Berikut susunan struktur Pemerintah Kalurahan Pangunharjo.

**Gambar 2. 1 Bagan Pemerintah Kalurahan**



Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggunharjo tahun 2024

Pada gambar 2.1 diatas merupakan bagan Pemerintah Kalurahan Panggunharjo, yang dimana melalui bagan tersebut kita bisa tahu tentang tugas, fungsi, dan hubungan kerja dari semua elemen Pemerintah Kalurahan yang ada di Kalurahan Panggunharjo. Struktur diatas menunjukan bahwa Pemerintah Kalurahan Panggunharjo sudah membuat dan mengimplementasikan dengan baik struktur organisasi Kalurahan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang

Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa. Dijelaskan bahwa pemerintah desa adalah Kepala Desa yang dibantu oleh perangkat desa dan menurut Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2019 tentang Pedoman Kelembagaan Urusan Kesitimewaan Pada Pemerintah Kabupaten/Kota dan Desa, dijelaskan juga teknis dan pelaksanaan wilayah berkedudukan sebagai unsur pembantu lurah.

#### F. Lembaga-Lembaga Kalurahan

##### 1. Badan Permusyawaratan Kalurahan

Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggunharjo adalah lembaga perwujudan demokrasi dalam penyelenggaraan dan yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Kalurahan Pangunharjo berdasarkan keterwakilan Wilayah dan ditetapkan secara musyawarah dan mufakat. Berikut tabel struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggunharjo:

**Tabel 2. 6 Struktur Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggunharjo**

No	Nama	Jabatan	Asal Padukuhan
1	Suryono Cahyo Widodo, S.H	Ketua	Pandes
2	Agus Ahmad Basuki	Wakil Ketua	Krapayak Kulon
3	Bambang Prihandana, S.H	Ketua Bidang	Krapayak Wetan
4	Bambang Amintoro	Sekretaris	Pelemsewu
5	Astuti Handayani, S.Pd	Ketua Bidang	Kweni
6	Muhammad Agung Widodo S.E	Anggota	Glondong
7	Agus Subagya	Anggota	Glugo
8	Totok Ismantoro	Anggota	Sawit
9	Triyantono	Anggota	Garon

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggunharjo Tahun 2024*

Tabel 2.6 di atas dapat diketahui bahwa keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan Panggungharjo sudah sejalan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (BPD), yaitu pada pasal 5 ayat 1 dan 2 yang dimana didalam ayat 1 menyebutkan bahwa anggota BPD adalah wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan perempuan yang menisinya dilakukan dengan demokratis melalui proses pemilihan secara musyawarah atau perwakilan.

Penjelasan ayat 1 tersebut diketahui bahwa dalam keanggotaan Badan Permusyawaratan Kalurahan di Kalurahan Panggungharjo sudah demokratis dan kaum perempuan sudah terwakili suaranya. Kemudian pada ayat 2 menyebutkan bahwa jumlah anggota BPD sebagaimana dimaksud pada ayat 1 ditetapkan dengan jumlah gasal paling sedikit 5 orang dan paling banyak 9 orang. Dilihat dari data di atas, jumlah keanggotaan sudah sesuai yaitu dari keanggotaan tersebut jumlah 9 orang selanjutnya tugas dan fungsi BPD adalah untuk membahas dan menyepakati rancangan peraturan desa bersama kepala desa, menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat dan melakukan pengawasan terhadap kinerja kepala desa.

## 2. Karang Taruna

Karang Taruna merupakan wadah pengembangan generasi muda nonpartisan, yang tumbuh atas dasar kesadaran dan rasa tanggung jawab sosial untuk masyarakat khususnya generasi muda di wilayah Desa/Kalurahan yang bergerak di bidang sosial sederajat. Sebagai

organisasi sosial kepemudaan Karang Taruna adalah wadah pembinaan dan pengembangan kegiatan ekonomi produktif dengan pendayagunaan semua potensi yang tersedia baik sumber daya alam maupun sumber daya manusia.

Adapun Karang Taruna di Kalurahan Panggungharjo berikut tabelnya:

**Tabel 2. 7 Karang Taruna Kalurahan Panggungharjo**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Wisnu Arif Wibowo
2	Wakil Ketua	Abmandala Kusuma Negoro
3	Sekretaris 1	Lina Listya
4	Sekretaris 2	Anggraini Setyowati
5	Bendahara 1	Pascalu Mita Sari
6	Bendahara 2	Yesseta Novi Sukma
7	Humas dan Publikasi	Rillo Pambudi
8	Departemen Kerohanian	Imaina Syafira
9	Departemen Kesehatan dan Lingkungan	Dyah Kusumaningrum W
10	Departemen Pendidikan	Herwin Cahya Nugraha
11	Departemen Seni, Budaya, dan Olaraga	Arif Mustikawati
12	Departemen Usaha Ekonomi Produktif	Irfandi Cahyanto

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2024*

Pada Tabel 2.7 di atas dapat dilihat bahwa keanggotaan Karang Taruna di Kalurahan Panggungharjo sudah sejalan dengan PERMEN SOS Nomor 5 Tahun 2019 tentang Karang Taruna pada pasal 18 yang menyebutkan bahwa keanggotaan Karang Taruna menganut sistem stelsel pasif yaitu setiap generasi muda yang berusia 13 (tiga belas) sampai dengan 45 (empat puluh

lima) tahun otomatis menjadi anggota Karang Taruna. Penjelasan ayat 18 tersebut diketahui bahwa dalam keanggotan Karang Taruna rata-rata usianya 11- 45 tahun, sedangkan pengurus adalah berusia mulai 17-35 tahun.

### 3. Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)

PKK adalah organisasi kemasyarakatan untuk memberdayakan perempuan dan berpartisipasi dalam pembangunan kesejahteraan Indonesia. Kelompok PKK adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK desa/kelurahan yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan. Kalurahan Panggungharjo juga memiliki lembaga PKK, berikut tabel struktur PKK Kalurahan Panggungahro:

**Tabel 2. 8 Struktur PKK Kalurahan Panggunharjo**

No	Jabatan	Nama
1	Ketua	Umi Haniah, S. Farm., Apt
2	Wakil Ketua 1	Hj. Zamzamah
3	Wakil Ketua 2	Is Suparinem
4	Wakil Ketua 3	Dra. Nuning Sugiyarti
4	Wakil Ketua 4	Rukimini S, S.Si
5	Sekretaris I	Sugiyarti, S.Pd
6	Sekretaris 2	Nilam Agustin
7	Sekretaris 3	Mursiyah
8	Bendahara I	Sumini
9	Bendahara 2	Wartiningsih
10	Bendahara 3	Murniyati S.Pd
11	Kelompok Kerja I	Tutik Endang Tri Wulan, S.H
12	Kelompok Kerja I	Sri Warsini, S.Kep. Ns, M.Kes

13	Kelompok Kerja 1	Sri Estuningsih
14	Kelompok Kerja 1	Tuminha
15	Kelompok Kerja 1	Sri Martini, S.Pd, Aud
16	Kelompok Kerja 1	Seti Astuti
17	Kelompok Kerja 1	Hj. Siti Fatimah
18	Kelompok Kerja 1	Wijdan Al Arifin
19	Kelompok Kerja 2	Sri Rejeki
20	Kelompok Kerja 2	Tutik
21	Kelompok Kerja 2	Retno Sri Subranti
22	Kelompok Kerja 2	Sukarmi Suyadi
23	Kelompok Kerja 2	Siti Zumaroh
24	Kelompok Kerja 2	Sarjilah Hajam
25	Kelompok Kerja 3	Sri Rohjatini
26	Kelompok Kerja 3	Ani Susilo
27	Kelompok Kerja 3	Mur Sunarti
28	Kelompok Kerja 4	Ansoriyah
29	Kelompok Kerja 4	Wuryanti
30	Kelompok Kerja 4	Sulastri, S.Pd
31	Kelompok Kerja 4	Umi Hanifa
32	Kelompok Kerja 4	Minarsih, S.Pd

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggungharjo Tahun 2024*

Pada tabel 2.8 di atas dapat dilihat bahwa keanggotaan PKK di Kalurahan Panggungharjo sudah sejalan dengan PERMENDAGRI Nomor 36 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga. Dan dari tabel diatas juga dapat diketahui bahwa tingkat kedasaran dan peran perempuan di level mikro sudah baik karena rata-rata didominasi oleh perempuan artinya bahwa perempuan berani mengekspresikan kemampuannya dalam memimpin sebuah organisasi, menjalin relasi dengan

sesama anggota atau diluar anggota, bertukar ide serta berupaya mensukseskan tujuan-tujuan yang telah disepakti.

## **G. Sarana dan Prasarana Kalurahan**

Beberapa faktor yang mempengaruhi kemajuan suatu kalurahan dilihat dari pengadaan sarana dan prasarana. Pembangunan di Kalurahan Panggungharjo sudah amat maju karena memiliki sarana dan prasarana yang memadai, mendukung dan memenuhi kebutuhan seluruh kegiatan masyarakat di Kalurahan Panggungharjo. Beberapa sarana dan prasarana yang dimiliki antara lain:

### **1. Sarana Hunian**

Hunian atau rumah tinggal adalah tempat yang berkenaan dengan kegiatan keluarga serta merupakan bukti fisik adanya sebuah kehidupan dalam suatu daerah atau kawasan. Dalam perkembangannya unit hunian telah memiliki banyak pembagian dalam variabel tertentu seperti permanen, semi permanen, dan rumah non permanen. Kondisi hunian di Kalurahan Panggungharjo didominasi oleh rumah-rumah permanen.

### **2. Gedung Pemerintahan**

Gedung yang berfungsi sebagai roda urusan pemerintahan dan sosial secara terstruktur seperti kantor Kalurahan, balai desa dan lain-lain. Di Kalurahan Panggungharjo, memiliki Kantor Kalurahan dan Balai Kalurahan bertempat dalam satu gedung dan kompleks kantor kalurahan. Dilihat dari efektivitasnya cukup baik karena segala kegiatan berkenaan terkait fungsinya gedung dapat dipantau dan di dalam pengawasan pemerintah kalurahan.

### 3. Sarana Pendidikan

Sarana pendidikan meliputi gedung sekolah dengan tingkat pendidikan dimulai dari PAUD yang berjumlah 14 sarana dengan TK berjumlah 12 buah. Kemudian SD berjumlah 4 buah, SMTA 1 buah, dan Akademik 2 buah. Selain ada sarana untuk pendidikan khusus yang ada di Kalurahan Pangungharjo seperti pondok pesantren terdapat 3 buah, Madrasah 2 buah, kursus menjahit 1 buah dan salon kecantikan 1 buah.

### 4. Sarana Peribadatan

Sarana peribadatan merupakan tempat yang menunjang kegiatan peribadatan dan keagamaan. Secara keseluruhan masyarakat Kalurahan Panggungharjo sebagian besar menganut agama Islam, oleh karena itu dibangunlah masjid di beberapa padukuhan yang berjumlah 30 buah, musholla 60 buah untuk memfasilitasi kegiatan ibadah atau keagamaan.

### 5. Sarana Kesehatan

Sarana kesehatan meliputi gedung atau tempat yang berkenaan dengan kegiatan pengobatan dan kesehatan masyarakat. Di Kalurahan Panggungharjo terdapat rumah sakit umum swasta 2 buah, rumah sakit bersalin 2 buah, poli klinik balai pelayanan masyarakat 1 buah, laboratorium 1 buah, posyandu 22 buah, praktik dokter 10 orang dan apotek 4 buah yang tersebar di Kalurahan Pangungharjo.

### 6. Sarana Perdagangan

Sarana perdagangan meliputi perdagangan dan niaga atau yang berkenaan dengan kegiatan jual beli dan pemasaran terkait produk

perdagangan. Untuk fasilitas di Kalurahan Panggunharjo berupa, pasar lingkungan, toko, pertamini, bengkel, warung, supermarket/swalayan dan kaki lima dalam lingkup usaha mikro kecil dan menengah.

#### 7. Sarana Budaya

Tempat yang berhubungan dengan dengan kegiatan kebudayaan dan adat istiadat. Sarana kebudayaan yang ada di Kalurahan Panggunharjo seperti balai budaya yang mana tempat ini diperuntuk untuk menyimpan gamelan, dan properti lainnya. Balai budaya ini juga digunakan sebagai tempat pertunjukan dan latihan. Tujuan dibangun balai budaya ini adalah sebagai upaya pelestarian, pembinaan dan pengembangan kekayaan potensi seni budaya. Ada kampung mataram dipergunakan untuk tempat pertunjukan dan juga kuliner, kampong dholanan anak diperuntukan untuk pertunjukan dholanan anak-anak dan situs panggung krapayak untuk ruang pamer dan pertunjukan seni.

#### 8. Sarana Ruang Terbuka Hijau

Kalurahan Panggunharjo sendiri terdapat tempat yang diperuntukkan untuk keperluan sosial namun tidak terbangun meliputi pemakaman, taman, lapangan olahraga dan lain-lain. Kalurahan Panggunharjo memiliki lapangan dan tempat pemakaman umum tersebar di beberapa padukuhan. Sarana Terbuka Hijau yang ada di Kalurahan Panggunharjo adalah Lapangan Sepak Bola, Lapangan Volly, lapangan bola basket, lapangan bulu tangkis, lapangan tenis meja, gedung olah raga futsal, gedung futsal, dan Tempat Pemakaman.

## H. UMKM Kalurahan

**Tabel 2. 9 Data Pelaku Usaha Mikro Kalurahan Panggungharjo**

No	Padukuhan	Jenis Usaha	Jumlah
1	Cabeyan	Makanan	8
2	Cabean	Fashion	1
3	Dongkelan	Fashion	2
4	Dongkelan	Makanan	2
5	Dongkelan	Warung Kelontong	3
6	Dongkelan	Budidaya ikan Cupang	1
7	Garon	Makanan	6
8	Glugo	Makanan	7
9	Glugo	Warung Kelontong	2
10	Krapyak Wetan	Makanan	4
11	Krapyak Wetan	Jasa Jahit	1
12	Krapyak Wetan	Fashion	1
13	Krapyak Wetan	Kerajinan Batik	1
14	Krapyak Wetan	Warung Kelontong	2
15	Kwени	Makanan	5
16	Kweni	Warung Makan	2
17	Kweni	Kerajinan Batik	2
18	Kweni	Fashion dan Aksesoris	1
19	Kweni	Laundry	5
20	Kweni	Warung Kelontong	4

21	Pelemsewu	Makanan	3
22	Pandes	Makanan	3
23	Pandes	Warung Makan	1
24	Pandes	Warung Kelontong	2
25	Ngireng-ireng	Kerajinan	1
26	Ngireng-ireng	Makanan	4
27	Ngireng-ireng	Warung Kelontong	2
28	Jaranan	Salon	1
29	Jaranan	Warung Kelontong	5
30	Krapyak Kulon	Warung Kelontong	3
31	Prancak Glondong	Makanan	2
32	Prancak Glondong	Warung Kelontong	2
33	Sawit	Warung Kelontong	2
34	Sawit	Souvenir	1
35	Sawit	Budidaya Ikan Cupang	1
			100

*Sumber : Data Monografi Kalurahan Panggunharjo Tahun 2024*

Dari tabel 2.9 di atas menerangkan banyaknya masyarakat di Kalurahan Panggunharjo yang berprofesi sebagai pelaku UMKM. Untuk jenis-jenis usaha yang ada di Kalurahan Panggunharjo yaitu ada 1) makanan, di bidang makanan ini dapat dikelompokan berdasarkan produk dan layanan yang ditawarkan seperti makanan siap saji (fast food) yang langsung bisa dimakan contohnya kebab,

burger, dan fried chicke. Makanan tradisional contohnya gudeg, pempek, rendang dan kue lapis, bakso, mie ayam. Makanan ringan dan camilan contohnya keripik ubi, keripik pisang, kacang goreng dan cookies. Kue basah dan kue kering contohnya brownies, donat. Aneka minuman contohnya kopi, susu, wedang uwuh, boba tea, es teh, dan jus. Catrieng untuk melayani pesanan makanan dalam jumlah yang besar untuk acara atau hajatan. Makanan beku contohnya nugget, bakso, dimsum. Makanan instan contohnya sambal. 2) Fashion. Dalam bidang ini dikelompokan berdasarkan beberapa jenis produk yang dijual seperti Pakaian ready ini contohnya kaos, kemeja, blouse dan dress. Fashion muslim ini fokus pada pakaian syairat islam contohnya jilbab, gamis, peci, dan baju koko. Aksesoris Fashion ini merupakan pelengkap fashion contohnya kalung, gelang, cincin dan anting. Sepatu dan sandal contohnya heels, sandal kulit dan sneakers. Tas dan dompet contohnya backpac dan totebag. Fashion anak contohnya baju bayi, dress anak dan setelan.

**Gambar 2. 2 Sumber:Dokumen Peneliti (23 Januari 2025)**



Ini adalah beberapa contoh usaha mikro yang ada di Kalurahan Panggungharjo

*Sumber:Dokumen Peneliti (23 Januari 2025)*

3) Warung kelontong merupakan usaha kecil yang menjual semua kebutuhan sehari-hari dengan konsep yang sederhana. Warung-warung ini biasanya ada di pinggiran jalan dan menjadi opsi alternatif yang membantu masyarakat untuk belanja kebutuhan sehari-hari seperti bahan pokok, makanan

dan minuman ringan, kebutuhan rumah tangga, peralatan dapur, pulsa dan token listrik dan barang-barang tambahan. 4) Warung makan merupakan suatu usaha kuliner yang menjual berbagai jenis makanan dan minuman. Warung makan ini seperti warung nasi (warteg), warung makan tradisional, warung sate dan bakso, warung pecel lele dan ayam, warung seafood, warung lesehan dan warung makan kaki lima. 5) Kerajinan batik. Kerajinan batik adalah seni tradisional yang menghasilkan kain bermotif dengan teknik pewarna khusu. Jenis-jenis batik yang ada di Kalurahan Panggungharjo seperti batik tulis, batik cap dan batik kombinasi. 6) Souvenir merupakan usaha yang menjual berbagai jenis cinderamata seperti gantungan kunci, kerajinan tangan lokal dan miniatur patung.

Tetapi didalam menjalankan usahanya masyarakat pelaku UMKM dihadapi dengan permasalahan yang menjadi kendala atau masalah dalam mengembangkan usaha mereka seperti pemasaran dan financial literatcy yang mana menyebabkan tingkat produksi dari beberapa pelaku UMKM bergantung pada tersedia atau tidaknya wadah sebagai tempat pemasaran produk selain itu pemahaman dan keterampilan di dalam pengelolaan keuangan juga belum maksimal yang mana masyarakat pelaku UMKM masih mencampuri kebutuhan primer, sekunder dan tersier sehingga usaha mereka masih stak atau belum berkembang karena seringkali kebutuhan tersier selalu diutamakan dari pada kebutuhan sekunder dan primer.

Dalam usaha pengembangan UMKM yang terdapat di Kalurahan Panggungharjo, pihak pemerintah Kalurahan Panggungharjo telah membuat

salah satu program mereka yaitu mengadakan Rumah Produksi Komunitas yang mana didalam Rumah Produksi Komunitas ini pelaku UMKM dapat memasarkan produk-produk mereka tetapi untuk masuk didalam Rumah Produksi Komunitas tidak semua pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Panggungharjo tetapi diseleksi dalam artian dilakukan uji tes produknya.

## **BAB III**

### **ANALISIS DATA**

Proses analisis data dimulai dengan mengklasifikasi seluruh data yang telah tersedia dari berbagai sumber yaitu pengamatan, wawancara yang sudah dituliskan di dalam catatan lapangan, dokumen pribadi, foto, gambar dan lain sebagainya. Berdasarkan hal tersebut dikemukakan bahwa analisis data adalah proses memilih dan menyamakan mana yang penting dan tidak penting, mencari dan menyusun secara sistematis data yang telah diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan dan dokumentasi dengan mengorganisasikan data ke dalam kategori dan membuat kesimpulan agar dapat dimengerti.

Analisis data dari hasil penelitian merupakan jawaban atas pertanyaan yang diajukan didalam mengidentifikasi masalah yang disajikan dalam bentuk analisis atas data yang telah diperoleh dan dikumpulkan dari lapangan dengan menggunakan data yang berasal dari pengamatan, dokumentasi dan wawancara. Dalam penelitian ini peneliti akan menganalisis data primer berupa data yang diperoleh dari wawancara secara langsung dengan informan. Dari data-data yang telah diperoleh hendaknya bisa menjawab pertanyaan mengenai Bagaimana Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo, Kabupaten Bantul.

Pemilihan narasumber didalam penelitian ini difokuskan pada orang-orang yang diharapkan dapat memberikan informasi dan data yang dibutuhkan agar sesuai dengan tujuan dari pelaksanaan penelitian ini. Jumlah informan

didalam penelitian ini 8 orang, yang terdiri dari Lurah 1 orang, Carik 1 oarang, Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu) 1 orang, Mantan Badan Permusyawaratan Kalurahan 1 orang, Ketua Lembaga Pemebrdayaan Masyarakat Kalurahan 1 orang, KoordinatorBadan Usaha Milik Desa 1 orang, Koordinator Rumah Produksi 1 orang dan Pelaku UMKM 5 orang.

Tujuan dari analisis ini adalah agar dapat menyederhanakan data ke dalam bentuk yang mudah dipahamai dan hasil penelitian ini kiranya dapat menjadi salah satu bahan informasi dan masukan untuk pengembangan UMKM di Kalurahan Panggunharjo.

#### **A. Analisis Upaya Pengembangan UMKM**

Pengembangan UMKM merupakan upaya untuk meningkatkan daya saing, kapasitas dan keberlanjutan usaha agar bisa tumbuh dan berkontribusi lebih besar terhadap perekonomian. Di dalam pengembangan UMKM ada beberapa hal yang perlu dikembangkan seperti peningkatan kualitas sumber daya manusia, peningkatakan kualitas produk, meningkatkan inovasi-inovasi baru, pengadaan sarana dan prasana produksi, peningkatakan design dan teknologi serta pemasaran. Beberapa hal tersebut perlu dikembangakn agar UMKM di suatu wilayah dapat berkembang dalam menciptakan usaha dan peluang. Pemerintah Kalurahan Panggunharjo telah membuat program mengenai UMKM yaitu dengan mengadakan Rumah Produksi Komunitas (RPK). RPK Panggunharjo merupakan sebuah tempat produksi pangan olahan yang dibangun atas dukungan CSR PT Penggadain dan fasilitas Dana Keistimewaan.

RPK ini menjadi sebuah solusi guna memberikan fasilitas produksi kepada UMKM di Kalurahan Panggunharjo yang belum mempunyai tempat produksi berstandar dan RPK ini dapat memfasilitasi, memberi edukasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM. Pemerintah Kabupaten Bantul telah menerbitkan kebijakan yang mengatur terkait UMKM yaitu Peraturan Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha. Berikut adalah hasil wawancara mengenai upaya pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan:

### **1. Peraturan mengenai UMKM**

Peraturan mengenai UMKM memberikan landasan hukum dan pedoman dalam mendukung serta mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah di tingkat desa atau kalurahan. Dengan adanya peraturan ini, pemerintah kalurahan dapat memberikan bantuan yang lebih terarah, seperti pelatihan, akses modal, serta penguatan pemasaran produk lokal. Maka di lakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Pangguharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk peraturan tentang UMKM ada tertera di RKPDes Panggunharjo dan diatur juga di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa nomor 5 Tahun 2020 dan di atur juga di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 6 Tahun 2019 ini dapat membantu pelaku UMKM dalam hal perizinan, perlindungan usaha, dan inovasi produk karena dengan adanya kebijakan yang jelas maka UMKM bisa lebih berkembang” (wawancara pada tanggal 14 Januarai 2025)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa dari segi inovasi produk, kebijakan yang telah disusun dalam RKPDes dan RPJMDes mendorong pelaku

UMKM untuk terus meningkatkan kualitas dan daya saing produk mereka. Dengan adanya peraturan tersebut maka dapat menjangaku dan mendukung pelaku usaha kecil di berbagai aspek, seperti permodalan, pelatihan, pemasaran, hingga perlindungan usaha. Peraturan ini memastikan bahwa setiap pelaku UMKM, baik yang baru memulai maupun yang sudah berkembang, mendapatkan kesempatan yang sama untuk tumbuh dan bersaing di pasar yang lebih luas. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya memang ada peraturan Kalurahan mengenai pengembangan UMKM dan di dukung juga dengan program-program yang ada tetapi pelaku UMKM sendiri ada yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan ada yang belum mengetahui informasi tersebut. Kesimpulannya adanya peraturan desa tentang pengembangan UMKM yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam mengembangkan UMKM.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Bapak Ari Suryanto selaku lurah Panggunharjo berikut hasil wawancara :

“Seperti yang dikatakan mantan lurah Panggunharjo bapak Wahyudi bahwasanya adanya peraturan yang mendukung pengembangan UMKM yang diatur di dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa nomor 5 Tahun 2020 dan di atur juga di dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Nomor 6 Tahun 2019 yang mana kami mengupayakan agar UMKM di Panggunharjo tetap berkembang dengan lebih baik dan memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan Bapak selaku Ari Suryanto Lurah di atas, peneliti dapat menganalisis bahwa mantan Lurah Panggunharjo, Bapak Wahyudi, menjelaskan bahwa pengembangan UMKM di desa didukung oleh peraturan yang jelas peraturan tersebut tertuang dalam Rencana Kerja

Pemerintah Desa (RKPDes) Nomor 5 Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMD) dalam peraturan desa Nomor 6 Tahun 2019. Melalui peraturan ini, pemerintah Kalurahan berusaha memastikan bahwa UMKM di Panggunharjo bisa terus berkembang dengan lebih baik. Berdasarkan gambar dokumen peneliti di bawah bahwasanya memang ada peraturan desa tentang rencana kerja apemerintah desa tahun 2020 yang mana pada bab II poin tiga tentang sumber daya pembangunan desa yang Desa menjelaskan bahwa Pembangunan masyarakat desa diharapkan bersumber pada kemandirian, perkembangan pembangunan harus berdampak pada perubahan sosial, ekonomi dan budaya yang seimbang agar dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat desa menjadi lebih baik.

**Gambar 3. 1 Rencana Kerja Pemerintah Desa**



*Sumber :Website Kalurahan Panggunharjo 27/12/2024*

Dukungan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha dalam meningkatkan kualitas produk, memperluas pemasaran, serta memberikan dampak positif bagi perekonomian masyarakat. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya memang ada peraturan Kalurahan mengenai pengembangan UMKM dan di dukung juga dengan program-program yang ada

tetapi pelaku UMKM sendiri ada yang memanfaatkan kesempatan tersebut dan ada yang belum mengetahui informasi tersebut. Kesimpulanya adanya peraturan desa tentang pengembangan UMKM yang di buat oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam mengembangkan UMKM dengan tujuan bahwa UMKM memiliki kesempatan yang lebih besar untuk maju dan bersaing di pasar yang lebih luas.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa Peraturan Kalurahan terkait pengembangan UMKM di Panggunharjo telah diatur dalam Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKPDes) Nomor 5 Tahun 2020 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJMDes) Nomor 6 Tahun 2019. Pemerintah Kalurahan berupaya memastikan agar UMKM di Panggunharjo terus berkembang dengan lebih baik melalui berbagai program yang mendukung peningkatan kualitas produk, penguatan pemasaran, serta memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat. Melalui peraturan dan program yang telah disusun, pemerintah Kalurahan berusaha memberikan fasilitas serta pendampingan bagi pelaku UMKM agar mereka bisa bersaing di pasar yang lebih luas. Bantuan tersebut bisa berupa pelatihan keterampilan, pendampingan digitalisasi usaha, akses modal, hingga pemasaran melalui berbagai platform. Namun di dalam pelaksanaannya, tidak semua pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo mendapatkan bantuan tersebut karena hanya sebagian pelaku UMKM termasuk yang bergabung di Rumah Produksi Komunitas yang pelaku UMKMnya terus berkembang karena mendapatkan dukungan dan bantuan sedangkan pelaku UMKM yang tidak

bergabung di RPK ini tidak mengalami perkembangan karena kekurangan pelatihan dan dampingan dari pemerintah Kalurahan. Oleh karena itu perlunya evaluasi terkait kebijakan tersebut agar kebijakan yang di hasilkan dapat membantu pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Panggunharjo agar terus berkembang.

## **2. Program pemerintah dalam pengembangan UMKM**

Untuk mengetahui program yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam upaya untuk mengembangkan UMKM maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Pangguharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi salah satu program saya melalui BUM Desa kemarin yaitu mengadakan Rumah Produksi Komunitas sebagai upaya untuk melakukan pengembangan bagi para pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Panggunharjo. Karena kami melihat bahwa banyak pelaku UMKM yang ada di Panggunharjo tetapi tidak memiliki izin edar, dan belum mempunyai tempat produksi berstandar. Oleh karena itu pemerintah berinisiatif dengan dibawah naungan BUM Desa membuat program ini dengan harapan bahwa UMKM di Panggunharjo terus berkembang” (wawancara pada tanggal 14 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan mantan Lurah diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa salah satu program yang dibuat untuk mendukung pengembangan UMKM adalah dengan adanya Rumah Produksi Komunitas yang dibangun pada tahun 2021. Harapanya RPK ini dapat membantu para pelaku UMKM baik yang masih dalam fase tumbuh, fase menguatkan dan fase berkembang. Hal ini menjadi sangat penting karena menjadi perhatian pemerintah Kalurahan agar dapat memahami lebih jauh terkait persoalan-persoalan yang dihadapi oleh pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo agar

dengan adanya program tersebut para pelaku UMKM tetap tumbuh dan berkembang.

**Gambar 3. 2 Rumah Produksi Komunitas**



*Sumber : Dokumen peneliti, 27/12/2024*

Dari dokumen peneliti diatas juga, peneliti menganalisis bahwa gambar diatas merupakan Rumah Produksi Komunitas yang ada di Kalurahan Panggungharjo itu merupakan bukti nyata dari program yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan dalam mendukung pengembangan UMKM yang ada di Panggungharjo. Berdasarkan pengamatan peneliti juga bahwasanya adanya program pemerintah Kalurahan tersebut dalam wujud nyata yang mana di dalam RPK ini terdapat peralatan-peralatan yang mendukung produksi UMKM tentunya yang halal, bersih dan sehat. Kemudian di dalam RPK juga terdapat ruangan yang khusus untuk tempat produksi dan show room untuk pusat pemasaran. Kesimpulanya bahwasanya pemerintah Kalurahan Panggungharjo sudah berinisiatif membuat program mengenai pengembangan UMKM yang dibawah naungan BUMDes yang dimana berawal dari banyaknya para pelaku UMKM yang tidak memiliki ijin usaha dan tempat layak untuk produksi yang

kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak seperti BUMKal, CSR PT Penggadaian dalam mendukung keberadaan UMKM di Panggungharjo.

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Ari Suryanto selaku lurah Panggungharjo berikut hasil wawancara :

“Untuk pengembangan UMKM ini, kami mempunyai program yang dulunya di buat oleh mantan lurah Bapak Wahyudi yang saya lanjutkan sekarang. Programnya yaitu namanya Rumah Produksi Komunitas, selain itu dalam upaya pengembangan UMKM kami menyediakan fasilitas seperti pasar online, yang mana para pelaku UMK bisa memasarkan produk mereka lewat platform digital bernama Pasardesa.id yang diluncurkan pada tahun 2020 hingga sekarang” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan Lurah diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa UMKM pemerintah Kalurahan Panggungharjo telah melakukan upaya untuk pengembangan UMKM melalui program yang tentunya seperti yang dijelaskan oleh mantan lurah bahwasanya ada program yang akan dilanjutkan oleh lurah yang sekarang yaitu RPK. Kemudian ada platform digital bernama pasar.id yang diluncurkan sekitar empat tahun lalu, dengan tujuan untuk memasarkan produk-produk dari tokoh dan produksi masyarakat setempat.

**Gambar 3. 3 Pasar Online**



**Pasar Online  
Panggungharjo >**

Grup Publik · 672 anggota



*Sumber : Website Kalurahan Panggungharjo 27/12/2024*

Berdasarkan gambar dokumen peneliti disamping dapat dilihat bahwa memang benar adanya platform digital pemasaran yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan. Didalamnya berisi promosi produk-produk UMKM yang diunggah, tentunya memudahkan pelaku UMKM untuk pemasaran.

Berdasarkan pengamatan peneliti melihat juga bahwa paltform digital tersebut masih aktif digunakan untuk pemasaran online bagi pelaku-pelaku UMKM. Kesimpulanya upaya pemerintah Kalurahan Panggunharjo didalam mengembangkan UMKM selain adanya RPK yang memfasilitasi dan mendampingi ada juga platform digital pasar.id yang membantu pelaku UMKM didalam pemasaran.

Hal yang serupa disampaikan oleh Ibu Yuli Trisniati selaku Carik berikut hasil wawancaranya :

“Program yang di buat oleh pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan UMKM di Kalurahan Panggunharjo itu seperti adanya Rumah Produksi Komunitas Panggunharjo. UMKM juga dibangun atas dukungan atau kerja sama dengan CSR PT Penggadaian, dan fasilitasi Dana Keistimewaan. Yang kemudian kami anggarkan di dalam APBKal yang dipergunakan untuk belanja kebutuhan dan keperluan UMKM di Panggunharjo”. (wawancara pada tanggal 6 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan ibu Carik di atas peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah Kalurahan Panggunharjo sudah membuat salah satu program untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan yaitu RPK. Yang mana disana para pelaku UMKM bisa menjual hasil produk mereka dan sebagai tempat produksi serta mengadakan pelatihan-pelatihan, dan pembinaan untuk meningkatkan kualitas produk mereka. Pemerintah juga menganggarkan

dana dari Dana Keistimewaan untuk pelatihan dan pembinaan kepada pelaku UMKM.

**Gambar 3. 4 APBKal**

URUAN	SARANA		ANGGARAN RPK (BANTUAN)	ANGGARAN PPI (BANTUAN)
	JUMLAH	ANGGARAN RPK		
Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
Pengembangan Sarana Prasarana Usaha Mikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	1.000.000,00		1.000.000,00	1.000.000,00
Belanja Barang dan Jasa	9.331.000,00		0,00	0,00
Belanja Barang dan Jasa yang Diberikan ke Pemerintah	9.331.000,00		9.331.000,00	0,00
	0,00		11.331.000,00	0,00

Sumber : Dokumen peneliti, 06/01/2025

Anggaran tersebut hampir setiap tahun dianggarkan dengan harapan agar dapat meningkatkan pendapatan perkapita pelaku UMKM yang ada di Panggunharjo. Dari dokumen peneliti diatas juga peneliti dapat menganalisis bahwa gambar tersebut merupakan anggaran APBKal Panggunharjo tahun 2024 yang dianggarkan untuk belanja di Bidang Pengembangan Sarana dan Prasarana Koperasi, UMKM dan berdasarkan pengamatan peneliti bahwa adanya anggran yang sudah dianggrakan untuk pelaku UMKM dan itu terlihat dengan adanya RPK ini tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan bantuan dari anggarannya tersebut. Kesimpulanya bahwa pemerintah Kalurahan Panggunharjo sudah menganggarkan dana untuk pelaku UMKM dibantu juga oleh CSR PT penggadaian dan fasilitasi Dana Keistimewaan tetapi anggaran tersebut belum disalurkan secara keseluruhan

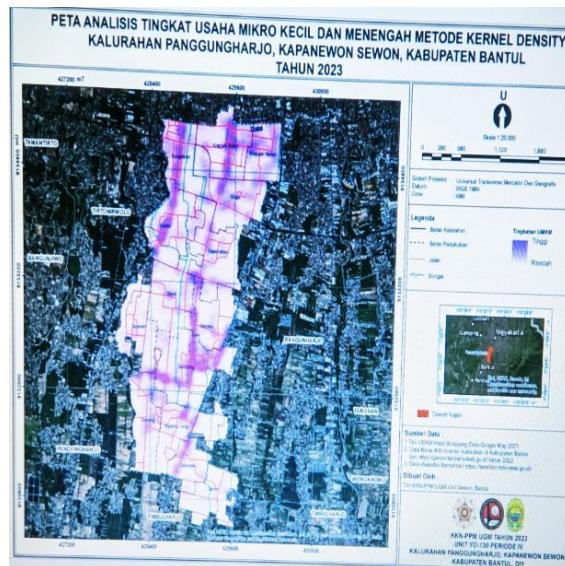
karena masih ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang belum mendapatkan bantuan anggaran tersebut.

Menurut Bapak Abdul Razak selaku Ketua Lembaga Pemberdayaan Kalurahan berikut hasil wawancaranya :

“Baik jadi sebelum covid-19 kami sudah mengembangkan UMKM lewat yang namanya UP2K (Usaha Peningkatakn Pendapatan Keluarga) yang difasilitasi oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta. Setelah covid, munculah Rumah Produksi Komunitas. Selain itu adanya peta penyebarana UMKM yang menampilkan lokasi-lokasi UMKM yang tersebar di Panggunharjo dengan tujuan agar membantu pengunjung agar dengan mudah dapat mengetahui lokasi persebaran UMKM tersebut”. (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat diatas, peneliti dapat menganalisis bahwa sebelum adanya covid-19 pemerintah Kalurahan Panggunharjo juga sudah mengembangkan UMKM salah satunya dengan UP2K. Setelah itu pemerintah Kalurahan membuat program Rumah Produksi Komunitas, kemudian ada peta penyebaran UMKM yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan di dalam membantu masyarakat dan para pengunjung untuk bisa mengetahui penyebarana usaha lokal di Panggunharjo. Berdasarkan gambar dokumen peneliti disamping bahwasanya ada peta penyebaran informasi keberadaan UMKM yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan di dalam membantu UMKM untuk mengembangkan usaha mereka agar dapat di kenal. Kemudian menurut pengamatan peneliti melihat bahwasanya peta penyebarana tersebut dapat diakses di maps, yang mana sangat mudah dan cepat. Jadi untuk para pengunjung yang datang ke Panggunharjo tidak susah untuk mencari keberadaan pelaku UMKM cukup melihat di maps.

**Gambar 3. 5 Peta Analisis Penyebaran UMKM**



Sumber : Website Kalurahan Panggungharjo 06/01/2025

UMKM tersebut dipetakan menggunakan *metode Kernel Density*, metode ini adalah metode statistik non-parametrik yang dapat digunakan untuk mengetahui tingkat kerapatan titik dengan jarak. Jadi semakin tua warna ungu didalam bidang wilayah Panggungharjo maka, semakin banyak titik UMKM yang ada di wilayah tersebut begitu juga sebaliknya. Jika semakin muda warna ungu dalam bidang wilayah Panggungharjo maka semakin sedikit titik atau lokasi UMKM di daerah tersebut. Kesimpulanya pemerintah sudah membuat program terkait pengembangan UMKM selain RPK ada juga yang namanya peta penyebaran informasi UMKM yang ada di Panggungharjo yang menggunakan *metode Kernel Density* yang mana semakin tua warna ungu di dalam wilayah Panggungharjo maka, semakin banyak titik UMKM yang ada di wilayah tersebut begitu juga sebaliknya. Jika semakin muda warna ungu dalam wilayah Panggungharjo maka semakin sedikit titik atau lokasi UMKM di daerah tersebut. Jadi dengan adanya peta penyebaran informasi tersebut dapat membantu

pengembangan dan pemberdayaan UMKM di Panggunharjo, dan memudahkan akses untuk konsumen.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Kalau menurut pengetahuan saya bahwa adanya program yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam mendukung para pelaku UMKM adalah adanya Rumah Produksi Komunitas yang saya sendiri juga termasuk anggotanya mba. Jadi disana kami difasilitasi dalam hal produksi dan diberikan latihan-latihan dalam pengembangan usaha kami”. (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama ibu Dwi Hening diatas peneliti dapat menganalisis bahwa pihak Kalurahan Panggunharjo disini sudah membuat program untuk mendukung pengembangan UMKM yaitu RPK. Di RPK ini pelaku-pelaku UMKM di fasilitasi dalam pelatihan, permodalan, pemasaran dan izin edar. Adanya RPK ini para pelaku UMKM mendapatkan ilmu yang banyak dan secara langsung wawasan mereka terkait usaha mereka berkembang. Menurut pengamatan peneliti melihat bahwasanya program tersebut ada dan masih berjalan sampai sekarang yang mana dapat membantu pelaku UMKM di Panggunharjo. Kesimpulanya pemerintah Kalurahan telah mendukung para pelaku UMKM dengan program yang ada.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Ada program yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan didalam membantu pengembangan UMKM, tetapi saya kurang tau mba. Yang saya tau itu hanya adanya Rumah Produksi Komunitas tetapi saya pribadi saya tidak ikut terlibat disana karena menurut saya kan sudah tua. Saya waktu tahun 2021 pernah ikut pameran di Kalurahan tetapi tidak laku dari situ saya mulai tidak ikut sampai sekarang saya memilih menjualnya sendiri.” (wawancara 26 Desember 2024)

Hasil wawancara dengan ibu Amin diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa program pemerintah mengenai pengembangan UMKM di Kalurahan Panggunharjo memang sudah ada. Tetapi ada beberapa pelaku UMKM yang tidak ikut terlibat karena masalah umur. Kemudian karena tidak mendapatkan hasil penjualnya sehingga pelaku UMKM tidak ingin bergabung lagi dan memutuskan untuk tidak lagi mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah, dan memilih untuk memasarkan produknya sendiri secara mandiri. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat bahwasanya pelaku UMKM yang tidak bergabung di RPK ini, memilih untuk usaha mandiri oleh karena itu kurangnya pelatihan dan pendampingan sehingga ketika produknya tidak laku mereka langsung putus asa untuk mulai berusaha lagi. Kesimpulannya adanya dukungan dari pemerintah Kalurahan di dalam upaya untuk mengembangkan UMKM tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum terlibat langsung di dalam program tersebut alasanya karena masalah umur dan tanpa adanya dukungan dan motivasi pelaku UMKM lebih rentan dalam melanjutkan usahanya. Oleh karena itu pentingnya strategi dari pemerintah Kalurahan di dalam memberikan dampingan kepada pelaku UMKM yang memilih usaha mandiri agar tidak mudah menyerah dalam menghadapi hambatan dan tantangan pasar.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi Program dari pemerintah Kalurahan itu adalah adanya RPK yang membantu pelaku UMKM yang tidak memiliki tempat untuk produksi, pemasaran, dan juga disana ada pelatihan dan pendampingan yang dilakukan setiap bulan, dan saya juga termasuk salah satu anggota dari RPK ini. Selama di RPK ini saya sangat terbantu dengan program dari pemerintah Kalurahan ini karena sebagai wadah untuk UMKM

berkembang baik itu mengenai skil maupun sofskil tersu dibina”. (wawancara pada tanggal 27 Januari 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani selaku pelaku UMKM diatas peneliti dapat menganalisis bahwa adanya program dari pemerintah Kalurahan yang mana RPK ini dapat membantu pelaku UMKM seperti yang belum mendapatkan tempat untuk produksi, pemasaran itu difasilitasi bahkan dalam pelatihan dan pendampingan selalu dilakukan untuk mengembangkan UMKM yang ada. Jadi selama ada RPK ini pelaku UMKM terbantu dalam hal skil seperti mendapatkan pelatihan dalam produksi, pengemasan dan pemasaran maupun sofskilnya (keterampilan non-teknis) seperti pengelolahan usaha yang baik dan kerja sama tim

Kemudian menurut pengamatan peneliti bahwasanya pelaku UMKM yang ikut bergabung di RPK ini lebih berkembang dibandingkan pelaku UMKM yang usaha mandiri karena yang gabung RPK ini mereka dilatih dan didampingi dalam hal produksi, pengemasan dan pemasarnya bahkan motivasi untuk tetap berkembang. Oleh karena itu RPK ini menjadi solusi efektif bagi pelaku UMKM didalam membantu pertumbuhan UMKM di Panggunharjo.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM Panggunharjo

“Jadi untuk program yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan di dalam membantu pelaku UMKM adalah RPK. Kemudian mba saya juga termasuk anggota di RPK, di RPK ini kami difasilitasi, selain itu pelatihan dan pembinaan terkait produksi, pengemasan dan pemasaran juga saya dapatakan di RPK ini mba. Jadi adanya perubahan saat saya bergabung dengan RPK, saya merasa terbantu dengan adanya program dari pemerintah ini” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Martina selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa dalam membantu pengembangan UMKM pemerintah Kalurahan sudah membuat program yaitu RPK. Jadi dalam RPK ini pelaku UMKM terbantu karena adanya pelatihan-pelatihan dan pendampingan terkait produksi, pengemasan dan pemasaran jadi untuk mereka yang bergabung di RPK ini sangat terbantu. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat bahwasanya untuk para pelaku UMKM yang bergabung di RPK ini sangat terbantu dan cepat berkembang karena ada pelatihan setiap bulan yang dimana jika ada kendala atau permasalahan terkait produk, pengemasan dan pemasaran maupun digital dibantu di RPK. Kesimpulanya dengan adanya RPK yang merupakan program dari pemerintah Kalurahan ini para pelaku UMKM sangat terbantu karena didalam RPK pelaku UMKM didamping dalam pelatihan-pelatihan yang membantu mereka untuk pertumbuhan usaha mereka.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Kalau untuk programnya pasti ada mba, tetapi saya tidak terlalu tau dan saya tidak ikut terlibat karena usaha saya mandiri yang dari orang tua saya dulu. Jadi untuk permodalan, pengemasan, dan pemasaran itu saya sendiri otodidak tanpa campur tangan pemerintah Kalurahana. Dulu tahun 2021 saya pernah ikut pameran di Kalurahan satu kali tetapi pada saat itu produk saya rusak dan pemerintah tidak ganti rugi oleh karena itu saya tidak pernah ikut terlibat lagi didalam kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan” (wawancara pada tanggal 23 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Damian selaku pelaku UMKM tersebut maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada beberapa pelaku di Kalurahan Panggunharjo yang usahanya mandiri dan otodidak. Seperti bapak Damian bahwasanya selama ini dia tidak ikut terlibat didalam program

pemerintah walaupun ada, karena dia memilih untuk berdiri sendiri karena usahanya merupakan usaha dari orang tua dan ketidak percayaanya sama pemerintah Kalurahan karena merasa dirugikan, oleh karena itu memilih untuk usaha mandiri. Menurut pengamatan peneliti melihat bahwasanya adanya ketidak percayaan pelaku UMKM terhadap pemerintah karena merasa dirugikan, kemudian meilih untuk usaha mandiri juga baik tetapi hal ini seperti membatasi akses terhadap peluang yang berguna bagi peluang usaha mereka seperti pemasaran, pengemasan, produksi yang bekerja sama dengan pemerintah. Kesimpulanya pemerintah sudah membuat program dalam upaya membantu pengembangan UMKM tetapi masih ada pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan program dari pemerintah dan memilih untuk usaha mandiri hal ini karena ketidak percayaan mereka terhadap pemerintah lagi. Tetapi dilain sisi ketika pelaku UMKM tidak bekerja sama dengan pemerintah mereka juga akan susah berkembang karena mereka membatasi akses terhadap peluang yang bermanfaat bagi usaha mereka.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas maka peneliti dapat mengambil kesimpulan bahwa Bahwa di dalam upaya untuk mengembangkan UMKM pemerintah Kalurahan Panggunharjo membuat program untuk mendukung pertumbuhan ekonomi masyarakat. Program-program tersebut yaitu adanya Rumah Produksi Komunitas, yang dibawah naungan BUMKal yang dimana berawal dari banyaknya para pelaku UMKM yang tidak memiliki ijin usaha dan tempat layak untuk produksi yang kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak dalam mendukung keberadaan UMKM di

Panggunharjo. Kemudian ada platform digital bernama pasar.id yang diluncurkan sekitar empat tahun lalu, dengan tujuan untuk memasarkan produk-produk dari tokoh dan produksi masyarakat setempat. kemudian ada peta penyebaran UMKM yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan didalam membantu masyarakat dan para pengunjung untuk bisa mengetahui penyebaran usaha lokal di Panggunharjo. Upaya-upaya tersebut dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam membantu untuk meningkatkan pengembangan UMKM. Tetapi di dalam program yang dibuat pemerintah tersebut masih ada pelaku UMKM yang belum merasakan dampak dari program tersebut karena faktor kurangnya akses informasi dari pemerintah Kalurahan, kemudian faktor umur yang menyebabkan pelaku UMKM tidak ikut terlibat didalam program tersebut dan ketidakpercayaan kepada pemerintah Kalurahan. Oleh karena itu perlunya evaluasi program dari pemerintah Panggunharjo agar program-program tersebut bermanfaat bagi pelaku UMKM agar pertumbuhan UMKM merata, sehingga dapat meningkatkan ekonomi lokal, dan memperbaiki kesejahteraan masyarakat.

### **3. Kolaborasi Pemerintah dalam Upaya Pengembangan UMKM**

Upaya pemerintah Panggunharjo di dalam mengembangkan UMKM, bekerja sama dengan beberapa pihak terakit dalam mendukung keberadaan UMKM di Panggunharjo. Karena dengan adanya kerja sama pemerintah dapat memperoleh bantuan berupa modal, peralatan atau pelatihan yang lebih baik. Maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam upaya pengembangan UMKM pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan BUMKal dan CSR PT Penggadain dalam membangun RPK selain itu dalam hal pendaan, pendampingan dan pelatihan-pelatihan yang menunjukan bahwa pelaku UMKM tidak hanya memiliki modal tetapi selain itu mengadakan program-program edukasi untuk meningkatkan kapasitas para pelaku UMKM juga merupakan salah satu hal yang strategis didalam membantu pelaku UMKM” (wawancara pada tanggal 14 Januari 2025).

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Panggungharjo di atas maka peneliti menganalisis bahwa untuk mendorong pelaku UMKM di Panggungharjo pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan PT penggadaian dalam hal Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah, dan membangun Rumah Produksi Komunitas guna untuk membantu pemulihhan ekonomi sosial.

Kerja sama dengan PT Pegadaian di bidang Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah menunjukan bahwa adanya rencana untuk memberikan akses pembiayaan yang lebih nyaman dan berbasis syariah kepada pelaku UMKM. Untuk mengurangi beban bunga yang biasanya menjadi kendala bagi pelaku UMKM dalam memperoleh pinjaman konvensional, Skema KUR Syariah memungkinkan operasional usaha dilakukan melalui modal dengan sistem yang lebih adil dan sesuai dengan prinsip ekonomi Islam. Selain akses terhadap pasar, pembangunan Rumah Produksi Komunitas merupakan salah satu taktik yang mendukung pertumbuhan ekonomi sosial. Dengan bantuan fasilitas tersebut, para pekerja UMKM dapat memiliki ruang produksi yang lebih fleksibel, efisien, dan terstandarisasi.

Hal ini tidak hanya membantu meningkatkan kualitas produk tetapi juga mendorong kerja sama antara pelaku UMKM dan sumber daya teknologi.

Kemudian kerja sama dengan BUMKal yaitu didalam hal pendirian fasilitas, pengelolaan, pendanaan dan distribusi hal ini karena merupakan salah satu peran BUMKal didalam konteks transformasi kemandirian ekonomi yang memenuhi kriteria legal, passion, pasar dan bisnis.

Berdasarkan gambar dokumen peneliti dibawah bahwasanya PT Penggadaian sangat mendukung pengembangan UMKM baik melalui produk berbasis gadai ataupun non gadai.

**Gambar 3. 6 Kunjungan dari Dinkes Bantul**



*Sumber : Website Kalurahan Panggunharjo 06/01/2025*

Menurut pengamatan peneliti menganalisis bahwa dengan adanya kerja sama antara pemerintah Kalurahan dengan PT Penggadaian membawa dampak yang baik baik pelaku UMKM di Panggunharjo karena membawa peluang yang besar untuk terus berkembang. Kemudian BUM Desa juga memiliki peran penting di dalam kerjasama tersebut karena yang memiliki ide untuk membangun RPK ini dan mendorong UMKM di dalam segala aspek. Kesimpulanya bahwasanya pemerintah Kalurahan Panggunharjo telah menjalankan kerja sama dengan pihak luar didalam membantu pertumbuhan ekonomi lokal.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ari Suryanto, Lurah Panggunharjo berikut hasil wawancaranya :

“Seperti yang dijelaskan oleh mantan Lurah di atas bahwasanya kami bekerja sama dengan CSR PT Penggadaian didalam mengadaakan fasilitas dan permodalan untuk UMKM di Panggunharjo. Kemudian itu adanya BUMKal yang mendorong berdirinya RPK ini. Kemudian kami juga bekerja sama dengan Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas Agama dan Dinas Kesehatan yang berperan didalam mendorong pertumbuhan UMKM di Panggunharjo” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ari Suryanto selaku Lurah Panggunharjo, maka peneliti dapat menganalisis bahwa didalam pengembangan UMKM pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan PT Penggadaian dalam hal mengadakan fasilitas seperti adanya Rumah Produksi Komunitas, kemudian dalam hal permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Ada BUMKal juga yang menjadi penggerak dari RPK ini, kemudian ada dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam hal memberikan pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan pendampingan kepada peserta UMKM. Hal ini membantu UMKM di Panggunharjo menjadi lebih profesional dalam mengelola usahanya dan meningkatkan penjualan di pasar yang lebih luas. Kemudian Dinas Agama dalam hal perluasan industri halal dan sertifikasi halal produk makanan dan minuman. Hal ini penting karena pasar sekarang semakin menilai produk halal sebagai tolok ukur suatu kualitas. Dan Dinas Kesehatan berupaya memastikan produk agar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan, obat-obatan, dan minuman tradisional. Hal ini mencakup kualitas produk, sertifikasi

PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), dan pelatihan penerapan standar kesehatan yang sesuai dengan peraturan. Berdasarkan gambar dokumen peneliti bawah bahwasanya itu merupakan salah satu kunjungan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul ke RPK guna memberikan pelatihan dan kunjungan untuk memastikan produk yang diproduksi memenuhi standar kesehatan. Hal ini menunjukan bahwa adanya dukungan dan kerja sama yang baik antara pemerintah Panggunharjo dengan dinas kesehatan di dalam membantu pertumbuhan UMKM. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat bahwasanya pemerintah Kalurahan sudah membangun kerja sama dengan pihak-pihak terkait mengenai pengembangan UMKM agar terus tumbuh dan pastinya dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selain itu pemerintah juga bekerja sama dengan sektor pendidikan didalam melakukan Kuliah Kerja Nyata, penelitian, bahkan lembaga riset yang mana ini sangat membantu dalam menciptakan ekosistem usaha yang berdaya saing. Kesimpulanya Secara keseluruhan, kerja sama ini menunjukan pendekatan multi-stakeholder dalam pengembangan UMKM di Panggunharjo. Melalui kerja sama BUMKal, instansi pemerintah daerah, perguruan tinggi serta sektor kesehatan dan keagamaan, oleh karena itu UMKM tidak hanya berkembang dari sisi ekonomi tetapi juga memiliki standar yang lebih tinggi di bidang regulasi, kesehatan, dan kualitas produk. Hal ini dapat meningkatkan daya saing UMKM Panggunharjo di tingkat lokal, nasional, bahkan internasional.

**Gambar 3. 7 Kunjungan dari Dinkes Bantul**



*Dokumen : Website Kalurahan Panggungharjo 06/01/2025*

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Alrohman selaku Direktur BUMKal Pangguharjo, berikut hasil wawancaranya

“Kami kan Badan Usaha Milik Kalurahan jadi disini konteksnya ekonomi, kami berusaha agar rantai perputaran ekonomi ini berjalan setiap waktu di Panggungharjo oleh karena itu didalam konteks transformasi kemandirian ekonomi yang memenuhi kriteria legal, passion, pasar dan bisnis, UMKM ini lebih ke legalitas bisnis, buka berarti kami mengabaikan lain tetapi, UMKM ini perlu ditingkatkan lagi oleh karena itu kami berinisiatif untuk bekerja sama dengan stakeholder lainnya dalam mendukung pertumbuhan UMKM di Panggungharjo” (wawancara pada tanggal 8 Januari 2024)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ahmad Alrohman selaku Direktur BUMKal Pangguharjo maka peneliti menganalisis bahwa BUMKal Panggungharjo mempunyai peran strategis untuk dalam perekonomian di wilayah Panggungharjo tetap berputar oleh karena itu legalitas bisnis seperti ijin-ijin, dan sertifikat, passion dalam usaha dan kesiapan pasar harus diperhatikan agar UMKM ini tetap tumbuh. Legalitas menjadi faktor yang penting karena memberikan perlindungan dan hukum bagi pelaku UMKM dan membuka akses terhadap peluang seperti permodalan, kerjasama dan pemasaran. Kemudian passion dalam usaha ini bukan saja terkait ketertarikan terhadap usaha tetapi juga

bagaimana cara dalam menghadapi tantangan bisnis agar tetap tumbuh, kemudian menciptakan inovasi-inovias baru yang dapat meningkatkan nilai produk dan kesiapan pasar juga menjadi hal yang krusial jadi ketika pelaku UMKM sudah memiliki kedua tersebut tetapi kesiapan pasar tidak ada maka tidak dapat mencapai target konsumenya dan bisnis yang mana pengelolaan manajemen keuangan yang baik juga akan membantu usaha agar tetap berjalan dan pemahaman yang baik juga akan membantu pertumbuhan UMKM oleh karena itu BUMKal bekerja sama dengan pemerintah Kalurahan, CSR PT Penggadaian dan stekholder lainnya didalam membantu pertumbuhan UMKM. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya upaya BUMKal ini bukan semata-mata hanya bisnis saja tetapi dari sisi kesejahteraan masyarakat juga diperhatikan karena dengan pertumbuhan ekonomi yang baik maka kesejahteraan masyarakat juga akan meningkat oleh karena itu sebagai BAMUSKal berupaya agar pertumbuhan UMKM ini merata. Kesimpulanya BAMUSKal bekerjasama dengan pemerintah Daerah, perguruan tinggi, sektor swasta agar UMKM di Panggunharjo tetap tumbuh. Dalam membangun kerjasama ini juga hanya bisnis saja tetapi juga harus memperhatikan strategi jangka panjang dalam meningkatkan UMKM agar pertumbuhan ekonomi lokal terus berjalan dan memberikan manfaat bagi masyarakat.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa didalam upaya mengembangkan UMKM pemerintah Kalurahan Panggunharjo menggandeng beberapa stekholder untuk membantu UMKM agar tetap tumbuh. Seperti halnya bahwa CSR PT

Penggadaian mengadakan fasilitas seperti adanya Rumah Produksi Komunitas, kemudian dalam hal permodalan seperti Kredit Usaha Rakyat (KUR) Syariah. Ada BUMKal juga yang menjadi penggerak dari RPK ini, kemudian ada dinas-dinas terkait seperti Dinas Koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) dalam hal memberikan pelatihan manajemen usaha, akses permodalan, dan pendampingan kepada peserta UMKM. Hal ini membantu UMKM di Panggungharjo menjadi lebih profesional dalam mengelola usahanya dan meningkatkan penjualan di pasar yang lebih luas. Kemudian Dinas Agama dalam hal perluasan industri halal dan sertifikasi halal produk makanan dan minuman. Hal ini penting karena pasar sekarang semakin menilai produk halal sebagai tolok ukur suatu kualitas. Dan Dinas Kesehatan berupaya memastikan produk agar memenuhi standar kesehatan dan keselamatan, khususnya bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan, obat-obatan, dan minuman tradisional.

Hal ini mencakup kualitas produk, sertifikasi PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), dan pelatihan penerapan standar kesehatan yang sesuai dengan peraturan. Kemudian Legalitas menjadi faktor yang penting karena memberikan perlindungan dan hukum bagi pelaku UMKM dan membuka akses terhadap peluang seperti permodalan, kerjasama dan pemasaran. kemudian passion dalam usaha ini bukan saja terkait ketertarikan terhadap usaha tetapi juga bagaimana cara dalam menghadapi tantangan bisnis agar tetap tumbuh, kemudian menciptakan inovasi-inovias baru yang dapat meningkatkan nilai produk dan kesiapan pasar juga menjadi hal yang krusial jadi ketika pelaku UMKM sudah

memiliki kedua tersebut tetapi kesiapan pasar tidak ada maka tidak dapat mencapai target konsumennya dan bisnis yang mana pengelolaan manajemen keuangan yang baik juga akan membantu usaha agar tetap berjalan dan pemahaman yang baik juga akan membantu pertumbuhan UMKM. Oleh karena itu pemerintah Kalurahan menggandeng stekholder baik pihak pemerintah daerah, perguruan tinggi, dinas kesehatan, dinas agama, dan dinas koperasi dan UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) untuk bekerja sama dalam pengembangan UMKM agar UMKM dapat menghadapi persaingan ekonomi secara luas.

#### **4. Pengembangan Sumber Daya (SDM) Pelaku UMKM**

Dalam pengembangan UMKM, sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM memegang peran yang sangat penting karena keterampilan, pengetahuan, dan inovasi mereka akan menentukan keberlangsungan dan daya saing usaha oleh karena itu perlunya pelatihan dan pendampingan terkait sumber daya pelaku UMKM. Maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya:

“Jadi di dalam meningkatkan sumber daya pelaku UMKM kami memfasilitasi dan mendampingi dalam pelatihan dalam hal manajemen keuangan, strategi pemasaran, hingga peningkatan kualitas produk kemudian memberikan dukungan dalam bentuk akses permodalan, baik melalui bantuan langsung, kredit usaha rakyat (KUR), maupun kemitraan dengan lembaga keuangan. Selain itu, kemudahan dalam perizinan usaha, seperti pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal semua itu di lakukan di RPK” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa pendampingan dan pelatihan dalam manajemen keuangan, strategi pemasaran,

dan peningkatan kualitas produk merupakan langkah yang sangat penting dalam memperkuat daya saing UMKM. Manajemen keuangan yang baik akan membantu pelaku usaha dalam mengelola pemasukan dan pengeluaran secara lebih efisien, sehingga usaha dapat berkembang secara berkelanjutan. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya memang adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan di RPK kemudian bantuan modal melalui kredit usaha rakyat (KUR) yang bekerja sama dengan PT Penggadaian, kemudian bekerja sama dengan dinas agama dalam hal halal. Tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum beragung di RPK oleh karena itu pelatihan dan pendampingan belum dirasakan oleh semua pelaku UMKM di Panggunharjo. Kesimpulanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM, tetapi belum merata.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ari Suryanto, Lurah Panggunharjo berikut hasil wawancaranya :

“Dalam pengembangan sumber daya pelaku UMKM kami berupaya agar program-program yang ada dapat membantu pelaku UMKM untuk tetap tumbuh dan berkembang seperti dalam hal pelatihan dan pendampingan mengenai pemasaran, inovasi-inovasi baru, kerja sama dan pastinya fasilitas yang mendukung. Oleh karena itu kami ada RPK yang aman di sana pelaku UMKM dapat mengikuti pelatihan, pembinaan dan pemasaran. Kemudian pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal juga kami perhatikan”

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ari Suryanto selaku Lurah Panggunharjo, maka peneliti dapat menganalisis bahwa didalam pengembangan sumber daya pelaku UMKM pemerintah Kalurahan Panggunharjo bekerja sama dengan CSR PT Penggadaian, dalam hal modal.

Kemudian di RPK pelaku UMKM difasilitasi dalam hal pelatihan dan pendampingan terkait pemasaran, manajemen pengelolaan keuangan dan pelatihan terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya di dalam meningkatkan sumber daya pelaku UMKM pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan CSR PT Penggadain di dalam membuat RPK untuk mendukung pertumbuhan UMKM baik dalam hal pemasaran, manajemen pengelolaan keuangan dan pelatihan terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal agar pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan dan keterampilan di dalam usaha. Kesimpulanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM, tetapi belum merata.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Agung Pranto selaku Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu) berikut hasil wawancaranya :

“Jadi untuk meningkatkan sumber daya pelaku UMKM kami menyediakan RPK ini selain sebagai tempat untuk membantu pelaku UMKM memproduksikan produk, RPK juga sebagai tempat untuk pelatihan dan pendampingan bagi pelaku UMKM baik dalam hal manajemen keuangan, pemasaran, mental dan digitalisasi semua difasilitasi disana. Kemudian bazar yang dilakukan setiap tahun dan Bantul Creative Expo budaya yang diselenggarakan oleh Pemda Bantul” (wawancara pada tanggal 2 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama dengan oleh Bapak Agung Prananto selaku Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu) maka peneliti dapat menganalisis bahwa upaya yang dilakukan pemerintah di dalam meningkatkan sumber daya pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo yaitu dengan melakukan pelatihan, pendampingan dan bazar yang dapat membantu pelaku untuk tumbuh tidak hanya bisnisnya saja tetapi pengetahuan mengenai usahanya juga dilatih. Menurut pengamatan

peneliti bahwasanya di dalam RPK pelaku UMKM di berikan pelatihan dan pendampingan terkait manajemen keuangan yang harus stabil, pemasaran yang luas, mental yang harus kuat dan bazar yang dilakukan setiap tahun serta Bantul Creative Expo budaya yang di dalamnya juga berkaitan dengan pelatihan pemasaran, digitalisasi dan promosi produk tentu hal ini dapat membantu sumber daya pelaku UMKM agar tetap bersaing. Tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum bergaung di RPK oleh karena itu manfaat dari upaya-upaya tersebut belum semua dirasakan oleh pelaku UMKM di Panggunharjo. Kesimpulanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM, tetapi belum merata karena masih ada pelaku UMKM yang belum merasakan manfaat dari program tersebut.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku koordinator Rumah Produksi Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya

“Jadi di dalam meningkatkan sumber daya pelaku UMKM pastinya kami melakukan pelatihan-pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan pemasaran, platform digital, mental dan manajemen keuangan jadi di sana kami menyesuaikan juga dengan kebutuhan pelaku UMKM. Karena kami merasa jika sumber daya manusianya juga baik berarti usahanya juga akan terus berkembang” (wawancara pada tanggal 27 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Aisyah selaku koordinator Rumah Produksi Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa pelatihan dan pendampingan dalam pemasaran dan platform digital merupakan langkah strategis dalam menghadapi era digitalisasi dengan membekali pelaku UMKM keterampilan pemasaran digital, mereka dapat lebih mudah menjangkau pasar yang lebih luas, meningkatkan interaksi dengan

pelanggan, serta memperkuat branding usaha mereka. Aspek mental dalam berwirausaha menjadi bagian penting dalam program pengembangan SDM. Faktor ini sering kali diabaikan, padahal ketahanan mental dan motivasi yang kuat berperan besar dalam keberlangsungan usaha Dengan adanya pelatihan dalam bidang ini, pelaku UMKM dapat lebih terstruktur dalam mengelola keuangan usaha, sehingga mampu menghindari risiko kerugian. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya di RPK ini melakukan langkah-langkah yang efektif dalam pelatihan dan pendampingan seperti pemasaran, paltform digital, mental dan manajemen keuangan agar jangan usaha mereka saja yang berkembang tetapi sumber daya mereka juga. Kesimpulanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan di RPK dengan harapan agar pelaku UMKM terus tumbuh, tetapi belum merata karena masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di dalam RPK.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi di dalam meningkatkan sumber daya pelaku UMKM kami mengikuti pelatihan dan pendampingan yang dilakukan di RPK karena saya juga bergabung di RPK. Pelatihan itu seperti pemasaran, paltform digital, mental dan manajemen keuangan semua kami dapatkan di RPK dan menurut saya itu sangat membantu kami di dalam meningkatkan pengetahuan kami terkait usaha yang sedang kami jalankan” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa

keikutsertaan dalam pelatihan dan pendampingan di RPK menunjukkan bahwa ada akses yang diberikan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan edukasi yang lebih terarah kemudian materi pelatihan yang mencakup pemasaran, platform digital, mental, dan manajemen keuangan mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Pemasaran dan platform digital sangat relevan dalam era digital saat ini, di mana UMKM perlu memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pelanggan. Manajemen keuangan menjadi kunci keberlanjutan usaha, karena pengelolaan keuangan yang buruk sering kali menjadi penyebab kegagalan bisnis. Sementara itu, aspek mental juga tidak kalah penting, karena menjalankan usaha memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi tantangan, persaingan, dan risiko usaha. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya adanya upaya pemerintah Kalurahan Panggungharjo di dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui RPK yang mana di sana pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang membantu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai usaha mereka tetapi ini untuk pelaku UMKM yang bergabung di RPK sedangkan yang belum bergabung belum. Kesimpulanya adanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan di RPK ini sangat membantu pelaku UMKM di Panggungharjo, tetapi belum merata.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi di dalam meningkatkan sumber daya pelaku UMKM saya kan bergabung di RPK jadi di sana kami mengikuti pelatihan dan pendampingan yang dilakukan di RPK. Pelatihan itu seperti pemasaran, platform digital, mental dan manajemen keuangan semua kami dapatkan di RPK dan menurut saya itu sangat membantu kami di dalam meningkatkan pengetahuan kami terkait usaha yang sedang kami jalankan dan saya juga antusias dengan hal tersebut. Jadi setelah bergabung di RPK usaha saya semakin berkembang” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa keikutsertaan dalam pelatihan dan pendampingan di RPK menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan edukasi yang lebih terarah kemudian materi pelatihan yang mencakup pemasaran, platform digital, mental, dan manajemen keuangan mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Pemasaran dan platform digital sangat relevan dalam era digital saat ini, di mana UMKM perlu memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pelanggan. Manajemen keuangan menjadi kunci keberlanjutan usaha, karena pengelolaan keuangan yang buruk juga sering kali menjadi penyebab kegagalan suatu bisnis. Kemudian aspek mental juga tidak kalah penting, karena menjalankan usaha memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi tantangan, persaingan, dan risiko usaha. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa adanya upaya pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui RPK yang mana di sana pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang membantu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai usaha mereka tetapi ini untuk pelaku UMKM yang bergabung di RPK

sedangkan yang belum bergabung belum. Jadi dengan adanya RPK ini membantu pelaku UMKM untuk terus tumbuh. Kesimpulanya adanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan di RPK ini sangat membantu pelaku UMKM di Panggunharjo, tetapi belum merata karena belum semua pelaku UMKM memanfaatkan program tersebut.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam meningkatkan sumber daya pelaku UMKM saya juga kan bergabung di RPK jadi di sana kami mengikuti pelatihan dan pendampingan yang di lakukan di RPK. Pelatihan itu seperti pemasaran, platform digital, mental dan manajemen keuangan semua kami dapatkan di RPK dan menurut saya itu sangat membantu kami di dalam meningkatkan pengetahuan kami terkait usaha yang sedang kami jalankan dan memberikan peluang bagi berkembangnya usaha kami.” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa keikutsertaan dalam pelatihan dan pendampingan di RPK menunjukkan bahwa pemerintah Kalurahan memberikan akses kepada pelaku UMKM untuk mendapatkan edukasi yang lebih terarah kemudian materi pelatihan yang mencakup pemasaran, platform digital, mental, dan manajemen keuangan mencerminkan pendekatan yang komprehensif. Pemasaran dan platform digital sangat relevan dalam era digital saat ini, di mana UMKM perlu memanfaatkan media sosial dan marketplace untuk memperluas jangkauan pelanggan. Manajemen keuangan menjadi kunci keberlanjutan usaha, karena pengelolaan

keuangan yang buruk juga sering kali menjadi penyebab kegagalan suatu bisnis. Kemudian aspek mental juga tidak kalah penting, karena menjalankan usaha memerlukan kesiapan mental dalam menghadapi tantangan, persaingan, dan risiko usaha. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya adanya upaya pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam mengembangkan sumber daya manusia melalui RPK yang mana di sana pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan yang membantu menambah pengetahuan dan wawasan mengenai usaha mereka tetapi ini untuk pelaku UMKM yang bergabung di RPK sedangkan yang belum bergabung belum. Kesimpulannya adanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM melalui pelatihan dan pendampingan di RPK ini sangat membantu pelaku UMKM di Panggunharjo, tetapi belum merata karena masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di RPK.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya mandiri mba jadi untuk pelatihan dan pendampingan saya tidak ikut terlibat, saya pernah ikut pelatihan terkait PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) adalah izin edar tetapi itu diselenggarakan oleh kabupaten dan saya mendapatkan sertifikatnya, kalau di Kalurahan Panggunharjo saya belum pernah ikut pelatihan maupun pendampingan terkait pengembangan sumber daya pelaku UMKM” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa usaha yang dijalankan bersifat mandiri, sehingga pelaku UMKM tidak terlibat

dalam program pelatihan dan pendampingan yang diselenggarakan di tingkat Kalurahan. Meskipun demikian, pelaku UMKM pernah mengikuti pelatihan terkait PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga) yang diadakan oleh pihak kabupaten dan berhasil memperoleh sertifikat. Hal ini menunjukan bahwa pelaku usaha memiliki kesadaran akan pentingnya legalitas produk, terutama dalam aspek izin edar makanan dan minuman. Namun, di sisi lain karena belum mengikuti pelatihan atau pendampingan di Kalurahan Panggunharjo ada kemungkinan bahwa pelaku UMKM belum mendapatkan manfaat lain, seperti pelatihan pemasaran digital, manajemen keuangan, atau strategi pengembangan usaha yang bisa mendukung pertumbuhan bisnis ya. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan melalui RPK yang sudah dibuat oleh pemerintah Kalurahan tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di dalam RPK tersebut sehingga pelaku UMKM belum mendapatkan akses tersebut hal ini dikarenakan kurangnya akses informasi dari pemerintah Kalurahan mengenai pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan. Kesimpulannya adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam mengembangkan sumber daya manusia pelaku UMKM tetapi melalui pelatihan dan pendampingan di RPK tetapi ada pelaku UMKM yang belum bergabung.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya mandiri jadi untuk pengembangan sumber daya manusianya dalam hal pelatihan dan pendampingan saya tidak ikut semuanya saya lakukan dengan otodidak baik dari pemasaran, digitalisasi dan manajemen keuangan tanpa bantuan dari pihak pemerintah Kalurahan. Kalau dari

pemerintah Kalurahan saya tidak tau mba karena saya tidak terlibat di dalam program-program pemerintah” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa usaha yang dijalankan benar-benar mandiri tanpa mengikuti pelatihan atau pendampingan dari pemerintah Kalurahan. Semua aspek pengembangan usaha, seperti pemasaran, digitalisasi, dan manajemen keuangan, dipelajari secara otodidak tanpa bantuan dari program yang tersedia. Selain itu, karena tidak terlibat dalam program-program pemerintah Kalurahan, pelaku usaha juga tidak memiliki informasi mengenai jenis pelatihan atau pendampingan yang mungkin tersedia. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan melalui RPK yang sudah dibuat oleh pemerintah Kalurahan tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di dalam RPK tersebut sehingga pelaku UMKM belum mendapatkan akses tersebut hal ini dikarenakan kurangnya akses informasi dari pemerintah Kalurahan mengenai pelatihan dan pendampingan yang akan dilakukan oleh pemerintah Kalurahan. Kesimpulanya adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam mengembangkan sumber daya manusia pelaku UMKM tetapi melalui pelatihan dan pendampingan di RPK tetapi ada pelaku UMKM yang belum bergabung.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas maka peneliti mengambil kesimpulan bahwa di dalam upaya mengembangkan sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM Pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam

meningkatkan sumber daya pelaku UMKM pemerintah Kalurahan bekerja sama dengan CSR PT Penggadain di dalam membuat RPK untuk mendukung pertumbuhan UMKM. Kemudian di dalam RPK ini di lakukan pelatihan dan pendampingan terkait pemasaran, manajemen pengelolaan keuangan dan pelatihan terkait pembuatan Nomor Induk Berusaha (NIB) dan sertifikasi halal agar pelaku UMKM dapat menambah pengetahuan dan keterampilan di dalam usaha kemudian bantuan modal melalui kredit usaha rakyat (KUR). Kemudian pelatihan dan pendampingan terkait manajemen keuangan yang harus stabil, pemasaran yang luas, mental yang harus kuat dan bazar yang dilakukan setiap tahun serta Bantul Creative Expo budaya yang di dalamnya juga berkaitan dengan pelatihan pemasaran, digitalisasi dan promosi produk tentu hal ini dapat membantu sumber daya pelaku UMKM agar tetap bersaing. Tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di dalam RPK tersebut sehingga pelaku UMKM belum mendapatkan akses tersebut hal ini dikarenakan kurangnya akses informasi dari pemerintah Kalurahan mengenai pelatihan dan pendampingan yang akan di lakukan oleh pemerintah Kalurahan

## **5. Peningkatan Kualitas Produk UMKM**

Dalam pengembangan UMKM peningkatan kualitas produk harus lebih diperhatikan seperti penggunaan bahan-bahan baku, yang berkualitas aman dan sehat, menggunakan kemasan yang baik memperkuat nama merk agar konsumen tidak kesusahan dan pastinya pelayanan yang baik sehingga pelaku UMKM dapat menghasilkan produk-produk yang baik, sehat dan halal. Maka dilakukan

wawancara dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi di dalam meningkatkan kualitas produk yang saya lakukan adalah melihat kualitas bahan kainya saya menggunakan kain yang berkualitas dan didalam proses pewarnaan dan pencantingan saya lakukan sendiri agar motifnya lebih rapi dan warnanya lebih tahan lama. Untuk desainya saya buat dalam bentuk fashion yang terdiri dari dress, baju, topi dan lain-lain. Dan untuk nama usaha saya sudah ada yaitu batik madani. Kemudian produk saya dibawa ke RPK untuk dicek dan dilakukan sesi pemotretan untuk di pasarkan di show room RPK” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa didalam peningkatan kualitas produk pelaku UMKM

Panggunharjo memiliki inovatif dalam mengembangkan produk-produk mereka agar bisa bersaing di pasar. Karena dengan kualitas bahan kain yang baik, proses pewarnaan yang dilakukan dengan sendiri pasti hasilnya juga menarik peminat konsumen. Kemudian desainya yang sudah modern yang sudah menyesuaikan pasar juga dimana pelaku UMKM mengembangkan desainya agar cocok dengan fashion yang sesuai dengan pasar sekarang. Berdasarkan dokumen peneliti diatas juga menunjukan bahwa adanya produk batik madani yang modern yang motifnya bermacam-macam.

**Gambar 3. 8 Produk Batik Madani**



*Dokumen peneliti, 27/12/2025*

Berdasarkan pengamatan peneliti juga juga bahwa hasil dari batik ini dibuat dengan motif yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan pasar dan didukung juga dengan nama mereknya. Kemudian setelah selesai di produksi dibawah ke RPK untuk dilakukan sesi pemotretan kemudian dipasarkan di show room RPK. Kesimpulanya pelaku UMKM di Panggunharjo sudah berinovasi dalam meningkatkan kualitas produk dengan memperhatikan kualitas bahan, proses pembuatan dan merk yang digunakan. Hal ini tentunya membawa dampak positif bagi pelaku UMKM untuk tetap berkembang. Yang didukung juga dengan keberadaan RPK

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam meningkatkan kualitas produk saya tentunya saya menggunakan kualitas bahan baku yang baik seperti disini saya menggunakan kacang tanah yang disanggrai agar renyah. Yang membedakanya saya menambahkan varian baru seperti biji mari dengan tambahan bahan lain dan saya tidak menggunakan bahan pengawet yang tentunya aman, halal dan sehat. Kemudian untuk produksi dan pengemasanya kan di RPK jadi untuk tingkat kebersihan, aman dan halal pasti terjamin dan untuk nama produk saya yaitu Ampyang Coklat yang dikemas dalam merek Pangga.

Dengan Kemudian hasil produk kami di lakukan sesi pemotretan untuk di pasarkan di show room RPK” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa pelaku UMKM di Kalurahan Pangguharjo dalam peningkatakan kualitas produk sudah memperhatikan penggunaan bahan baku, pengemasan yang baik, dan tentunya tempat produksi yang mendukung. Kemudian pelaku UMKM juga memiliki inovasi dan kreatifitas yang baik di dalam meningkatkan kualitas produk mereka. Hal ini tentunya juga karena adanya RPK ini sehingga memudahkan mereka untuk memproduksi produk-produk yang berkualitas tidak itu saja RPK juga menjadi pusat pemasaran yang bisa dijangkau oleh para konsumen.

**Gambar 3. 9 Produk Ampyang Coklat**



*Sumber: Dokumen peneliti, 27/12/2025*

Berdasarkan dokumen peneliti di atas juga peneliti menganalisis bahwa sangat jelas jika dilihat dari kemasannya yang rapi dan didukung juga dengan mereknya hal ini dapat meyakinkan konsumen bahwa produk ini benar-benar memiliki kualitas yang baik. Menurut pengamatan peneliti juga bahwasanya peneliti melihat bahwa produk yang kemas ini sudah modern dengan label dan

infromasi yang jelas kemudian memiliki kualitas yang baik dengan harga yang terjangkau juga. Kesimpulanya pelaku UMKM di Panggungharjo sudah meningkatkan kualitas produknya dengan memperhatikan pengemasanya, pemilihan bahan baku yang baik, inovasi dan kreatifitas serta proses produksi yang sehat, aman dan pastinya halal. Hal ini pastinya tidak terlepas dari peran RPK yang membantu para pelaku UMKM.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Setelah bergabung di RPK saya menjadi tau cara untuk pengemasan yang baik, memilih bahan baku kacang yang baik serta bahan-bahan campuran yang higenis. Jadi di dalam meningkatkan kualitas produk saya itu menambahkan bahan-bahan lainnya ke dalam kacang tanah agar rasa dan aromanya beda dengan yang lain. Kemudian untuk produksinya kan saya di sini RPK juga jadi pastinya sehat, aman dan halal ya. Produk saya namanya yaitu kacang rempah nenek tentunya sudah halal yang didukung juga dengan nama merk yaitu Pangga. Kemudian hasil produk kami di lakukan sesi pemotretan untuk di pasarkan di show room RPK” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Martina di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa pelaku UMKM dalam peningkatan kualitas produk pelaku UMKM Panggungharjo dibantu dengan keberadaanya RPK ini. Karena RPK menjadi tempat produksi bagi para pelaku UMKM Panggungharjo yang tidak memiliki tempat untuk produksi selain itu ada show room untuk pusat pemasarnya. Sehingga pelaku UMKM Panggungharjo tidak lagi kesusahan didalam pemasaran dan tempat untuk produksi. Kemudian dalam hal peningkatan kualitas produk pelaku UMKM Panggungharjo sudah memperhatikan penggunaan bahan baku, pengemasan yang baik, inovasi didalam mengembangkan kualitas produknya baik dari segi rasa maupun

packingnya. Selain itu ada merknya sehingga menambah tingkat kepercayaan konsumen dan tingkat kualitas produknya. Setelah produk selesai kemudian dilakukan pemotretan untuk dipasarkan di show room di dalam RPK.

**Gambar 3. 10 Produk Rempah Nenek**



*Sumber: Dokumen peneliti, 27/12/2025*

Berdasarkan gambar dokumen di samping peneliti menganalisis bahwa jika dilihat dari kemasanya sudah modern yang di label juga dengan mereknya. Berdasarkan pengamatan peneliti juga melihat secara langsung bahwa memang dalam hal produksi, pengemasan, penggunaan bahan produksi bahkan mereknya sudah menunjukkan bahwa kualitas produknya sudah baik. Kesimpulanya peningkatakn kualitas produk UMKM di Panggungharjo bahwasanya pelaku UMKM sudah memperhatikan kualitasnya yang didukung juga dengan keberadaan RPK ini sangat membantu mereka dalam hal penggunaan bahan produksi, pengemasan, produksi bahkan pusat pemasaranya.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk meningkatkan kualitas produk saya biasanya saya menjaga penggunaan bahan baku agar tetap fresh, disini saya menggunakan kacang tanah dan tambahan rempah lainnya. kemudian untuk produksinya saya kan usaha sendiri jadi mba, jadi proses olahannya saya sendiri olah di rumah dengan menggunakan peralatan dan bahan yang seadanya. Tetapi untuk kualitas rasanya puji Tuhan masih tetap sama dari awal sampai sekarang mba. Kemudian untuk pengemasan saya masih menggunakan teknik lama yaitu dengan menggunakan plastik” (wawancara pada tanggal 26 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Panggunharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang belum bergabung di RPK dan memilih untuk produksi sendiri produknya. Tetapi mereka tetap memperhatikan kualitas rasanya karena tidak pernah berubah. Tetapi untuk pengemasan dan produksinya masih menggunakan teknik rumahan dengan menggunakan peralatan dan bahan yang seadanya. Berdasarkan gambar dokumen peneliti diatas menunjukan bahwa tempat produksi dan pengemasan masih menggunakan peralatan dan bahan seadanya yang mana tidak dapat bertahan lama, kemudian proses produksinya juga lama. Berdasarkan pengamatan peneliti juga melihat bahwa dalam proses produksinya lama sekitar dua hari, lalu pengemasanya masih menggunakan plastik, hal ini tentu daya tahan kripik tidak lama di luar suhu ruangan. Kesimpulanya masih ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang produksinya mandiri dengan bahan dan peralatan yang seadanya. Hal ini tentu butuh perhatian lebih dari pemerintah Panggunharjo dalam menjaring pelaku UMKM yang belum masuk RPK agar mereka dapat terbantu oleh program-program yang ada dan agar mereka dapat meningkatkan kualitas produk mereka sehingga bisa bersaing di pasar yang luas.

**Gambar 3. 11 Produk Peyek Kremes**



*Sumber: Dokumen peneliti, 26/12/2025*

Hal yang serupa disampaikan oleh Bapak Daniman selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usah saya kan mandiri mba jadi untuk meningkatkan kualitas produk saya usahakan memilih bahan kain yang teksturnya lembut, dan nyaman dipakai kemudian didalam pembuatan motifnya juga berbeda-beda, bisa juga tergantung pemesanan dari konsumen. Batik saya kan batik pengantin dengan teknik tulis, dan menggunakan pewarna alami mba, jadi untuk pengerjaanya agak lama dan tergantung juga dari motifnya. Usaha saya juga kan lanjutan dari orang tua jadi pastinya kualitasnya tetap terjamin” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Daniman di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di RPK seperti halnya sama dengan Ibu Amin. Untuk kualitas produk batiknya bagus karena bahannya lembut dan nyaman. Kemudian dalam hal produksi menggunakan teknik tulis dan menggunakan pewarna alami hal ini yang menghasilkan kualitas produk yang unik yang mana karena dibuat secara manual dan desain yang berbeda-beda. Kemudian dalam hal kemasan juga sudah baik. Menurut gambar dokumen peneliti disamping dapat dianalisis bahwa batik tulis daliman ini dalam hal kualitasnya sudah bagus dan kemasanya tetapi

dalam proses produksinya membutuhkan waktu yang sangat lama karena menggunakan teknik manual.

**Gambar 3. 12 Produk Batik Daliman**



*Sumber: Dokumen peneliti, 23/12/2025*

Menurut pengamatan peneliti melihat bahwa untuk kualitas produknya tergantung juga dari motif-motifnya yang mana jika motifnya bagus berarti penggerjaanya juga lama karena menggunakan pewarna alami. Kemudian di dalam kemasannya juga menggunakan hampres batik. Kesimpulanya ada pelaku UMKM di Panggungharjo yang tidak bergabung di dalam RPK tetapi kualitas produknya bagus yang didukung dengan penggunaan bahan yang bagus, kemasan yang mendukung dan pelayanan yang baik. Hal ini menunjukan bahwa usaha mandiripun bisa berkembang asalkan ada niat dan usaha.

Hal yang berbeda juga disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku koordinator Rumah Produksi Komunitas, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi untuk pelaku UMKM yang bergabung di RPK kami fasilitasi, kami bina dan bimbing seperti dalam hal meningkatkan kualitas produk, kami melakukan pelatihan mengenai pengemasan (packaging) produk, manajemen maupun untuk pemasaran. Jadi pelatihannya itu sebulan sekali kami adakan. Selain itu di RPK juga menjadi tempat untuk produksi bagi mereka yang tidak memiliki tempat untuk produksi yang tentunya bersih, aman dan halal dan show room untuk pemasaran. Jadi pelaku UMKM yang ada di RPK ini kami perhatikan apalagi yang untuk makanan mulai dari

awal produksi sampai pengemasan kami perhatikan". (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aisyah selaku koordinator RPK di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa keberadaan RPK ini sangat membantu pelaku UMKM dalam hal sebagai tempat untuk produksi karena banyak pelaku UMKM yang belum memiliki tempat untuk produksi. Kemudian memfasilitasi dalam pelatihan pengemasan, pemasaran bahkan manajemen. Dari gambar dokumen di samping peneliti menganalisis bahwa adanya pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan kualitas produk yang ada.

**Gambar 3. 13 Pelatihan Pengemasan di RPK**



*Sumber: Website Kalurahan Panggungharjo, /17/01/2025*

Gambar tersebut dihadiri oleh PT Penggadaian sebagai suatu bentuk dukungan dan dorongan secara nyata. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat juga bahwa di RPK menyediakan tempat produksi yang alatnya canggih, bersih dan tentunya aman. Semua proses produksi dilakukan didalam RPK dan setelah itu dipasarkan di show room. Kemudian untuk nama merknya itu Pangga yang digunakan di RPK ini untuk menjual produk-produk keluar Kalurahan. Kesimpulanya RPK sangat membantu pelaku UMKM di Panggungharjo yang tidak memiliki tempat untuk produksi. Kemudian ada mereknya juga dengan

nama Pangga hal ini tentunya membawa dampak positif bagi pelaku UMKM karena mereka dibantu agar adanya peningkatan dalam pemasaran.

Dari hasil wawancara bersama dengan beberapa narasumber diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa pelaku UMKM di Panggunharjo sudah meningkatkan kualitas produknya dengan memperhatikan pengemasanya, pemilihan bahan baku yang baik, inovasi dan kreatifitas serta proses produksi yang sehat, aman dan pastinya halal. Hal ini pastinya tidak terlepas dari peran RPK yang membantu para pelaku UMKM. RPK sangat membantu pelaku UMKM di Panggunharjo yang tidak memiliki tempat untuk produksi. Kemudian ada mereknya juga dengan nama Pangga hal ini tentunya membawa dampak positif bagi pelaku UMKM karena mereka dibantu agar adanya peningkatan dalam pemasaran. Tetapi masih ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang produksinya mandiri dengan bahan dan peralatan yang seadanya. Tetapi ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang tidak bergabung di dalam RPK tetapi kualitas produknya bagus yang didukung dengan penggunaan bahan yang bagus, kemasan yang mendukung dan pelayanan yang baik. Hal ini menunjukan bahwa usaha mandiripun bisa berkembang asalkan ada niat dan usaha. Hal ini tentu butuh perhatian lebih dari pemerintah Panggunharjo dalam menjaring pelaku UMKM yang belum masuk RPK agar mereka dapat terbantu oleh program-program yang ada dan agar mereka dapat meningkatkan kualitas produk mereka sehingga bisa bersaing di pasar yang luas.

## **6. Strategi yang dilakukan pelaku UMKM dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar**

Inovasi baru adalah upaya pelaku UMKM didalam menciptakan sesuatu yang baru. Inovasi produk sesuai kebutuhan pasar ini dapat membantu pelaku UMKM untuk bersaing dengan produk-produk yang sejenis, beraing dengan jangkaun pasar dan memperkuat produknya agar dapat dikenal. Hal ini bisa dilakukan dengan menciptakan produk unik, menawarkan produk sesuai pasar, kemasan yang menarik, dan bisa juga melalui media sosial. Maka dilakukan wawancara dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi mba usaha saya ini kan namanya batik madani jadi untuk menyesuaikanya dengan pasar saya diversifikasi menjadi produk fashion yang mana bisa membuat pakaiyan siap pakai seperti kemeja, dress, dll. Kemudian dalam aksesoris dan souvenir untuk menyasar pasar yang lebih luas. Kemudian saya menerapkan costom order dan limited edition yang mana saya tidak selalau produksi tetapi menunggu stok selesai baru saya bisa produksi lagi. Selain itu saya juga sudah mengikuti workshop dan demonstrasi batik utusan Pemda DIY di thailand mba tahun 2020 lalu dan saya juga aktif mengikuti iven-iven yang dibuat oleh pemerintah. Kalau untuk pemasaranya saya di sosial media dan RPK jadi online maupun offline” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Dwi Hening tersebut maka, peneliti dapat menganalisis bahwa pelaku UMKM Panggungharjo sangat kreatif dimana mereka bisa menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai kebutuhan pasar. Yang dilakukan ibu dwi hening adalah melakukan diversifikasi menjadi produk fashion, aksesoris dan souvenir yang mana dapat dibuat dalam bentuk pakaiyan, dress, topi dll.

**Gambar 3. 14 Demonstrasi Batik di Thailand**



*Sumber: Website Kalurahan Panggungharjo, /17/01/2025*

Kemudian yang paling unik banyak pelaku UMKM di bidang kerajinan batik yang memproduksi produknya secara banyak bahkan stok tetapi yang dilakukan ibu Dwi Hening memproduksi setelah stoknya habis. Hal ini yang membuat beda dari pelaku-pelaku yang lain. Kemudian dalam hal pemasaran pelaku UMKM sudah menggunakan media sosial seperti facebook dan instagram untuk mempromosi produk mereka, selain itu secara offline juga di RPK. Kemudian seperti gambar dokumen website Kalurahan di atas, peneliti menganalisis bahwasanya memang benar adanya workshop dan demonstrasi batik utusan Pemda DIY di Thailand pada tahun 2020, demonstrasi batik itu memperagakan proses dalam pembuatan batik mulai dari mencating, pewarna hingga menghilangkan lilin malam. Hal ini menunjukan bahwa produk-produk pelaku UMKM Panggungharjo sudah internasional, sudah dilihat dunia. Hal ini tentunya membawa dampak yang baik agar pelaku UMKM yang lainnya juga dapat terinspirasi dari Ibu Dwi Hening agar tetap berkembang. Kemudian menurut pengamatan peneliti bahwasanya ibu Dwi Hening juga aktif dalam iven-iven

tertentu dan memiliki banyak penghargaan terkait demonstrasi batik ini. Kesimpulanya jadi didalam menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai kebutuhan pasar pelaku UMKM Panggungharjo membuat sekreatif mungkin produk-produk mereka yang menyesuaikan pasar dan untuk pemasarannya online maupun offline jadi memudahkan mereka untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan pasar. Kemudian produk mereka juga sudah dikenal di negara-negara lain hal ini tentunya membawa dampak positif bagi pemasarannya karena sudah internasional dan menjadi motifasi bagi pelaku UMKM lainnya agar terus berkembang.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi untuk meningkatkan kualitas baru sesuai pasar saya melihat pasar yang sekarang bahwa dalam hal cita rasa dan pengemasan juga butuh untuk ditingkatkan mba seperti usaha saa kan ampyang coklat jadi saya menambahkan varian baru seperti biji mari, telur bebek dengan tambahan bahan lain tanpa pengawet yang tentunya aman, halal dan sehat kemudian pengemasan yang aman dan menarik. Hal ini tentunya memikat minat konsumen untuk membeli. Untuk pemasarannya saya secara offline dan online karena banyak yang sudah tau. Kemudian mba prosuk saya ini juga sudah tembus pasar dunia”(wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Ani diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa untuk menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar maka ibu ani memperhatikan cita rasanya dengan cara menambahkan beberapa varian baru seperti biji mari dengan tambahan bahan lain yang tentunya aman, halal dan sehat, kemudian menggunakan telur bebek, dan pembuatannya tanpa bahan pengawet jadi tentunya halal dan yang membedakanya dengan produk lainnya. Kemudian pengemasan yang rapi dan aman juga dapat menarik peminat

konsumen karena pasti sudah terjamin baik dari segi rasa maupun pengemasanya. Produk ibu ani ini juga pemasarnya sudah tembus dunia. Dari gambar ampayng coklat di samping, peneliti menganalisis bahwa didalam penggunaan bahanya juga sudah berbeda dengan produk yang sejenis lainnya. Oleh karena itu tekstur dan rasanya juga tentunya berbeda.

**Gambar 3. 15 Produk Ampyang coklat**



Sumber: @ampyangcoklat-yk /17/01/2025

Berdasarkan pengamatan peneliti melihat juga bahwasanya di dalam pemasarnya juga sudah tembus dunia banyak yang sudah pesan lewat sosial medianya. Hal ini berarti kualitas cita rasa dan pengemasanya sudah aman halal dan pastinya tidak pakai pewarna. Kesimpulanya pelaku UMKM di Panggunharjo di dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar ada yang sudah baik yang didukung juga dengan pemasarannya yang sudah tembus dunia hal ini menunjukan bahwa dalam hal cita rasa dan pengemasanya pasti sudah enak dan menarik sehingga bisa menembus pasar dunia.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Produk saya kan kacang rempah artinya kacang tanah yang di campurin rempah-rempahan. Jadi kacang tanahnya saya harus pastikan bahwa itu baik dan tidak tengkik, kemudian saya tidak menggunakan bahan pengawet. Awalnya mba ini produk saya hanya kacang tanah sendiri, tetapi setelah saya melakukan pengamatan bahwa kalau hanya kacang saja itu tidak terlalu menarik konsumen karena mereka bosan. Oleh karena itu saya menambahkan rempah-rempahnya seperti rempah aromatik itu ada daun jeruk, serei dan rempah manis lainya mba, untuk menambah daya jual produk saya” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa di dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar ibu martina sudah menambahkan rempah-rempahan aromatik dan manis di dalam kacangnya. Ini merupakan satu inovasi yang dilakukan pelaku UMKM Panggunharjo untuk menyesuaikan dengan kebutuhan pasar. Karena mereka melihat bahwa kalau tidak adanya inovasi berarti produk mereka tidak akan berkembang. Berdasarkan gambar produk kacang rempah disamping peneliti menganalisis bahwa untuk pengemasanya juga sudah bagus dan tersedia beberapa ukuran.

**Gambar 3. 16 Produk Kacang Rempah**



*Sumber: Dokumen peneliti, 27/12/2024*

Hal ini bisa menyakinkan konsumen bahwa pengemasannya juga bagus berarti cita rasanya juga enak. Berdasarkan pengamatan peneliti melihat juga bahwa produk yang dihasilkan ini bagus dan untuk cita rasanya juga sesuai dengan rempah-rempahnya yang membuat beda dengan kacang-kacang lainnya. Kesimpulanya di dalam menciptakan inovasi sesuai kebutuhan pasar pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo memiliki berbagai inovasi untuk tetap terus berkembang dengan menciptakan hal-hal yang baru untuk produk mereka agar tetap bersaing di pasar.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Yang usaha peyek disini Panggungharjo juga kan banyak mba jadi saya usahakan untuk membuat varian rasanya berbeda dengan yang lain. Untuk cita rasanya dari awal sampai sekarang tidak berubah karena didalam pembuatan peyek untuk bahan-bahannya saya selalu timbang dulu, kemudian pemilihan kacang tanah juga saya usahakan yang asli, jadi sesuai takaranya masing-masing oleh karena itu rasanya tidak pernah berubah-ubah” (wawancara pada tanggal 24 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Amin diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa di dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar pelaku UMKM di Panggungharjo menciptakan inovasi baru untuk produk mereka agar dapat bersaing di pasar. Walaupun banyak produk yang sama tetapi secara kreatif mereka membutnya berbeda satu dengan yang lainya. Dari gambar dokumen peneliti di samping peneliti menganalisis bahwa jika dilihat dari segi teksturnya sudah bagus karena di dalam pembuatanya juga menggunakan bahan-bahan yang baik yang tentunya aman dan sesuai takaranya juga.

**Gambar 3. 17 Produk Peyek**



*Sumber: Dokumen peneliti, 24/12/2024*

Berdasarkan pengamatan peneliti juga bahwasanya produk peyek ini enak dan gurih memiliki cita rasa khas tersendiri dan pasti harganya juga terjangkau. Tetapi disini untuk pengemasanya belum terlalu mendukung karena masih menggunakan kemasan plastik. Hal ini yang menyebabkan peyek tidak bisa bertahan lama di suhu udara terbuka. Kesimpulanya untuk menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar pelaku UMKM mencari cara agar produk mereka tetap berkembang dengan membuat cita rasa yang berbeda dengan produk yang lainnya. Tetapi disini untuk pengemasanya belum terlalu mendukung karena masih menggunakan plastik hal ini perlu evaluasi lagi pelaku UMKM karena dengan pengemasan yang bagus juga dapat meningkat daya jual dan daya beli para konsumen.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Daniman selaku Pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Batik saya kan batik pengantin dengan teknik tulis, dan didalam pembuatanya saya menggunakan pewarna alami mba, jadi untuk pengerjaanya agak lama dan tergantung juga dari motifnya. Motifnya juga berbeda-beda tergantung juga dari konsumenya maunya yang bagaimana. Disini Kalurahan ada juga usaha yang sama tetapi pastinya kualitasnya

berbeda-beda juga ya tergantung bagaimana cara pembuatanya dan tentu dapat dilihat dari hasilnya juga. Kemudian untuk pengemasanya saya juga sudah membuatnya dalam hampers jadi daya jual saya ada mba” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Daniman selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa di Panggunharjo banyak juga usaha yang sejenis tetapi dengan kreatifitas dan inovasi pelaku UMKM membuat produk mereka berbeda satu dengan produk yang lain sehingga mereka miliki daya jualnya masing-masing. Kemudian dalam hal pengemasan juga menjadi penting karena dapat menarik konsumen untuk membelinya.

**Gambar 3. 18 Pembuatan Batik**



*Sumber: Dokumen peneliti, 23/12/2024*

Dari gambar dokumen peneliti disamping maka peneliti menganalisis bahwa untuk pembuatan batik ini masih menggunakan teknik tradisional oleh karena itu di dalam pembuatanya membutuhkan waktu yang cukup lama dan pastinya produk yang dihasilkan juga bagus karena menggunakan pewarna alami. Menurut pengamatan peneliti melihat juga bahwasanya kreatifitas dan

inovasi dalam membuat batik tanpa menjiplak milik orang lain dan motif-motifnya juga tidak monoton selalu berubah-ubah tergantung juga dengan konsumenya. Kesimpulanya pelaku UMKM di Panggungharjo sudah menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar yang mana mereka berusaha untuk menciptakan motif-motif yang baru, kemudian pengemasan yang menarik sehingga tidak monoton ataupun menjiplak hasil karya orang lain.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku Koordinator Rumah Produksi Komunitas, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi disini RPK kami melakukan pelatihan dan pendampingan secara berkala dalam hal untuk meningkatkan keterampilan pelaku UMKM didalam hal produksi, pengemasan bahkan pemasarnya, kami lakukan preferensi dan riset pasar sehingga nanti mereka bisa menyesuaikan produk mereka sesuai kebutuhan pasar. Kemudian kami memfasilitasi jaringan produksi termasuk komunitas yang menjadi mitra kami seperti transmart” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aisyah selaku koordinator RPK diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa di RPK ini dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar mereka memfasilitasi pelaku UMKM didalam hal produksi, pengemasan dan pemasaran yang mana hal ini sangat membantu pelaku UMKM didalam mengembangkan produk yang inovatif. Kemudian di RPK juga memperluasa pasar melalui jaringan transmart di Jawa yang memudahkan pelaku UMKM untuk memperluas pemasaran mereka juga.

**Gambar 3. 19 Pemasaran di Show Room RPK**



*Sumber: Website Kalurahan Panggungharjo, 23/12/2024*

Menurut pengamatan peneliti juga melihat bahwasanya di RPK mereka memfasilitasi pelaku UMKM yang tidak memiliki tempat untuk produksi, kemudian pemasaran baik di show room maupun lewat jaringan transmart di Jawa. Selain itu pendampingan dan pelatihan juga diimbangi. Berdasarkan gambar dokumen di samping peneliti juga menganalisis bahwa di RPK ada show room untuk pemasaran. Kesimpulanya di RPK ini pelaku UMKM di fasilitasi dan dibina dalam hal produksi produk, pengemasan dan pemasaran.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diaats maka peneliti menyimpulkan bahwa didalam menciptakan inovasi-inovasi baru sesuai kebutuhan pasar pelaku UMKM Panggungharjo membuat sekreatif mungkin produk-produk mereka yang menyesuaikan pasar dan untuk pemasarannya online maupun offline jadi memudahkan mereka untuk bisa menyesuaikan dengan perkembangan pasar Kemudian produk mereka juga sudah di kenal di negara-negara lain hal ini tentunya membawa dampak positif bagi pemasarannya karena sudah internasional dan menjadi motifasi bagi pelaku UMKM lainnya agar terus

berkembang. Di Panggungahrjo juga ada RPK yang mana mereka yang bergabung di RPK di fasilitasi dan dibina dalam hal produksi produk, pengemasan dan pemasaran. oleh karena itu mereka cepat berkembang sedangkan pelaku UMKM yang tidak gabung dalam RPK mereka mengalami beberapa kendala seperti pengemasanya yang belum terlalu mendukung karena masih menggunakan plastik hal ini perlu evaluasi lagi pelaku UMKM karena dengan pengemasan yang bagus juga dapat meningkat daya jual dan daya beli para konsumen.

## **7. Upaya pelaku UMKM didalam mengatasi keterbatasan fasilitas produksi dan dampaknya**

Pelaku UMKM sering mengalami permasalahan dalam fasilitas produksi, seperti kekurangan peralatan modern, dan ruang produksi yang terbatas. Untuk mengatasi hal tersebut, pelaku UMKM biasanya melakukan upaya, walaupun dengan keterbatasan fasilitas. Dan dampaknya bisa seperti produksi tidak berjalan dengan baik itu dari segi waktu maupun kualitas oleh karena itu sulit bersaing dengan produk lain yang dibuat dengan fasilitas yang modern sehingga membatasi pertumbuhan mereka. Maka dilakukan wawancara dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk sekarang fasilitas yang saya dapatkan seperti tempat produksinya, bahan bakunya, dan sumber daya energi sudah baik apalagi saya sekarang sudah bergabung di RPK jadi disana difasilitasi. Jadi RPK ini dapat memberikan manfaat bagi usaha kami mba, dengan adanya RPK kami juga memiliki akses pasar yang luas, pelatihan-pelatihan yang tentunya membuat usaha kami semakin berkembang. Jadi saya sejauh ini masih aman-aman saja kalau untuk fasilitas”. (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Dwi Hening diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Dengan adanya RPK ini memberikan dampak yang sangat baik untuk perkembangan UMKM dan mengurangi hambatan yang sering dihadapi UMKM. Dengan fasilitas yang mendukung seperti tempat produksi yang aman, sehat dan halal kemudian pastinya didukung juga dengan sumber daya energi. Dengan aspek pasar yang lebih luas dapat membantu dan menjadi peluang besar bagi pelaku UMKM untuk menjangkau konsumen dan meningkatkan daya saing produk. Menurut pengamatan peneliti melihat bahwasanya untuk pelaku UMKM yang bergabung di RPK sangat terbantu karena mereka difasilitasi dan didampingi baik dalam produksi, pemasaran teknologi dan regulasi. Kesimpulanya yang bergabung dengan RPK memberikan manfaat yang signifikan bagi pertumbuhan UMKM, terutama dalam bidang akses pasar, peningkatan keterampilan melalui pelatihan, dan fasilitas operasional. Berkat RPK, usaha mempunyai lebih banyak peluang untuk tumbuh secara berkelanjutan, lebih kompetitif di pasar, dan lebih efisien dalam mengelola proses produksi dan distribusinya. Keberhasilan pemanfaatan fasilitas yang tersedia akan menunjukkan bahwa usaha tertentu dapat tumbuh dan beradaptasi terhadap perubahan kondisi pasar.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya:

“Sekarang fasilitas yang saya dapatkan seperti tempat produksinya, dan sumber daya energi sudah baik mba apalagi saya sekarang sudah bergabung di RPK jadi disana difasilitasi. Jadi dalam RPK ini dapat memberikan manfaat bagi usaha kami, dengan adanya RPK kami juga memiliki akses pasar yang luas, pelatihan-pelatihan yang kami dapatkan yang tentunya membuat usaha kami semakin berkembang. Jadi untuk saya

sejauh ini masih aman-aman saja kalau untuk kendala fasilitas karena bisa dijangkau” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil hasil wawancara peneliti dengan Ibu Ani selaku pelaku UMK di Panggunharjo diatas maka peneliti menganalisis bahwa dengan adanya program RPK ini dapat membantu pelaku UMKM didalam mengembangkan usaha mereka termasuk memfasilitasi tempat produksi yang aman, sehat dan halal agar produk yang dipasarkan dapat diterima di pasar luas, kemudian dalam hal pengemasan produk, bahakan pemasaran kami difasilitasi di melalui RPK oleh karena itu keberadaan RPK ini membantu pelaku UMKM. Menurut pengamatan peneliti melihat bahwasanya untuk pelaku UMKM yang bergabung di RPK, untuk fasilitas mereka merasa aman karena difasilitasi. Kesimpulanya untuk pelaku UMKM di Panggunharjo yang bergabung di RPK mereka difasilitasi dari segimanapun tergantung kebutuhan masing-masing pelaku UMKM tetapi yang tidak bergabung di RPK mereka mengalami kesulitan dalam fasilitas

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk sekarang penyediaan fasilitas yang saya dapatkan seperti tempat produksinya, dan sumber daya energi sudah baik mba apalagi saya sekarang sudah bergabung di RPK jadi disana pelaku UMKM difasilitasi. Jadi semuanya sudah ada hanya saja kembali ke diri masing-masing mba, kalau mau usahanya tetap maju maka harus memanfaatkan fasilitas yang disediakan secara baik. Jadi untuk kendala fasilitas mba sejauh ini saya aman-aman” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Martina selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa dengan adanya program RPK ini dapat membantu pelaku UMKM didalam mengembangkan usaha mereka termasuk

memfasilitasi tempat produksi yang aman, sehat dan halal agar produk yang dipasarkan dapat diterima di pasar luas. Menurut pengamatan peneliti bawasanya untuk pelaku UMKM yang bergabung di RPK mereka difasilitasi, tetapi untuk pelaku UMKM yang tidak bergabung di RPK mengalami beberapa kesulitan fasilitas. Kesimpulanya untuk pelaku UMKM di Panggunharjo yang bergabung di RPK mereka difasilitasi tetapi yang tidak bergabung di RPK mereka mengalami kesulitan dalam fasilitas.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya kan mandiri ya mba jadi untuk fasilitas juga sendiri baik dari tempat produksinya, bahan bakunya, dan sumber daya energi. Jadi disini kendala saya itu seperti tempat produksi yang belum mendukung karena masih menggunakan alat-alat yang sederhana oleh karena itu untuk produksinya juga membutuhkan waktu yang lama, kemudian untuk bahan bakunya kalau ketika naik berarti saya belum bisa produksi mba. Jadi kendalnya saya itu di tempat produksi, bahan baku untuk produksi dan pemasaran” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Berdasarkan hasil hasil wawancara peneliti dengan Ibu Martina selaku pelaku UMK di Panggunharjo diatas maka peneliti menganalisis bahwa masih terdapat pelaku UMKM yang masih bergelut dengan kesusahan dalam produksi dikarenakan keterbatasan dalam rumah produksinya dan juga dalam hal permodalan serta pemasaran hasil produksi. Oleh karena itu diharapkan dengan dilakukan wawancara ini peneliti berharap melalui hasil nya pemerintah Kalurahan Panggunharjo dapat lebih mendata lagi soal keanggotaan di program RPK yang di telah diselenggarakan, demi menjamin keadilan dan pemerataan

bantuan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo kepada semua pelaku UMKM yang ada. Kesimpulanya sudah ada program dari pemerintah Panggunharjo mengenai fasilitas produksi. Tetapi dari program ini belum memberikan manfaat secara menyeluruh karena masih ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang belum merasakan dampak dari program itu.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya kan mandiri jadi untuk fasilitas juga sendiri baik tempat produksinya, bahan bakunya, dan sumber daya energi saya usahakan sendiri. Jadi disini kendala saya ya seperti tempat produksi yang masih sederhana-sederhana saja, jadi membutuhkan waktu yang lama ketika banyak pesanan dari konsumen, kemudian bahan baku juga kalau kalau naik berarti produksinya juga menurun mba jadi dampaknya terasa” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat pelaku UMKM yang belum menjadi anggota dari program RPK. Dikatakan bahwa pelaku usaha dengan kurangnya sumberdaya rumah produksi, dia kesulitan dalam hal pemenuhan pesanan dalam jumlah besar, oleh karena itu kembali diharapkan pemerintah Kalurahan Panggunharjo dapat membantu dalam soal produksi ini dengan adanya program RPK ini. Dan juga lewat program RPK ini dapat meningkatkan kemandirian serta penguatan UMKM yang ada di Kalurahan Panggunharjo. Kesimpulanya masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung dengan RPK yang merupakan salah satu program dari pemerintah Panggunharjo didalam membantu UMKM. Oleh

karena itu diharapkan pemerintah Kalurahan Panggunharjo mengevaluasi program tersebut agar pertumbuhan UMKM merata.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas maka, peneliti menyimpulkan bahwa dalam menjawab tantangan yang di hadapi oleh pelaku UMKM baik dari modal, produksi dan pemasaran serta kemasan. Pemerintah Kalurahan Panggunharjo menjawab kendala tersebut dengan menghadirkan produk RPK dimana didalam RPK ini terdapat rumah produksi dan akses pemasaran dari hasil produksi nya. Oleh karena dari sekian tantangan yang ada dapat terjawab oleh kehadiran dari RPK ini. Dan juga demi optimalisasi dari program RPK ini, pemerintah diharapkan lebih teliti dalam menjaring keanggotaan dikarenakan masih banyak pelaku UMKM diluar sana yang belum terdata dan merasakan dari kehadiran program pemerintah ini, oleh karena di diharapkan pemerintah Kalurahan Panggunharjo lebih teliti dalam menjaring keanggotaan dan mengevaluasi program ini agar pertumbuhan UMKM di Panggunharjo merata

## **8. Upaya Pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam menyediakan platform digital bagi pelaku UMKM**

Pemanfaatan platform digital menjadi salah satu strategi penting dalam pengembangan UMKM, apalagi di era yang semakin digital ini. Dengan bantuan teknologi dan internet, UMKM dapat meningkatkan daya saing pasar, meningkatkan efisiensi usaha, dan menciptakan merek yang lebih kuat. Salah satu manfaat utama platform digital adalah kemudahan distribusi dan pemasaran produk. UMKM dapat menggunakan platform media sosial seperti Facebook,

Instagram, dan TikTok untuk mempromosikan produknya secara lebih efektif. Selain itu, online marketplace seperti Shopee, Tokopedia, dan Bukalapak memberikan peluang bagi UMKM untuk menjangkau pelanggan di berbagai daerah tanpa memerlukan etalase fisik. Dengan strategi pemasaran digital yang efektif, UMKM dapat meningkatkan visibilitas produknya dan menarik lebih banyak pelanggan. Hal ini juga dibutuhkan dukungan dari pemerintah Kalurahan didalam menyediakan akses teknologi bagi pelaku UMKM, agar dapat memudahkan pelaku UMKM dalam pemasaran dan bisa beradaptasi dengan perubahan pasar.

Untuk itu dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi didalam pemanfaatan platform digital kami mempunyai salah satu program digitalisasi mengenai pengembangan UMKM dengan nama pasar id. untuk pelaku UMKM di Panggungharjo memasarkan produk mereka secara online, kemudian pelatihan dan pendampingan seperti workshop digital marketing, kemudian kami menjalin kerja sama dengan berbagai pihak dalam mengembangkan UMKM melalui platform digital” (wawancara pada tanggal 23 Dseember 2024)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan Lurah Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa upaya pemerintah Kalurahan Panggungharjo didalam membantu pelaku UMKM adalah menyediakan platform digital. Melalui pasar id, masyarakat dapat memesan produk secara online yang kemudian nanti akan diantrakan ke rumah konsumen. Pasar id juga sebagai sarana digitalisasi produk-produk lokal yang memungkinkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka ke pasar internet yang luas. Inisiatif pemerintah ini tidak hanya menjaga stabilitas

ekonomi lokal tetapi juga mendorong digitalisasi UMKM di Panggunggarho. Selain itu pelatihan dan pendampingan terkait pemanfaat platform digital seperti workshop digital marketing dan pelatihan fotografi produk. Kemudian dalam hal kerja sama pemerintah Kalurahan membangun kerja sama dengan pihak swasta agar pemasaran dapat menjangkau pasar luas.

**Gambar 3. 20 Pelatihan Workshop digital marketing**



*Sumber: Website Kalurahan Panggungharjo, 23/12/2024*

Menurut gambar dokumentasi peneliti menganalisis bahwa pelatihan dan pendampingan dalam meningkatkan digitalisasi UMKM salah satunya adalah workshop digital marketing yang dilakukan di kampoeng mataram. Pelatihan ini bertujuan untuk memperkenalkan manfaat penggunaan digital marketing bagi pelaku UMKM dengan tujuan agar dapat meningkatkan jangkauan pasar, agar produk lebih terkenal di daerah maupun luar negeri melalui media sosial, marketplace dan website. Kemudian menurut pengamatan peneliti juga melihat bahwasanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah Kalurahan Panggungharjo dalam membantu pengembangan UMKM sudah baik karena pelatihan-pelatihan seperti ini sangat membantu pelaku UMKM didalam mengembangkan usaha mereka. Kesimpulanya adanya upaya dukungan dari pemerintah Kalurahan

Panggunharjo didalam membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan produk-produk melalui platform digital dengan jangkauan yang lebih luas, biaya yang lebih hemat, dan strategi yang lebih efektif, usaha mereka dapat tumbuh lebih cepat di era digital.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ari Suryanto selaku Lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Upaya-upaya terus kami lakukan dalam mendukung pengembangan UMKM tentunya dengan program yang ada, seperti RPK yang disana kemudian mereka difasilitasi dan didampingi, kemudian kami juga bergabung dengan program Si Bakul yang melakukan pelatihan dan pendampingan untuk para pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Hal ini kami upayakan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital mulai dari pemasaran online, pengelolaan keuangan dengan dan penggunaan platform e-commerce dalam menjangkau pasar yang luas” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Ari Suryanto selaku Lurah Panggunharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa adanya upaya-upaya yang dilakukan pemerintah didalam meningkatkan pengembangan UMKM melalui digitalisasi, seperti fasilitas RPK yang mana disana pelaku UMKM didampingi dalam hal digitalisasi juga adanya pelatihan mengenai keuangan dalam digitalisasi, pemasaran online menggunakan media sosial seperti facebook, instagram dan tik-tok. Selain itu ada program pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh Dinas Koperasi UKM di DIY yang bekerja sama dengan pemerintah Kalurahan. Menurut gambar peneliti dibawah bahwasanya adanya pelatihan dan pendampingan yang dilakukan oleh SiBakul dalam mendukung UMKM. Pelatihan ini bertujuan untuk membantu UKM untuk memanfaatkan teknologoi digital didalam mengembangkan usaha mereka.

**Gambar 3. 21 Pelatihan Workshop digital marketing**



*Sumber: Website Kalurahan Panggungharjo, 23/12/2024*

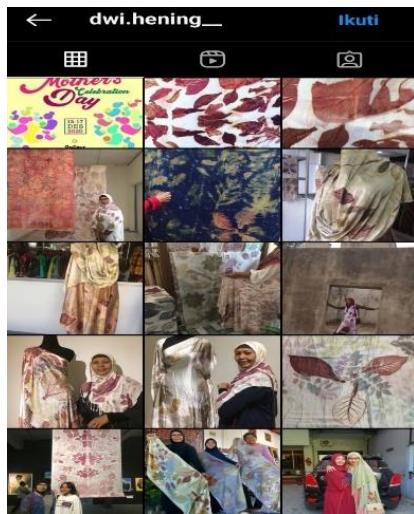
Berdasarkan pengamatan peneliti juga melihat bahwasanya adanya pelatihan dan pendampingan terkait digital marketing bagi pelaku UMKM di Panggungharjo. Kesimpulanya adanya upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan didalam meningkatkan pengembangan UMKM hal ini membawa dampak yang baik bagi pelaku UMKM.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi untuk usaha saya sudah memanfaatkan media sosial seperti instagram, wa dan facebook dengan menggunakan media sosial saya sangat terbantu di dalam hal intereaksi yang lebih dekat dengan konsumen, menjangkau banyak pelanggan, dan mempermudah proses promosi dan transaksi. Kemudian di RPK juga kami dibantu dalam hal pemotretan produk menggunakan perangkat digital, kemudian pembuatan akun media sosial untuk penjualan jadi usaha saya sangat terbantu dengan adanya platform digital” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada pelaku UMKM di Panggungharjo yang sudah menggunakan media sosial didalam mempromosikan produk-produk mereka.

**Gambar 3. 22 Media sosial UMKM**



*Sumber: Dokumen @Dwi. Hening 25/12/2024*

Dengan menggunakan media sosial memberikan dampak yang baik bagi pelaku UMKM karena mudah berinteraksi dengan konsumen secara online, mempermudah proses promosi dan transaksi karena melalui media sosial pelaku UMKM dapat mempromosikan produk-produk mereka agar dapat dijangkau dan lebih praktis karena bisa juga pemesanan lewat online dan transaksi digital seperti transfer bank. Jadi platform digital memberikan banyak manfaat yang besar bagi pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka. Selain itu di RPK juga pelaku UMKM diberi pelatihan seperti mendaftar akun media sosial untuk penjualan, kemudian latihan pemotretan produk dengan perangkat digital yang dilakukan untuk menarik perhatian konsumen. Menurut gambar dokumen disamping menunjukkan bahwa pelaku UMKM sudah menggunakan media sosial untuk mengembangkan usaha mereka lewat media sosial juga pelaku UMKM dapat mempromosikan produk-produk mereka secara online yang pastinya dapat diketahui oleh banyak konsumen. Menurut pengamatan peneliti bahwa pelaku UMKM yang sudah menggunakan media sosial sangat terbantu, karena disana

produk-produk mereka dapat bersaing dengan produk-produk lain dan dapat meningkatkan digital ekonomi lokal. Dan adanya perbedaan ketika sebelum dan sesudah menggunakan media sosial, karena yang dulunya promosi door-to-door sekarang bisa dua-duanya jadi adanya peningkatan daya saing. Kesimpulannya ada pelaku UMKM yang sudah memanfaatkan media sosial secara baik dan benar di dalam mengembangkan usaha mereka dan dibantu juga dengan hadirnya program dari pemerintah yaitu RPK.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya sudah memanfaatkan media sosial seperti WA , dan Instagram baik di dalam hal pemasaran, promosi dan transaksi. Sebelum saya bergabung di RPK saya belum ada media sosial setelah bergabung saya sudah menggunakan media sosial untuk usaha saya. Jadi di RPK ini kami dilatih dalam hal pemotretan produk menggunakan perangkat digital, kemudian pembuatan akun media sosial untuk pemasaran. Jadi saya merasa saat menggunakan media sosial saya sangat terbantu, tetapi belum terlalu lancar karena saya juga masih belajar” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, maka peneliti dapat menganalisis bahwa dengan memanfaatkan keberadaan media sosial ini pelaku UMKM Panggunharjo mengambil kesempatan untuk mengembangkan usaha mereka. Karena setelah menggunakan media sosial seperti WA dan instagram memberikan dampak yang baik bagi usaha mereka terutama pada saat bergabung di RPK. Di dalam hal membuat akun media sosial pelaku UMKM yang bergabung di RPK dibantu yang belum memiliki akun media sosial dibantu untuk dibuatkan kemudian latihan pemotretan produk juga dilatih agar ketika dipromosikan produk-

produk tersebut kelihatan rapi dan bisa menarik daya beli konsumen. Jadi setelah menggunakan media sosial manfaat yang dirasakan seperti bisa memiliki akun media sosial, dan bisa memotret hasil produk sendiri yang akirnya bisa membantu pelaku UMKM Panggungharjo untuk memanfaatkan media sosial dengan baik untuk usaha mereka agar tetap berkembang. Menurut gambar dokumen peneliti di bawah ini peneliti dapat menganalisis bahwa pelaku UMKM Panggungharjo benar-benar memanfaatkan media sosial untuk usaha mereka.

**Gambar 3. 23 Media sosial UMKM**



*Sumber: Dokumen @aniko-ampyangcoklatyk 25/12/2024*

Hal ini memberikan dampak yang positif bagi pelaku UMKM karena dapat memperluas jangkaun pasar. Kemudian berdasarkan pengamatan peneliti juga melihat bahwasanya pelaku UMKM yang benar-benar berusaha ingin usahanya tumbuh dan berkembang akan terus melakukan upaya-upaya untuk usahanya, oleh karena itu untuk mempelajari sesuatu yang baru mereka tetap mau berbenah untuk usaha mereka kedepanya. Kesimpulanya pelaku UMKM sudah

memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan usaha mereka walaupun masih di tahap belajar, kemudian di dukung juga dengan keberadaan RPK yang memberikan pelatihan dan pendampingan terkait manfaat dari media sosial.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Saya bergabung di RPK yang menjadi salah satu program dari pemerintah Kalurahan, tetapi di dalam menggunakan media sosial saya belum sama sekali hal ini disebabkan karena umur saya sudah tua jadi untuk daya tangkapnya sudah agak lemah, kemudian perbedaan zaman juga ya karena makin kesini semuanya serba digital tetapi saya sulit menyesuaikan. Walaupun di RPK ini kami di latih dan diberi dampingan terus tetapi saya sendiri belum bisa tangkap dan kadang-kadang juga lupa” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah Kalurahan sudah mengupayakan program seperti adanya RPK untuk membantu pelaku UMKM di dalam mengembangkan usaha mereka termasuk memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan usaha mereka. Pelatihan di RPK ini seperti pelatihan di dalam membuat akun media sosial untuk mempromosikan produk-produk mereka agar dapat dikenal di pasar luas, kemudian pelatihan untuk pemotretan produk untuk di promosikan agar dapat menarik perhatian konsumen. Kemudian ada pelatihan dari Kalurahan terkait workshop digital marketing yang membantu pelaku UMKM di Panggunharjo untuk memanfaatkan teknologi digital didalam mengembangkan usaha mereka. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya memang ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang belum memanfaatkan media sosial untuk usaha mereka karena faktor umur dan ketidakpercayaan diri untuk mau berkembang. Oleh

karena itu perlu upaya dari pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam melihat masalah ini agar dapat melakukan pendekatan dengan pelatihan-pelatihan yang intesif agar pelaku UMKM selalu percaya diri di dalam mengembangkan usaha mereka. Kesimpulanya masih ada pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo yang belum memanfaatkan media sosial di dalam mendukung usahanya walaupun sudah beberapa kali melakukan pelatihan dan pendampingan terkait penggunaan media sosial. Hal ini perlu upaya dari pemerintah Kalurahan Panggunharjo untuk melakukan pelatihan dan dampingan yang lebih insentif agar dapat membangun kepercayaan diri pelaku UMKM.

Hal berbeda yang disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya ini mandiri dan tidak memanfaatkan media sosial dalam hal promosi maupun pemasaran mba. Mungkin ada pelatihan dan pendampingan di Kalurahan terkait platform digital tetapi untuk saya sendiri tidak tau karena saya juga belum pernah ikut pelatihan dan pendampingan tersebut untuk itu saya lebih sendiri saja dalam usaha saya. Saya juga umurnya sudah tua dan untuk penggunaan media sosial seperti instagram, facebook dan tik-tok saya tidak terlalu pandai. Saya hanya menggunakan wa saja semata itupun kalau ada yang pesan lewat wa kalau tidak seperti biasa saya langsung ke pasar ataupun warung-warung” (wawancara pada tanggal 26 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa masih adanya pelaku-pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo yang belum memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan usaha mereka. Hal ini disebabkan karena faktor umur dan ketidakpercayaan diri karena perbedaan zaman yang semakin modern. Padahal pemerintah Kalurahan sudah membuat pelatihan dan

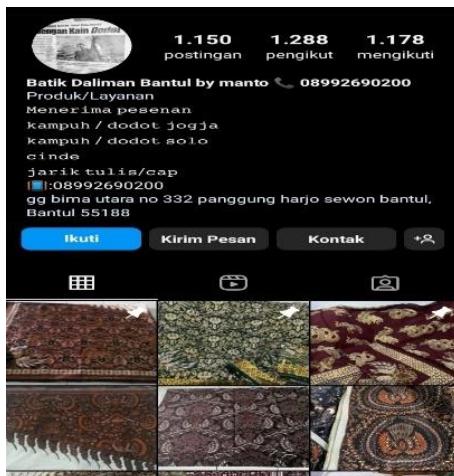
pendampingan terkait manfaat dari penggunaan media sosial bagi pelaku UMKM. Tetapi disini masih ada pelaku UMKM yang tidak tahu terkait pelatihan dan pendampingan tersebut hal ini disebabkan karena beberapa faktor seperti kurangnya akses informasi terkait pelatihan dan pendampingan dari website, maupun grup Kalurahan kemudian minimnya sosialisasi yang menjangkau pelaku UMKM yang tidak terlalu aktif di dalam komunitas UMKM. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya kurangnya akses informasi dan minimnya sosialisasi ini juga yang menyebabkan pelaku UMKM tidak bergabung atau tahu terkait pelatihan dan pendampingan mengenai pengembangan UMKM melalui manfaat media sosial bagi usaha mereka, kemudian masalah umur dan ketidakpercayaan diri di dalam menggunakan media sosial hal ini yang menjadi tantangan bagi pelaku UMKM karena jika mereka tidak selalu berusaha maka usaha mereka akan tetap stak di tempat dan tidak berkembang. Kemudian dibutuhkan strategi dari pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam kanal informasi baik di dalam website Kalurahan, grup Wa, dan kunjungan langsung agar informasi mudah diakses. Kesimpulannya dibutuhkan upaya yang strategis dari pemerintah Kalurahan Panggunharjo di dalam memberikan informasi terkait pelatihan dan pendampingan agar semua pelaku UMKM dapat mengakses informasi tersebut karena masih ada pelaku UMKM yang belum terlibat dalam pelatihan dan pendampingan yang tersedia.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam usah saya sudah menggunakan media sosial seperti instagram pada saat awal-awal covid-19 dan sampai sekarang saya masih menggunakan karena menurut saya ini sangat bermanfaat bagi saya apalagi usaha saya mandiri apa-apa sendiri jadi harus lebih berinovasi kedepan agar usaha saya tetap berkembang. Memang benar adanya perbedaan saat tidak menggunakan media sosial dan saat menggunakan media sosial, seperti dulunya yang tau tentang produk saya hanya masyarakat di sekitar Panggungharjo, tetapi sekarang banyak yang sudah tau bahkan memesan lewat online juga. Untuk program dari pemerintah terkait platform digital memang ada tetapi saya tidak tau pasti karena tidak bergabung di dalam pelatihan maupun pendampingan semuanya saya sendiri karena masih adanya rasa kecewa dengan pemerintah Kalurahan” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Daniman selaku pelaku UMKM di Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa walaupun usahanya mandiri pelaku UMKM di Panggungharjo tetap memanfaatkan media sosial seperti instagram untuk mempromosikan produk-produknya agar dapat menarik perhatian konsumen untuk membeli. Terdapat adanya perbedaan saat menggunakan media sosial dan belum menggunakan media sosial seperti pembelinya semakin meningkat, kemudian kemudahan di dalam bersaing dengan produk yang sejenis dan semakin terkenal tentunya membawa dampak yang positif bagi usaha mereka. Kemudian untuk program dari pemerintah memang ada tetapi ada pelaku UMKM yang memilih untuk tidak bergabung karena faktor kesibukan dengan usaha dan ketidak percayaan kepada pemerintah karena pernah dikecewakan. Berdasarkan dokumen gambar dibawah ini menunjukan bahwa adanya media sosial yang benar-benar digunakan oleh pelaku UMKM didalam mengembangkan usaha mereka.

**Gambar 3. 24 Media sosial UMKM**



*Sumber:Dokumen @BatikDaliman 25/12/2024*

Menurut pengamatan peneliti bahwasanya ada pelaku UMKM yang usahanya mandiri tetapi bisa memanfaatkan media sosial untuk perkembangan usahanya seperti promosi, dan pemasaran tanpa campur tangan dari pemerintah Kalurahan tetapi hal ini mendapatkan sisi positif dan negatif. Jika dilihat dari sisi negatifnya pelaku UMKM membatasi akses bantuan dari pemerintah, sedangkan sisi positinya kemandirian usaha. Hal ini perlunya upaya dari pemerintah Kalurahan di dalam mendorong sosialisasi program agar pelaku UMKM yang mandiri juga bisa mengetahui program yang telah dibuat dan adanya transparansi komunikasi agar pelaku UMKM dapat kembali mempercayai pemerintah Kalurahan. Kesimpulanya bahwasanya ada pelaku UMKM yang usahanya mandiri tetapi bisa memanfaatkan media sosial untuk mengembangkan usahanya seperti promosi dan pemasaran tanpa harus melibatkan pemerintah Kalurahan.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya upaya dan dukungan dari pemerintah Kalurahan Panggungharjo didalam membantu pelaku UMKM untuk

mengembangkan produk-produk mereka melalui platform digital seperti media sosial contohnya WhatsApp pelaku UMKM bisa memungkinkan membuat profil bisnis yang lengkap dengan katalog produk, alamat, serta jam operasionalnya agar mudah dimengerti. Kemudian Instagram yang mana pelaku UMKM dapat menampilkan produk dengan tampilan yang menarik untuk meningkatkan daya tarik visual, dan informasi promosi cepat, dan Facebook yang mana dapat menjual produk secara langsung kepada konsumen disekitar wilayah terdekat bahkan yang jauh juga. Manfaat dari media sosial ini seperti jangkauan yang lebih luas, biaya yang lebih hemat, dan strategi yang lebih efektif, usaha mereka dapat tumbuh lebih cepat di era digital. Kemudian ada juga pelatihan dan pendampingan seperti workshop digital marketing dan program siBakul dari koperasi dan UKM DIY yang bekerja sama dengan pemerintah Kalurahan dan adanya RPK yang membantu pelaku UMKM juga dalam pelatihan pembuatan akun penjualan produk dan pemotretan produk semua upaya sudah pemerintah Kalurahan Panggunharjo lakukan tetapi masih ada pelaku UMKM yang sudah bergabung di dalam RPK dan mengikuti pelatihan belum menguasai media sosial karena faktor usia dan ketidakpercayaan diri dan ada beberapa pelaku UMKM yang sama sekali tidak bergabung di RPK atau ikut pelatihan di Kalurahan bisa menggunakan media sosial untuk mengembangkan usahanya secara otodidak.

Hal ini perlu upaya dari pemerintah Kalurahan Panggunharjo untuk melakukan pelatihan dan dampingan yang lebih insentif agar dapat membangun kepercayaan diri pelaku UMKM dan upaya yang strategis dari pemerintah

Kalurahan Panggunharjo dalam memberikan informasi terkait pelatihan dan pendampingan agar semua pelaku UMKM dapat mengakses informasi tersebut karena masih ada pelaku UMKM yang belum terlibat dalam pelatihan dan pendampingan yang tersedia agar pelaku UMKM yang bergabung di RPK maupun yang usahanya mandiri mendapatkan hak yang sama agar program-program yang menunjang keberadaan UMKM dapat meningkatkan kemampuan dan daya saing pelaku UMKM

#### **9. Upaya Pemerintah Kalurahan dalam mengembangkan pasar**

Upaya pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam membantu pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan meningkatkan pengembangan pasar. Karena dengan adanya pasar bebas dapat memberikan peluang yang seluas-luasnya bagi pelaku UMKM. Maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam meningkatkan pengembangan pasar bagi pelaku UMKM, kami ada RPK jadi disana mereka difasilitasi dan dilatih dalam pemasarannya baik produk, harga ditentukan di RPK dan dalam hal promosi baik didalam maupun di luar jawa. Selain itu kami juga ada yang namanya pasar desa online. Kemudian ini yang selalu kami lakukan yaitu pesta UMKM Panggungahrjo yang di gelar saat hari jadinya Panggunharjo agar pelaku UMKM perlu meningkatkan inovasi agar dapat bersaing di pasar yang terus berkembang ” (wawancara pada tanggal 14 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah Panggunharjo diatas maka, peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah Kalurahan Panggunharjo sudah berupaya dalam meningkatkan pengembangan pasar dengan adanya RPK ini dapat membantu untuk mempromosikan hasil-hasil produk dari pelaku UMKM yang disalurkan melalui jaringan Tranmart di

jawa. Selain itu di RPK juga pelaku UMKM mendapatkan pelatihan terkait produk mereka yang nantinya akan di pasarkan baik itu terkait branding, strategi digital, dan harga dan melalui pasar desa online yang mana para pelaku UMKM dapat memasarkan produk mereka lewat online. Hal ini sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing dan daya jual. Oleh karena itu perlunya inovasi-inovasi yang baru bagi pelaku UMKM agar UMKM terus berkembang, berkompetitif dan dapat beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang ada.

**Gambar 3. 25 MACIT FEST**



*Sumber: Wibsite Kalurahan Panggungharjo 25/12/2024*

Berdasarkan dokumen gambar di bawah bahwasanya adanya acara yang dilakukan setiap tahun saat hari jadinya Kalurahan Panggungharjo atau biasa disebut MACIT FEST Panggungharjo, tujuannya agar untuk memeriahkan hari jadi dan merayakan kebangkitan UMKM di Panggungharjo yang berisi pentas seni hiburan rakyat, talk show kebangkitan UMKM, pameran jajanan UMKM lokal dari 14 padukuhan yang ada dan hiburan musik.

Menurut pengamatan peneliti bahwasanya di dalam hal pengembangan pasar pemerintah Kalurahan mengupayakan pengembangan pasar yang baik melalui program yang sudah dibuat dan dukungan juga dengan pelaku UMKM

sendiri juga agar program tersebut dapat dimanfaatkan demi usaha mereka. Kesimpulanya adanya upaya dari pemerintah Kalurahan didalam membantu pelaku UMKM dalam strategi pemasaran, baik itu melalui RPK, pasar id, dan MACIT FEST Panggungharjo semua dilakukan dengan harapan bahwa UMKM terus berkembang, inisiatif ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Hal serupa juga disampaikan oleh Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk pemasarannya kan ada RPK jadi pelaku UMKM dapat memasarkan produk-produk mereka disana dan lewat media sosial juga. Kami juga ada pasar desa online, jadi disana pelaku UMKM dapat mempromosikan produk-produk mereka. Selain itu kami juga mengadakan kampung ramadhan Panggungharjo, Bantul Expo dan saat acara tertentu di kantor kami memesan dari pelaku UMKM yang ada di sini. Jadi baik mereka yang masuk RPK atau tidak tetap kami fasilitasi” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggungharjo diatas maka, peneliti dapat menganalisis bahwa adanya upaya-upaya dari pemerintah Kalurahan dalam membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan pengembangan pasar seperti adanya RPK ini pelaku-pelaku UMKM difasilitasi dalam pelatihan-pelatihan terkait pemasaran, dan membantu untuk mendistribusikan produk mereka terpusat. Untuk pasar desa online ini merupakan konsep digitalisasi desa yang mana pelaku UMKM dapat mempromosikan dan menjual produk mereka melalui platform digital yang dikelolah oleh pemerintah desa yang bekerja sama dengan marketplace. Kemudian untuk Bantul Expo ini diadakan oleh Pemda Kabupaten Bantul ini merupakan agenda tahunan jadi pelaku UMKM dapat juga terbantu dengan

adanya Bantul Expo ini mereka dapat memamerkan produk mereka pada saat bazar. Hal yang sama juga dengan kampung ramadhan dimana saat menjelang bulan puasa sepanjang jalan nongko ada pelaku UMKM yang menawarkan produk mereka.

**Gambar 3. 26 Bantul Expo**



*Sumber: Wibsite Kalurahan Panggungharjo 25/12/2024*

Dan untuk memebantu pelaku UMKM dalam pemasarannya pemerintah Kalurahan setiap kali ada acara atau hajatan selalu memesan produk-produk dari para pelaku UMKM hal ini sangat membantu mereka. Selain pelaku UMKM yang masuk di RPK dan yang tidak masuk di RPK tetap pemerintah fasilitasi sesuai kebutuhan mereka. Berdasarkan dokumen gambar di atas ini menunjukan bahwa adanya gelaran Bantul Expo yang dilakukan oleh Pemda Bantul yang bekerja sama dengan Pemerintah Panggungharjo di dalam menggerak perekonomian dan menjadi wadah untuk meningkatkan daya saing UMKM agar selalu kreatif dan inovatif dalam mengembangkan pasar. Jadi di gelaran Bantul Expo ini terdapat 291 stan yang menyajikan produk-produk kerajinan, kuliner, fashion, dan kebutuhan rumah tanga yang dilakukan selama sebelas hari.

Kemudian menurut pengamatan peneliti bahwasanya ada upaya yang di lakukan oleh pemerintah Kalurahan di dalam membantu pelaku UMKM untuk mengembangkan usaha mereka. Kesimpulanya pemerintah Kalurahan Panggungharjo di dalam membantu untuk meningkatkan pengembangan pasar bagi pelaku UMKM pemerintah sudah melakukan beberapa uapaya seperti adanya RPK, kemudian kampung ramadhan Panggunharjo, dan Bantul Expo untuk mendukung dan mempromosikan UMKM agar terus berekembang dan dapat bersaing di pasar bebas.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Agung Prananto selaku Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu), berikut hasil wawancaranya:

“Jadi RPK ini selain tempat untuk membantu pelaku UMKM memproduksikan produk mereka disana juga tersedia sorum yang menjadi ruang pangan atau komersi yang bisa dipasarkan disana. Kemudian kami menjalankan kerja sama dengan pihak-pihak yang terkait seperti kedinasan, terus beberapa lembaga masyarakat ekonomi syariah, PT Penggadaian termasuk kita ikut pameran dan expo dan dari pihak desa itu sendiri adalah ketika ada tamu di Panggunharjo kita arahkan ke RPK” (wawancara pada tanggal 2 Janurari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Bapak Agung Prananto selaku Pamong Kalurahan (ULU-Ulu), peneliti dapat menganalisis bahwa RPK memiliki peran yang strategis didalam mendukung pelaku UMKM, karena tidak hanya sebagai tempat produksi tetapi juga juga sebagai sorum, sebagai ruang komersial atau pusat pemasaran untuk produk-produk mereka. Hal ini tentunya memberikan akses yang luas bagi pelaku UMKM dalam menjangkau pasar lokal maupun potensial. Dalam hal kerja sama juga pemerintah mengandeng beberapa pihak seperti dinas terkait, lembaga masyarakat ekonomi syariah, PT Penggadaian

serta partisipasi didalam pameran dan expo yang menunjukan bahwa adanya kolaborasi yang komprehensif dengan begitu dapat memperluas peluang bagi pelaku UMKM dalam mendapatkan bimbingan, permodalan dan akses pasar yang luas. Selain itu peran Kalurahan dalam mendukung RPK misalnya ketika ada pariwisata atau para tamu yang berkunjung ke Panggungharjo akan diarahkan ke RPK juga dalam artian bahwa untuk belanja produk-produk lokal yang ada di sana. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK tidak hanya sebagai tempat produksi tetapi ada show room untuk pemasarannya juga hal ini sangat membantu pelaku UMKM di dalam hal pemasaran. Kesimpulanya RPK ini memiliki peran strategis sebagai pusat pemberdayaan UMKM karena tidak hanya sebagai tempat produksi tetapi sebagai tempat untuk pemasaran

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku koordinator RPK, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam hal pemasaran kami berupaya agar produk-produk yang ada tidak hanya layak jual, tetapi juga memenuhi syarat layak sehat, aman dan halal sehingga dapat diterima pasar. Dalam hal pemasarannya kami juga melakukan pelatihan dan pembinaan dalam pengemasan, omset pasar, manajemen keuangan, pemasaran digital dan mental dan kami bekerja sama dengan beberapa pihak dalam pengembangan pasar”(wawancara pada tanggal 27 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aisyah selaku koordinator RPK ini bahwasanya dalam hal pemasaran RPK melatih dan memberikan pembinaan kepada para pelaku UMK agar terus berkembang misalnya dalam pengembangan branding dan kemasan ada pelatihan terkait design kemasan yang menarik dan memenuhi standar pasar modern. Untuk pemasaran digital

kami juga mengajarkan penggunaan media sosial dan marketplace untuk promosi produk. Kemudian dalam hal manajemen keuangan kami juga melakukan pelatihan terkait pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sederhana. Dan untuk mental kami juga melakukan dampingan dan pelatihan agar pelaku UMKM dapat percaya diri dengan produk yang mereka buat dan harus kreatif dan inovatif. Selain itu untuk pemasaranya kami bekerja sama dengan Transmart dalam menyalurkan produk, marketplace dan kemitraan dengan pemda kabupaten bantul dalam program promosi seperti Bantul Creative Expo. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK tidak hanya sebagai tempat untuk produksi tetapi ada show room untuk pemasaranya juga hal ini sangat membantu pelaku UMKM di dalam hal pemasaran selain itu adanya pelatihan-pelatihan seperti pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sederhana, pelatihan mental pelaku UMKM,dan promosi produk. Kesimpulanya RPK dalam membantu pelaku UMKM untuk pemasaran selain pelatihan dan pendampingan yang dilakukan, RPK juga membangun kerja sama dengan pihak lain dalam meningkatkan pengembangan pasar dan pelaku UMKM di Panggungharjo juga sudah menggunakan media sosial dalam meningkatkan pemasaranya

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi mba saya itu kan sudah bergabung di dalam RPK jadi untuk pemasaranya kami disini kalau selesai stok saya tambah lagi di RPK. Selain itu dalam memasarkan produk saya menggunakan media sosial dan offline dor to dor karena produk saya juga sudah banyak yang kenal. Selain itu juga di RPK kami mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan dalam

hal promosi, pemasaran dan mental serta manajemen keuangan” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Dwi Hening tersebut maka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa dalam RPK pelaku UMKM dapat menjangkau pasar dengan memanfaatkan media sosial dan metode pemasaran offline hal ini menciptakan peluang peluang besar bagi pelaku UMKM dalam menjangkau pelanggan. Keterlibatan di dalam pelatihan peningkatan keterampilan seperti pelatihan promosi produk lewat media sosial, membuat akun, pelatihan manajemen keuangan, dan pelatihan packing dan latihan mental agar pelaku UMKM tidak cepat putus asa ketika produk-produk mereka belum laku. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK tidak hanya sebagai tempat untuk produksi tetapi ada show room untuk pemasarannya juga hal ini sangat membantu pelaku UMKM di dalam hal pemasaran selain itu adanya pelatihan-pelatihan seperti pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sederhana, dan pelatihan mental pelaku UMKM. Kesimpulan RPK ini tentunya membantu pelaku UMKM dalam memperluas jangkauan pasar dan dengan mengikuti pelatihan dan keterampilan pelaku UMKM dapat mengembangkan usaha mereka. Pelaku UMKM di Panggunharjo juga sudah menggunakan media sosial dalam pemasarannya

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi produk saya ini kan mba namanya ampiang jadi saya modifikasi dia dengan cara saya goreng, kemudian tambahkan coklat, susu dll agar beda dan menarik. dan tentunya saya kan bergabung didalam Rumah Produksi Komunitas jadi dalam hal kemasan, pemasaran dan pengembangan produk kami dilatih terus jadi kemasan saya sudah sesui SOP. Kemudian untuk

teknologi digital saya sudah mengerti tetapi belum lancar jadi pemasaranya dilakukan dor to dor dan online juga” (wawancara pada tanggal 27 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Ani selaku pelaku UMKM diatas maka dapat dianalisis bahwa pelaku UMKM dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar yaitu melalui pengembangan varian produk baru, dan kemasan yang menarik tetapi dalam pemanfaat teknologi digital sudah baik tetapi belum terlalu efektif. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK tidak hanya sebagai tempat untuk produksi tetapi ada show room untuk pemasaranya juga hal ini sangat membantu pelaku UMKM di dalam hal pemasaran selain itu adanya pelatihan-pelatihan seperti pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sederhana, dan pelatihan mental pelaku UMKM. Kesimpulanya pemasaran dor to dor mempunyai keunggulan juga dalam hal membangun hubungan personal dan mendapatkan umpan balik langsung dari pelanggan tetapi memiliki keterbatasan dalam jangkauan. Oleh karena itu penerapan teknologi digital sangat membantu dalam hal jangkauan pasar agar lebih efisien dan dapat meningkatkan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya:

“Untuk pemasaranya saya di RPK nanti kalau stoknya sudah habis dimasukan lagi, dan juga saya pasarkan dor to dor baik dari keluarga maupun di warung-warung, karena untuk menggunakan media sosial saya belum bisa karena faktor umur. Selain itu di RPK kami dilatih dan dibina dalam hal pemasaran, pelatihan mental, manajemen keuangan itu cukup membantu saya” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Martina diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa RPK selain tempat untuk produksi juga tempat sebagai

sorum untuk pemasaran. Disana juga ada pelatihan dan pendampingan yang menjadi langkah yang baik untuk para pelaku UMKM di dalam mengembangkan usaha mereka. Pemasaran dor to dor juga memungkinkan dapat menjaga hubungan baik dengan pelanggan tetapi lewat media sosial lebih mudah dan jangkauanya lebih luas. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK tidak hanya sebagai tempat untuk produksi tetapi ada show room untuk pemasarannya juga hal ini sangat membantu pelaku UMKM di dalam hal pemasaran selain itu adanya pelatihan-pelatihan seperti pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sederhana, dan pelatihan mental pelaku UMKM. Kemudian ada pelaku UMKM yg belum bisa menggunakan media sosial dalam pemasarannya karena faktor umur. Kesimpulanya RPK memfasilitasi pelaku UMKM dalam hal pemasaran dan pelatihan-pelatihan yang dilakukan setiap bulan. Hal ini sangat membantu pelaku UMKM dalam mengembangkan usaha mereka tetapi ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan media sosial untuk pemasarannya.

Hal berbeda yang disampaikan oleh Bapak Daniman selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Saya usahanya mandiri jadi untuk didalam pemasaranya saya menggunakan platform media sosial seperti instagram untuk mempromosikan produk saya dan mengikuti kebutuhan pasar karena usaha saya inikan lanjutan dari orang tua saya jadi relasinya sudah ada, dan batik saya inikan untuk manten (nikahan) jadi banyak yang sudah tau dan dalam pemasaranya saya tidak terlalu kesusahan mba” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Daniman selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa strategi yang dilakukan pelaku

UMKM dalam menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar yaitu menggunakan platform digital seperti instagram dan melalui relasi yang sangat membantu dalam pemasaran sehingga produk yang dijual dapat dikenal banyak orang. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya dengan usaha mandiripun pelaku UMKM tetap berkembang dengan upaya-upaya yang dilakukan sendiri hal ini butuh dorongan dan apresiasi dari pemerintah. Kesimpulannya dengan strategi dan inovasi pemasaran yang sesuai dengan kebutuhan konsumen pelaku UMKM dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar dengan media sosial dan upaya-upaya yang dilakukan sendiri di dalam mengembangkan usaha mereka.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya mandiri mba untuk pemasaranya saya dor to dor dari warung ke warung. Kemudian untuk media sosial saya tidak tau sehingga pemasarnya saya offline, karena umur saya sudah tua dan untuk menggunakan media sosial saya belum mengerti hanya menggunakan whatshaap. Untuk pelatihan dan pendampingan mengenai UMKM sampai sekarang saya belum mengikuti jadi saya belajar membuat peyek ini otodidak saja”. (wawancara pada tanggal 26 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Ani selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada pelaku UMKM di Panggungharjo yang usahanya mandiri yang artian bahwa di dalam pemasaranya masih dor to dor dilakukan sendiri tanpa melibatkan pihak lain yang membantu. Dalam penggunaan media sosial juga para pelaku UMKM belum terlalu bisa karena adanya kendala seperti umur. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya pemerintah Kalurahan harus berperan aktif secara keseluruhan dalam

mendukung pengembangan UMKM agar mereka didampingi dan difasilitasi secara merata. Kesimpulanya bahwasanya masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan fasilitas dan dampingan dari pemerintah Kalurahan dalam hal pemasaran.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas maka peneliti dapat menyimpulkan dalam hal pengembangan pasar pemerintah Kalurahan mengupayakan pengembangan pasar yang baik melalui program seperti pelatihan dan pendampingan strategi pemasaran, baik itu melalui RPK, pasar id, dan MACIT FEST Panggungharjo, kemudian kampung ramadhan Panggungharjo, dan Bantul Expo untuk mendukung dan mempromosikan UMKM agar terus berekembang dan dapat bersaing di pasar bebas. Semua dilakukan dengan harapan bahwa UMKM terus berkembang, inisiatif ini berkontribusi pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Seperti di dalam RPK tidak hanya sebagai tempat untuk produksi tetapi ada show room untuk pemasarannya juga hal ini sangat membantu pelaku UMKM di dalam hal pemasaran selain itu adanya pelatihan-pelatihan seperti pencatatan transaksi dan menyusun laporan keuangan yang sederhana, pelatihan mental pelaku UMKM,dan promosi produk. Kemudian katalog pasar id, diluncurkan agar pelaku UMKM dapat memanfaatkan platform digital di dalam promosi dan pemasaran karena memudahkan mereka untuk menjangkau konsumen. Kemudian MACIT FEST Panggungharjo yang dilakukan setiap hari jadi Kalurahan Panggungharjo untuk mendukung pengembangan pelaku UMKM yang ada di Padukuhan, selain itu ada kampung ramadhan yang dilakukan setiap kali bulan puasa dimana pelaku

UMKM di Panggunharjo bisa memasarkan produk-produk mereka di sepanjang jalan dan Bantul Expo diadakan oleh Pemda Kabupaten Bantul ini merupakan agenda tahunan jadi pelaku UMKM dapat juga terbantu dengan adanya Bantul Expo ini mereka dapat memamerkan produk mereka pada saat bazar. Semua upaya-upaya itu di lakukan oleh pemerintah Kalurahan untuk membantu pengembangan UMKM dalam hal pemasaran tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan program tersebut sehingga mereka masih kesusahan dalam hal pemasaran dan belum terlalu menguasasi media sosial. Oleh karena itu dalam hal pemasaran dibutuhkan upaya-upaya seperti sosialisasi dan pendekatan mengenai program yang ada agar pelaku UMKM mengetahui manfaat dan dampaknya bagi perkembangan usaha mereka.

## **10. Upaya Pemerintah Kalurahan dalam Perijinan**

Upaya pemerintah Kalurahan dalam membantu pengembangan UMKM dapat dilakukan dengan memantau dan memberikan kemudahan perijinan bagi pelaku UMKM. Maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Pemerintah Kalurahan Panggunharjo memfasilitasi pelaku UMKM dalam hal perijinan seperti bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas agama, dan dianas kesehatan dan melalui RPK pelaku UMKM difasilitasi juga dalam legalitas usaha, edukasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan perijinan. Semua kami upayakan agar pelaku UMKM di Panggunharjo tetap tumbuh dan berkembang” (wawancara pada tanggal 14 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah diatas peneliti dapat menganalisis bahwa pemerintah kalurahan mendukung pelaku UMKM dengan memberikan kemudahan bagi proses

perijinan seperti Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Usaha PIRT dan Sertifikat Halal. Dalam hal ini pemerintah juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas agama yang berkaitan dengan halal,dan dinas kesehatan yang berkaitan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini tentunya memudahkan pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu melalui RPK juga pelaku UMKM difasilitasi jadi bukan hanya administratif saja tetapi pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi kebijakan yang berlaku. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya upaya pemerintah Kalurahan di dalam memfasilitasi pelaku UMKM dalam pemasaran sudah di upayakan. Kesimpulanya bahwa didalam RPK pelaku UMKM difasilitasi bukan hanya urusan administratif saja tetapi pemahaman dan keterampilan juga di latih.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Kami memfasilitasi dan mendampingi para pelaku UMKM dalam hal perijinan kemudian kami bekerja sama dengan dinas-dinas seperti dinas kesehatan, dinas agama dan instansi seperti perguruan tinggi terkait dan melalui RPK juga pelaku UMKM difasilitasi dalam legalitas usaha, edukasi dan sosialisasi yang berkaitan dengan perijinan” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Dari hasil wawancara dengan bapak selaku Bapak Arif Suryanto selaku lurah diatas peneliti dapat menganalisis bahwa hampir sama yang dikatakan mantan lurah dan luarah Panggunharjo sekarang bahwasanya pemerintah Kalurahan mendukung pelaku UMKM dengan memberikan kemudahan didalam proses perijinan seperti Nomor Induk Berusaha, Surat Keterangan Usaha PIRT dan Sertifikat Halal. Dalam hal ini pemerintah juga bekerja sama dengan dinas-

dinas terkait seperti dinas agama yang berkaitan dengan halal, dan dinas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM). Hal ini tentunya memudahkan pelaku UMKM untuk mengurus izin usaha dengan lebih mudah dan cepat. Selain itu melalui RPK juga pelaku UMKM difasilitasi jadi bukan hanya administratif saja tetapi pemahaman dan kesiapan pelaku UMKM dalam memenuhi kebijakan yang berlaku agar dapat menambah pengetahuan mereka terkait usaha yang mereka jalankan. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya upaya pemerintah Kalurahan di dalam memfasilitasi pelaku UMKM dalam pemasaran sudah di upayakan. Kesimpulanya pemerintah sudah mendukung dan memfasilitasi pelaku UMKM dalam hal pengaturan dan perijinan yang mana tidak dengan urusan administratif saja tetapi skil mereka juga di latih dapat meningkatkan standar kualitas produk UMKM dan jangkauan pemasaran dari produk yang lebih luas.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku koordinator RPK, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi untuk mereka yang belum mendapatkan ijin usaha kami mulai lakukan pola pembinaan, dan fasilitasi agar mereka mendapatkan ijin usaha dan ijin edar. Jadi sebelum mendapatkan ijin usaha dasar dan izin usaha khusus pangan (makanan/minuman) UMKM harus mengikuti beberapa pelatihan untuk mendapatkan ijin tersebut. Selain itu kami bekerja sama juga dengan dinas-dinas terkait dalam mendukung perijinan usaha” (wawancara pada tanggal 27 Januari 2024)

Dari hasil wawancara dengan Ibu Aisyah selaku koordinator RPK ini bahwasanya di RPK para pelaku UMKM difasilitasi dalam hal untuk mendapatkan ijin usaha dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), izin khusus produk pangan (makanan atau minuman) seperti PIRT (Produk Industri Rumah

Tangga), sertifikat halal, dan sertifikat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) jadi selain pelaku UMKM Panggungharjo mendapatkan ijin-ijin tersebut kami juga melakukan pola pembinaan agar dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar. Selain itu di RPK juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas agama yang berkaitan dengan halal, dan dinas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM). Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK pelaku-pelaku UMKM di fasilitasi dan di dampingi di dalam hal pemasaran dan di RPK juga ada show room untuk pemasaran jadi memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Kesimpulanya di RPK memfasilitasi dan mendampingi pelaku UMKM Panggungharjo didalam perijinan yang didukung juga dengan kerja sama dengan dinas-dinas terkait yang mana ini merupakan hal yang baik untuk pelaku UMKM agar mereka terus berkembang.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Pangungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam hal perijinan saya selaku pelaku UMKM tidak terlalu kesulitan karena setelah saya masuk dan bergabung di RPK ini saya sangat terbantu dan setelah mengikuti pelatihan-pelatihan saya bisa mendapatkan izin berusaha. Program yang diselenggarakan oleh pemerintah ini sangat membantu kami sebagai pelaku UMKM, karena selain memberikan kemudahan dalam pengurusan izin, juga memberikan pemahaman yang lebih luas tentang pentingnya legalitas usaha” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Dwi Hening tersebut maka, peneliti dapat menganalisis bahwa RPK memiliki peran penting didalam membantu pelaku UMKM dalam hal legalisasi usaha, baik itu melalui pendampingan administatif maupun penyediaan informasi yang berkaitan dengan regulasi

tentang perizinan seperti NIB, PIRT, BPOM dan sertifikat halal. Pelatihan dan pendampingan ini sangat membantu pelaku UMKM yang dari awalnya tidak memiliki izin sekarang sudah memiliki.

Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK pelaku-pelaku UMKM di fasilitasi dan di dampingi di dalam hal pemasaran dan di RPK juga ada show room untuk pemasaran jadi memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Tetapi tidak semua pelaku UMKM masuk bergabung di dalam RPK. Kesimpulanya dengan adanya RPK dan pelatihan-pelatihan yang diberikan sangat berdampak baik kepada kemudahan dalam mendapatkan izin usaha. Hal ini membuka lebih banyak peluang bagi pelaku UMKM Panggunharjo agar terus berkembang.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam hal perijinan saya selaku pelaku UMKM tidak terlalu kesulitan karena setelah masuk di RPK ini saya terbantu dan setelah mengikuti pelatihan-pelatihan saya mendapatkan izin berusaha. Yang dulunya tidak dapat sekarang saya dapat izinya jadi memudahkan saya dan sangat membantu. Program yang diselenggarakan oleh pemerintah ini sangat membantu kami sebagai pelaku” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Ani selaku pelaku UMKM di Panggunharjo diatas peneliti dapat menganalisis bahwa adanya fasilitasi, bantuan dan pelatihan yang diberikan oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo kepada pelaku UMKM, seperti dalam pembuatan ijin Usaha. Dampak dari ini pelaku UMKM merasa terbantu untuk mengembangkan UMKM mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK pelaku-

pelaku UMKM di fasilitasi dan di dampingi di dalam hal pemasaran dan di RPK juga ada show room untuk pemasaran jadi memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Tetapi tidak semua pelaku UMKM masuk bergabung di dalam RPK. Kesimpulnya bahwasanya pemerintah Kalurahan memfasilitasi pelaku UMKM dalam hal perijinan tetapi belum merata.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Setelah masuk di RPK saya tidak kesulitan lagi dalam hal perijinan karena di RPK kami dibantu, yang dari awalnya tidak memiliki izin usaha kami didampingi dan difasilitasi oleh karena itu sekarang saya memiliki izin untuk berusaha. Keberadaan RPK benar-benar memberikan dampak positif bagi pelaku UMKM seperti saya. Tidak hanya membantu dalam aspek legalitas, tetapi juga memberikan edukasi dan pemahaman yang lebih luas tentang bagaimana menjalankan usaha dengan lebih profesional”(wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara dengan ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa masyarakat atau selaku pelaku usaha di Kalurahan Panggungharjo sendiri sangat terbantu oleh kehadiran dan bantuan yang di berikan oleh Pemerintah Kalurahan baik dalam pelatihan dan memfasilitasi dalam pembuatan izin usaha. Hal ini menjadi langkah yang baik bagi pelaku UMKM agar berkembang kedepannya. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya di RPK pelaku-pelaku UMKM di fasilitasi dan di dampingi di dalam hal pemasaran dan di RPK juga ada show room untuk pemasaran jadi memudahkan pelaku UMKM untuk memasarkan produk mereka. Tetapi tidak semua pelaku UMKM masuk bergabung di dalam RPK. Kesimpulanya pemerintah Kalurahan mendukung pengembangan UMKM di Panggungharjo salah satunya dengan adanya RPK ini dapat membantu pelaku

UMKM terutama dalam hal perijinan usaha. Kesimpulanya adanya RPK program dari pemerintah ini dapat membantu pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo.

Hal berbeda yang disampaikan oleh Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha sayakan mandiri jadi apa-apa saya sendiri, untuk perijinannya saya belum mendapatkan karena saya tidak ikut pelatihan dan pendampingan. Jadi dari pemerintah Kalurahan saya belum ikuti. Saya menyadari bahwa izin usaha merupakan hal penting untuk keberlanjutan dan perkembangan bisnis, terutama dalam meningkatkan kepercayaan pelanggan serta membuka peluang kerja sama yang lebih luas. Namun, karena saya belum mengikuti program pelatihan dan pendampingan yang tersedia, saya masih belum memahami secara detail bagaimana proses pengurusan izin usaha dan manfaat yang bisa saya dapatkan dari legalitas tersebut” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo maka, peneliti dapat menganalisis bahwa adanya pelaku UMKM yang belum terdata dikarenakan belum pernah mengikuti program yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan, sehingga pelaku UMKM tersebut belum mendapatkan bantuan dari pemerintah Kalurahan dikarenakan belum terdata. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya pemerintah sudah memfasilitasi dalam hal perijinan kepada pelaku UMKM di Panggunharjo, tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut. Kesimpulanya masih ada pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo yang belum mengikuti program-program dari pemerintah oleh karena itu mereka belum mendapatkan izin karena belum terdaftar.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Saya belum mendapatkan izin usaha dari Kalurahan. Karena usaha saya mandiri dan untuk urusan surat izin saya belum buat sehingga pemasaran saya masih di sekitaran sini saja. Saya menyadari bahwa memiliki izin usaha dapat memberikan banyak manfaat, seperti meningkatkan kepercayaan pelanggan, membuka peluang kerja sama dengan pihak lain, serta mempermudah akses ke berbagai program pendukung UMKM, baik dari pemerintah maupun lembaga lainnya. Namun, karena keterbatasan informasi dan waktu, saya belum mengurus perizinan tersebut.” (wawancara pada tanggal 26 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada program dan bantuan yang diberikan kepada pelaku UMKM oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo, akan tetapi bantuan tersebut belum merata dan dirasakan oleh sebagian pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo. Sebagaimana pelaku UMKM tersebut harus terpaksa untuk mandiri dalam menjalankan usaha mereka, dan untuk berkembang lebih mereka terkendala akan Surat izin usaha dan pasar. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya pemerintah sudah memfasilitasi dalam hal perijinan kepada pelaku UMKM di Panggunharjo, tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan manfaat dari program tersebut. Kesimpulanya masih adanya pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo yang belum mendapatkan izin usaha.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas maka, peneliti dapat menyimpulkan bahwa Pemerintah Kalurahan Panggunharjo sudah membuat peraturan untuk mendukung pengembangan UMKM di Kalurahan dan pemerintah membuat program mengenai pengembangan UMKM yaitu Rumah

Produksi Komunitas (RPK) yang dibawah naungan BUMDes yang dimana berawal dari banyaknya para pelaku UMKM yang tidak memiliki ijin usaha dan tempat layak untuk produksi yang kemudian bekerja sama dengan beberapa pihak dan sektor lainya dalam mendukung keberadaan UMKM di Panggungharjo. Pemerintah Kalurahan juga sudah menganggarkan dana untuk pelaku UMKM dibantu juga oleh CSR PT penggadaian dan fasilitasi Dana Keistimewaan. Jadi melalui program yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Panggungharjo di sana para pelaku UMKM difasilitasi dan didampingi dalam hal pelatihan dan pembinaan terkait pengembangan sumber daya manusia, pengembangan pasar yang mana RPK ini dapat membantu untuk mempromosikan hasil-hasil produk dari pelaku UMKM yang disalurkan melalui jaringan Tranmart di jawa. Selain itu di RPK juga, pelaku UMKM mendapatkan pelatihan terkait produk mereka yang nantinya akan di pasarkan baik itu terkait branding, stategi digital,dan harga. Dan melalui pasar desa online yang mana para pelaku UMKM dapat memasarkan produk mereka lewat online. Hal ini sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan daya saing dan daya jual. Selain itu dalam hal perijinan juga pemerintah melalui RPK para pelaku UMKM difasilitasi dalam hal untuk mendapatkan ijin usaha dasar seperti NIB (Nomor Induk Berusaha), izin khusus produk pangan (makanan atau minuman) seperti PIRT (Produk Industri Rumah Tangga), sertifikat halal, dan sertifikat BPOM (Badan Pengawas Obat dan Makanan) jadi selain pelaku UMKM Panggungharjo mendapatkan ijin-ijin tersebut kami juga melakukan pola pembinaan agar dapat meningkatkan daya saing dan memperluas pasar.

Selain itu di RPK juga bekerja sama dengan dinas-dinas terkait seperti dinas agama yang berkaitan dengan halal,dan dinas Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Tetapi program ini terlihat kurang maksimal karena masih ada pelaku-pelaku UMKM di kalurahan Panggunharjo yang belum ikut terlibat didalam program yang dibuat oleh pemerintah Hal ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor. Salah satunya adalah kurangnya sosialisasi dan informasi yang sampai kepada pelaku UMKM tidak semua pelaku usaha memiliki akses terhadap informasi terkait program pemerintah, sehingga ada kemungkinan sebagian dari mereka tidak mengetahui keberadaan program ini atau manfaat yang bisa diperoleh darinya. Selain itu, ada kemungkinan bahwa mekanisme atau persyaratan untuk mengikuti program masih dianggap sulit atau tidak sesuai dengan kondisi sebagian pelaku UMKM, sehingga mereka tidak ikut terlibat. Hal ini perlu adanya evaluasi terhadap program yang dibuat oleh pemerintah untuk menjangkau pelaku UMKM yang belum terlibat dan mendekati secara langsung pelaku UMKM. Agar kebijakan ini dapat memberikan manfaat yang merata dan tidak hanya terbatas pada kelompok tertentu saja.

## **B. Fakto-faktor Yang Mempengaruhi Pengembangan UMKM di Kalurahan Panggunharjo**

Dalam pengembangan UMKM ada beberapa faktor yang mempengaruhi dan saling terkait. Jika dilihat dari sisi internal, kualitas sumber daya manusia menjadi salah satu faktor utama. Para pelaku UMKM yang memiliki kreativitas dan inovatif dalam produksi, pemasaran, dan manajemen akan lebih mampu

menghadapi tantangan dalam usaha agar para pelaku UMKM dapat memenuhi kebutuhan pasar yang terus berkembang. Jika dilihat dari sisi eksternalnya peran dan dukungan pemerintah sangat berpengaruh, baik didalam bentuk program yang mendukung pelaku UMKM seperti pelatihan dan pembinaan. Dalam hal ini teknologi dan digitalisasi juga memiliki peran yang penting, karena para pelaku UMKM yang bisa memanfaatkan teknologi digital seperti media sosial sebagai sarana untuk pemasaran akan lebih mudah bersaing.

Pemerintah Kalurahan Panggunharjo telah membuat program mengenai UMKM yaitu dengan mengadakan Rumah Produksi Komunitas (RPK). RPK Panggunharjo merupakan sebuah tempat produksi pangan olahan yang dibangun atas dukungan CSR PT Penggadain dan fasilitas Dana Keistimewaan. RPK ini menjadi sebuah solusi guna memberikan fasilitas produksi kepada UMKM di Kalurahan Panggunharjo yang belum mempunyai tempat produksi berstandar dan RPK ini dapat memfasilitasi, memberi edukasi dan bimbingan kepada pelaku UMKM. Tetapi masih ada pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo yang belum bergabung. Hal ini disebabkan karena kurangnya informasi atau sosialisasi yang menjangkau semua pelaku UMKM, pola pikir tradisional yang masih mengandalkan metode pemasaran yang dor to dor, dan pelaku UMKM yang belum menyadari potensi peningkatan kapasitas usaha yang mereka dapatkan dari melalui pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi oleh RPK. Berikut adalah hasil wawancara mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Kalurahan Panggungahrjo.

## **1. Kebijakan Pemerintah Kalurahan**

Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan pemerintah Kalurahan di dalam mengembangkan UMKM seperti kebijakan di dalam mendukung perijinan usaha, akses pemasaran dan kerja sama. Maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku Lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi faktor yang menghambat kebijakan ini seperti perijinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT ini sudah difasilitasi melalui RPK dengan harapan bahwa kebijakan ini dapat membantu pelaku UMKM di dalam mengurus perijinan usaha akan tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan perijinan tersebut karena tidak mengikuti program dan pelatihan” (wawancara pada tanggal 14 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku Lurah Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menganalisi bahwa Kebijakan perizinan usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT sebenarnya sudah difasilitasi melalui Rumah Produksi Kalurahan (RPK) tujuannya adalah untuk membantu para pelaku UMKM agar lebih mudah dalam mengurus izin usaha mereka. Namun, masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum mendapatkan perizinan ini. salah satu penyebab utamanya adalah mereka tidak mengikuti program dan pelatihan yang disediakan. Padahal, dalam pelatihan tersebut, mereka bisa mendapatkan pendampingan langsung dalam proses perizinan. Beberapa pelaku UMKM mungkin tidak ikut karena kurangnya informasi, dan belum menyadari manfaat dari memiliki izin usaha. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya pemerintah Kalurahan Panggungharjo sudah membuat kebijakan mengenai ijin berusaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum

mendapatkan ijin tersebut karena kurangnya informasi dan belum menyadari manfaat dari memiliki izin usaha. Kesimpulanya upaya dari pemerintah Kalurahn dalam sosialisasi yang lebih luas agar lebih banyak pelaku UMKM yang mau memanfaatkan fasilitas yang telah disediakan dan juga kesaadran dari diri dari pelaku UMKM bahwa ijin usaha tersebut penting untuk usahanya.

Hal yang serupa juga di katakan oleh Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Faktor yang menghambat kebijakan ini seperti kami sudah memfasilitasi UMKM lewat RPK dalam hal akses pemasaran dan kerja sama dengan pihak luar, tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum melibatkan dirinya hal ini bisa terjadi karena beberapa alasan, seperti kurangnya informasi mengenai program yang tersedia, keterbatasan waktu untuk mengikuti program, atau kurangnya pemahaman tentang manfaat yang bisa didapatkan” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggungharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa beberapa alasan yang menyebabkan hal ini terjadi antara lain kurangnya informasi tentang program yang tersedia, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mengetahui adanya fasilitas yang bisa mereka manfaatkan selain itu, keterbatasan waktu juga menjadi kendala, karena sebagian besar pelaku UMKM sibuk mengurus produksi dan penjualan, sehingga sulit menyisihkan waktu untuk mengikuti pelatihan atau program yang ditawarkan. Berdasarkan hasil pengamatan bahwasanya faktor yang menghambat kebijakan pemerintah Kalurahan yaitu kurangnya informasi tentang program yang tersedia dan keterbatasan waktu. Kesimpulanya perlu di lakukan sosialisasi yang lebih luas dan pendekatan yang lebih personal, agar pelaku UMKM lebih memahami pentingnya fasilitas yang

telah disediakan dan termotivasi untuk ikut serta dalam program yang dapat membantu pengembangan usaha mereka

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Bapak Agung Prananto selaku Pamong Kalurahan (ULU-Ulu) berikut hasil wawancaranya :

“Dalam kebijakan perlindungan dan sertifikasi produk kami memfasilitasi proses sertifikasi halal, BPOM, dan SNI bagi UMKM yang memproduksi makanan atau produk lainnya melalui RPK. Dengan memiliki sertifikasi ini, UMKM dapat lebih mudah masuk ke pasar yang lebih luas dan dengan membangun kerja sama dengan sektor swasta di dalam mengembangkan UMKM” (wawancara pada tanggal 2 Januari 2024)

Dari hasil wawancara bersama Bapak Agung Prananto selaku Pamong Kalurahan (ULU-Ulu) maka peneliti dapat menganalisis bahwa kebijakan perlindungan dan sertifikasi produk ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk mereka. Melalui RPK, pemerintah memfasilitasi proses sertifikasi halal, BPOM, dan SNI bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan atau produk lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa pemerintah Kalurahan sudah membuat kebijakan mengenai pelatihan terkait sertifikasi halal, BPOM, dan SNI bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan atau produk lainnya. Tetapi ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan kebijakan tersebut karena kurangnya informasi terkait kebijakan tersebut, kemudian kurang memahami dengan kebijakan yang di buat. Kesimpulanya pemerintah sudah membuat kebijakan tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum memnafaatkan kebijakan tersebut.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Panggungharjo itu ada seperti pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi langsung di dalam RPK seperti dalam izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT yang di mana sebelum mendapatkan sertifikat tersebut pelaku UMKM harus mengikuti beberapa pelatihan dulu untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan Panggungharjo memiliki kebijakan untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Untuk mempermudah proses ini, pemerintah menyediakan pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi langsung melalui RPK. Sebelum mendapatkan sertifikat izin usaha, pelaku UMKM harus mengikuti beberapa pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai standar produksi, keamanan pangan, serta tata cara pengelolaan usaha yang baik dengan mengikuti pelatihan ini, UMKM tidak hanya memperoleh izin resmi tetapi juga meningkatkan kualitas produk mereka agar lebih siap bersaing di pasar. Berdasarkan hasil pengamatan peniliti bahwasanya adanya kebijakan yang sudah dibuat tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan kebijakan tersebut karena tidak semua pelaku UMKM sudah bergabung di RPK oleh karena itu pelatihan dan pendampingan belum semua di rasakan oleh pelaku UMKM. Kesimpulanya adanya kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah Kalurahan Panggungharjo tetapi belum semua mendapatkan manfaat dari kebijakan ini karena yang bergabung di RPK tidak semua pelaku UMKM.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Kebijakan Pemerintah kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan Panggungharjo itu ada seperti pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi langsung di dalam RPK seperti dalam izin usaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT yang di mana sebelum mendapatkan sertifikat tersebut pelaku UMKM harus mengikuti beberapa pelatihan dulu untuk bisa mendapatkan sertifikat tersebut karena itu merupakan salah satu persyaratannya” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Pemerintah Kalurahan Panggungharjo memiliki kebijakan untuk mendukung pelaku UMKM dalam mengurus izin usaha, seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT (Pangan Industri Rumah Tangga). Untuk mempermudah proses ini, pemerintah menyediakan pelatihan dan pendampingan yang difasilitasi langsung melalui RPK. Sebelum mendapatkan sertifikat izin usaha, pelaku UMKM harus mengikuti beberapa pelatihan terlebih dahulu. Pelatihan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman mengenai standar produksi, keamanan pangan, serta tata cara pengelolaan usaha yang baik dengan mengikuti pelatihan ini, UMKM tidak hanya memperoleh izin resmi tetapi juga meningkatkan kualitas produk mereka agar lebih siap bersaing di pasar. Berdasarkan hasil pengamatan peniliti bahwasanya adanya kebijakan yang sudah dibuat tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan kebijakan tersebut karena tidak semua pelaku UMKM sudah bergabung di RPK oleh karena itu pelatihan dan pendampingan belum semua di rasakan oleh pelaku UMKM. Kesimpulanya adanya kebijakan yang sudah dibuat oleh pemerintah

Kalurahan Panggunharjo tetapi belum semua mendapatkan manfaat dari kebijakan ini karena yang bergabung di RPK tidak semua pelaku UMKM oleh karena itu adanya ketimpangan.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo berikut hasil wawancaranya :

“Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan ini seperti perlindungan dan sertifikasi produk kami memfasilitasi proses sertifikasi halal, BPOM, dan SNI bagi UMKM yang memproduksi makanan atau produk lainnya melalui RPK. Dengan memiliki sertifikasi ini, UMKM dapat lebih mudah masuk ke pasar yang lebih luas dan dengan membangun kerja sama dengan sektor swasta, untuk saya sendiri saya sudah bergabung di RPK” ( wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama dengan Ibu Martina diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa kebijakan perlindungan dan sertifikasi produk ini bertujuan untuk membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas dan kepercayaan terhadap produk mereka melalui RPK, pemerintah memfasilitasi proses sertifikasi halal, BPOM, dan SNI bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan atau produk lainnya. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwa pemerintah Kalurahan sudah membuat kebijakan mengenai pelatihan terkait sertifikasi halal, BPOM, dan SNI bagi UMKM yang bergerak di bidang makanan atau produk lainnya, kemudian ada yang sudah bergabung tetapi masih ada pelaku UMKM juga yang belum terlibat di dalam kebijakan tersebut. Kesimpulannya pemerintah sudah membuat kebijakan tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum memnafaatkan kebijakan tersebut

Hal yang berbeda di sampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk kebijakan dari pemerintah Kalurahan saya tidak terlalu tau karena saya tidak masuk di RPK dan untuk pelatihan dan pendampingan yang dilakukan, saya juga tidak ikut karena usaha saya mandiri dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kendalanya karena saya sudah tua dan untuk infomasinya saya tidak tau jadi untuk pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan UMKM di Kalurahan saya tidak terlibat” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada Pelaku UMKM yang tidak terlalu mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan oleh karena karena pelaku UMKM tidak tergabung dalam RPK dan tidak mengikuti pelatihan atau pendampingan yang disediakan. Salah satu alasan utamanya adalah karena usahanya dijalankan secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah kemudian faktor usia dan kurangnya informasi juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM ini untuk mengikuti program yang tersedia. Kemudian pelaku UMKM merasa tidak mendapatkan cukup informasi mengenai pelatihan dan pendampingan yang diadakan di Kalurahan, sehingga tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti bahwasanya adanya kebijakan mengenai pengembangan UMKM tetapi ada pelaku UMKM yang tidak mengikuti pelatihan atau pendampingan yang disediakan karena faktor usia dan kurangnya informasi juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM ini untuk mengikuti program yang tersedia. Kesimpulannya diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif agar semua pelaku UMKM termasuk yang menjalankan usahanya secara mandiri, tetap mendapatkan akses informasi dan kesempatan untuk terus berkembang.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk kebijakan dari pemerintah Kalurahan sayajuga tidak terlalu tau karena saya tidak masuk bergabung di RPK dan untuk pelatihan dan pendampingan yang di lakukan, saya juga tidak ikut karena usaha saya mandiri, turun temurun dari orang tua saya dan tidak ada campur tangan dari pemerintah. Kendalanya karena untuk infomasinya saya tidak tau jadi untuk pelatihan dan pendampingan yang berkaitan dengan UMKM di Kalurahan saya tidak terlibat dan ” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa ada Pelaku UMKM yang tidak terlalu mengetahui kebijakan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan oleh karena karena pelaku UMKM tidak tergabung dalam RPK dan tidak mengikuti pelatihan atau pendampingan yang disediakan. Salah satu alasan utamanya adalah karena usahanya dijalankan secara mandiri tanpa campur tangan dari pemerintah kemudian faktor usia dan kurangnya informasi juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM ini untuk mengikuti program yang tersedia. Kemudian pelaku UMKM merasa tidak mendapatkan cukup informasi mengenai pelatihan dan pendampingan yang diadakan di Kalurahan, sehingga tidak terlibat dalam kegiatan tersebut. Berdasarkan hasil pengamatan dari peneliti bahwasanya adanya kebijakan mengenai pengembangan UMKM tetapi ada pelaku UMKM yang tidak mengikuti pelatihan atau pendampingan yang disediakan karena kurangnya informasi juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM ini untuk mengikuti program yang tersedia. Kesimpulanya diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif agar semua pelaku UMKM termasuk yang menjalankan usahanya secara mandiri,

tetap mendapatkan akses informasi dan kesempatan untuk terus berkembang sama-sama.

Dari hasil wawancara bersama dengan beberapa narasumber di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat kebijakan di dalam upaya pemerintah Kalurahan untuk mengembangkan UMKM yaitu pemerintah Kalurahan Panggunharjo sudah membuat kebijakan mengenai ijin berusaha seperti Nomor Induk Berusaha (NIB) dan PIRT tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum mendapatkan ijin tersebut karena kurangnya informasi dan belum menyadari manfaat dari memiliki izin usaha faktor yang menghambat kebijakan pemerintah Kalurahan yaitu kurangnya informasi tentang program yang tersedia dan keterbatasan waktu oleh karena itu perlu dilakukan sosialisasi yang lebih luas dan pendekatan yang lebih personal, agar pelaku UMKM lebih memahami pentingnya fasilitas yang telah disediakan dan termotivasi untuk ikut serta dalam program yang dapat membantu pengembangan usaha mereka, kemudian ada pelaku UMKM yang tidak mengikuti pelatihan atau pendampingan yang disediakan karena faktor usia dan kurangnya informasi juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM ini untuk mengikuti program yang tersedia oleh karena itu diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif agar semua pelaku UMKM termasuk yang menjalankan usahanya secara mandiri, agar tetap mendapatkan akses informasi dan kesempatan untuk terus berkembang sama-sama

## **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber Daya Manusia (SDM) pelaku UMKM memiliki peranan penting didalam keberhasilan dan pengembangan suatu usaha. Kreativitas dan inovasi

juga menjadi nilai tambah bagi pelaku UMKM dalam mendukung pengembangan usaha. Beberapa aspek SDM pelaku UMKM meliputi keterampilan pemasaran, manajemen keuangan, kemampuan inovasi produk dan pemahaman teknologi.

Maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku Lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Yang pemerintah lakukan untuk pelaku UMKM adalah melakukan upaya dan strategis seperti melakukan pelatihan dan pendampingan kepada pelaku UMKM. Salah satunya yaitu dengan adanya RPK ini paling tidak dapat membantu pelaku UMKM didalam keterampilan pemasaran, manajemen keuangan, kemampuan untuk menciptakan inovasi-inovasi baru dan pemahaman mengenai teknologi. Karena banyak pelaku UMKM juga yang belum memanajemen keuangan dengan baik artinya mereka tidak mementingkan kebutuhan usaha mereka tetapi lebih mementingkan kebutuhan tersier. Kemudian kita melakukan event-event untuk membantu mereka dalam pemasaran. Permasalahnya disini adalah banyak pelaku UMKM di Pangungharjo yang belum mililiki izin berusaha sehingga membuat para pelaku UMKM ada yang sudah berkembang dan ada yang belum. Karena yang bergabung di RPK ini sebagianya saja yang lain belum” (wawancara pada tanggal 14 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku Lurah Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menganalisi bahwa adanya upaya pemerintah dalam membantu pengembangan UMKM di Pangungharjo seperti memberikan edukasi mengenai pemasaran, manajemen keuangan, inovasi dan teknologi serta membantu UMKM dalam mempromosikan produk-produk mereka agar lebih dikenal dan dapat meningkatkan penjualan. Meskipun ada upaya dari pemerintah ada faktor-faktor yang mempengaruhi seperti dalam hal masih adanya pelaku UMKM yang belum memiliki izin berusaha hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya akses ke program dari pemerintah dan masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di RPK yang menjadi salah satu program dari pemerintah juga. Hal

ini menyebabkan adanya ketimpangan pertumbuhan yang mana pelaku UMKM yang sudah bergabung di RPK sudah berkembang dengan baik sedangkan yang belum masuk RPK sulit berkembang karena kurangnya akses pelatihan dan pendampingan. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya adanya upaya yang di lakukan pemerintah di dalam mengembangkan sumber daya pelaku UMKM tetapi belum merata karena masih ada pelaku UMKM yang belum merasakan manfaat dari program tersebut. Kesimpulanya faktor yang menyebabkan pengembangan UMKM di Kalurahan Panggungharjo salah satunya adalah masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di RPK sehingga pertumbuhan UMKM adanya ketimpangan disana yang mana mereka yang bergabung di RPK sudah berkembang sedangkan yang belum bergabung belum.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Yang kami upayakan untuk pelaku UMKM adalah selain melakukan pembinaan dan pendampingan dalam pemasaran, manajemen keuangan, kemampuan inovasi produk dan pemahaman teknologi melalui RPK untuk meningkatkan skil mereka. Untuk membantu mereka dalam pemasaran berbagai upaya kami lakukan seperti adanya pasar id yang kemudian mereka memasarkannya disana kemudian saat kegiatan di kantor kami selalu memesan prouk-produk dari pelaku UMKM baik itu mereka yang masuk di RPK atau tidsak masuk.Hal ini dapat membantu mereka dalam meningkatkan value produk mereka” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Arif Suryanto selaku lurah di Kalurahan Panggungharjo diatas maka, peneliti dapat menganalisis bahwa Upaya yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan dalam mendukung pelaku UMKM di Panggungharjo sudah cukup baik, yang mencakup pembinaan,

pendampingan, dan fasilitasi pemasaran. Melalui RPK ini pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dalam berbagai aspek penting seperti pemasaran, manajemen keuangan, inovasi produk, dan pemahaman teknologi. Ini merupakan langkah strategis dalam meningkatkan keterampilan pelaku UMKM agar lebih bersaing di pasar. Selain itu ada pasar id yang mana dapat membantu pelaku UMKM untuk memasarkan produk-produk mereka lebih luas. Karena dengan pasar ini produk mereka lebih mudah diakses oleh konsumen yang di dalam maupun luar Panggungharjo. Upaya pemasaran tidak hanya pada platform digital tetapi juga melibatkan prosedur internal, seperti penjualan produk UMKM dalam setiap kegiatan yang dilakukan di kantor. Kebijakan ini juga bersifat berlaku pada semua pelaku UMKM baik pada UMKM yang masuk dalam RPK maupun yang tidak. Namun masih adanya tantangan yang perlu di perhatikan yaitu memastikan semua pelaku UMKM baik yang masuk maupun tidak masuk agar memiliki akses yang sama terhadap informasi dan peluang pasar. Kemudian pemanfaatan teknologi pasar id harus dioptimalkan lagi agar pelaku UMKM dapat menggunakan secara efektif karena tidak semua pelaku UMKM memiliki pemahaman yang sama terkait pemasaran digital. Kesimpulannya banyak upaya yang telah dilakukan oleh pemerintah untuk mendukung pertumbuhan UMKM, baik melalui pemasaran maupun sisi peningkatan keterampilan. Namun untuk memastikan dampak yang lebih merata perlu adanya strategi tambahan dalam memperluas jangkauan pemasaran agar semua pelaku UMKM mendapatkan manfaat dari program yang ada.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ketua LPMKal Bapak Abdul Razak berikut hasil wawancaranya :

“Panggungharjo itu di wilayah urban atau algomorasi, jadi dia ada di tengah-tengah antara kota jogja dan bantul sehingga mobilitas orang sangat tinggi. Sehingga upaya-upaya kerja sama yang dilakukan bersama pihak-pihak lain bisa memberikan motifasi dan fasilitasi agar UMKM ini secara perlahan bisa berkembang dalam hal permodalan, pemasaran dan skil SDM. Kemudian faktor-faktor yang menghambat itu seperti produk-produk yang sejenis, kemudian bagaimana meningkatkan produk-produk UMKM yang berkaitan dengan hasil pertanian. Secara umum UMKM di Panggungharjo sudah bergerak dibandingkan tahun-tahun yang lalu, cuma kurang optimal karena Kalurahan memiliki prioritas. Kemudian dalam hal manajemen UMKM itu perlu dilatih bagaimana manajemen yang baik, yang kedua SDM tentu saja keterampilan para pelaku UMKM itu harus ditingkatkan dan permodalan mungkin ada pihak-pihak ketiga yang akan memberikan modal agar mereka dapat berkembang. Serta yang tidak kalah pentingnya yaitu penguasaan teknologi melalui media sosial. Oleh karena itu pemerintah Kalurahan harus menggandeng pihak-pihak luar untuk membantu mereka agar kemampuan manajerial mereka bagus, penguasaan teknologi mereka meningkat, dan permodalan semakin kuat”. (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Abdul Razak maka peneliti dapat menganalisis bahwa Karena letak Panggungharjo yang strategis antara Kabupaten Bantul dan Yogyakarta, maka mobilitas masyarakat pada umumnya sangat tinggi. Hal ini memberikan peluang besar bagi pelaku UMKM untuk berkembang karena memberikan akses pasar yang lebih luas dan interaksi dengan pelanggan yang lebih interaktif. Namun, agar UMKM dapat tumbuh dan sejahtera, harus ada lingkungan yang lebih terstruktur dari berbagai pihak, baik dari segi permodalan, pemasaran, maupun peningkatan sumber daya manusia. Persaingan antar produk yang sejenis menjadi faktor utama yang dihadapi UMKM di Panggungharjo. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan produk agar mempunyai nilai lebih tinggi dan mampu bersaing

di pasar yang lebih luas. Selain itu, meskipun UMKM di Panggunharjo ini sudah menunjukkan pertumbuhan dibandingkan tahun-tahun sebelumnya, namun masih kurang karena Pemerintah Kalurahan mempunyai prioritas lain yang perlu diprioritaskan. Dalam konteks UMKM, pengelolaan usaha merupakan aspek yang penting. Banyak peserta UMKM yang masih memerlukan pelatihan di bidang pengelolaan usaha yang efektif, seperti pengelolaan keuangan, strategi pemasaran, dan efisiensi produksi. Selain itu, sumber daya manusia perlu ditingkatkan agar pelaku tidak hanya mampu menjalankan usahanya tetapi juga mampu berinovasi. Faktor penting lainnya adalah permodalan, dimana akses terhadap pembiayaan masih menjadi tantangan bagi banyak pemilik usaha kecil. Dalam hal ini, kerja sama dengan pihak ketiga seperti lembaga keuangan, investor, atau program pembangunan ekonomi dapat menjadi solusi agar UMKM memiliki sumber daya yang lebih untuk berkembang. Kemajuan teknologi juga selalu menjadi tantangan bagi UMKM. Penguasaan platform digital dan media sosial sangat penting untuk mendongkrak pasar dan pertumbuhan bisnis. Namun masih banyak pelaku UMKM yang belum memahami bagaimana memanfaatkan teknologi ini secara maksimal. Oleh karena itu, pelatihan dan pengembangan pemanfaatan teknologi digital menjadi sangat penting agar masyarakat dapat bertahan dalam ekonomi digital. Menurut pengamatan peneliti memang benar banyaknya produk yang sejenis di Panggunharjo oleh karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi yang baru agar mereka mampu bersaing di pasar, kemudian masih ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Kesimpulannya faktor-faktor

yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Kalurahan Panggungharjo seperti permodalan, pemasaran, maupun peningkatan sumber daya manusia. Kemudian persaingan antar produk yang sejenis menjadi faktor utama yang dihadapi pelaku UMKM di Panggungharjo. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan produk agar mempunyai nilai lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Ahmad Alrohman selaku direktur BUMDes, berikut hasil wawancaranya :

“Hal yang sangat mempengaruhi UMKM itu adalah produk mereka sendiri, idenya kemudian bagaimana dioptimalkan dari sisi pemasarannya. Kemudian terkadang pelaku UMKM itu hanya memproduksi disaat waktu luang bukan meluangkan waktu untuk produksi. Karena benar-benar kelihatan mana pelaku UMKM yang benar-benar meluangkan waktunya untuk memproduksi dan memproduksi di saat waktu luang. Mungkin itu ya mba”. (wawancara pada tanggal 8 Januari 2025)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Ahmad Alrohman selaku direktur BUMDes diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Salah satu faktor yang mempengaruhi terhadap keberhasilan UMKM adalah produk mereka itu sendiri, termasuk ide dasar yang mendorong pengembangan produk dan cara optimalisasinya dalam pemasaran. Produk inovatif yang memiliki kualitas unik dan mampu memenuhi kebutuhan pasar mempunyai peluang lebih besar untuk berkembang. Namun permasalahan sering muncul ketika pelaku UMKM tidak terlalu fokus dalam menjalankan usaha mereka, sehingga mereka hanya berproduksi ketika ada waktu. Terdapat perbedaan yang jelas antara mereka yang menganggap UMKM sebagai usaha utama dan mereka yang hanya menganggapnya sebagai kegiatan sampingan. Pelaku UMKM yang mampu

mencurahkan waktunya untuk produksi secara konsisten mempunyai strategi yang lebih canggih dalam mengelola usahanya, baik dari segi produksi, pemasaran, maupun penanganan uang.

Sebaliknya bagi mereka yang hanya berproduksi dalam jangka waktu panjang, konsistensi dalam produksi dan pemasaran biasanya menjadi kendala. Akibatnya, usaha mereka gagal karena tidak memiliki tujuan yang jelas dan tidak responsif terhadap permintaan pelanggan. Pemasaran juga berperan penting dalam optimalisasi produk UMKM. Bahkan produk yang bagus pun akan memburuk jika tidak didukung oleh strategi pemasaran yang tepat. Seiring kemajuan teknologi digital, media sosial dan platform e-commerce menjadi alat yang semakin ampuh untuk meningkatkan daya pemasaran. Menurut pengamatan peneliti memang benar banyaknya produk yang sejenis di Panggungharjo oleh karena itu dibutuhkan inovasi-inovasi yang baru agar mereka mampu bersaing di pasar, kemudian masih ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan media sosial untuk pemasaran. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya pola pikir juga menjadi salah satu faktor penghambat usaha karena kurangnya pelatihan dan pendampingan sumber daya manusia. Kesimpulannya harus ada perubahan pola pikir untuk pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan tidak sekedar kegiatan sampingan tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang serius. Pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, dan manajemen waktu sangat penting agar UMKM dapat semakin berkembang dan berdaya saing.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku koordinator RPK, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi faktor-faktor yang mempengaruhi sumber daya UMKM ini bermacam-macam karakteristik tergantung kebutuhan mereka. Jadi ada yang kendalanya di permodalan, pemasaran, izin usaha, dan kemasan semua itu kami uapaya untuk memfasilitasi agar mereka bisa naik kelas. Yang kami lakukan adalah upaya melakukan pembinaan dan pendampingan yang dilakukan setiap bulan sesuai dengan kebutuhsn mereka. Kemudian faktor yang paling penting adalah masalah usia yang mana pelaku UMKM yang masuk di RPK ini juga banyak yang berusia 50-keatas sehingga dalam pendampingan dan pelatihan seperti permodalan, pemasaran, izin usaha, dan kemasan serta penggunaan digital butuh effort yang lebih. Selain itu mental yang benra-benar siap dan kuat karena mereka harus percaya diri dengan produknya bahwa produk mereka itu punya value dengan yang lain” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Aisyah selaku koordinator RPK diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Faktor-faktor yang mempengaruhi UMKM sangat bervariasi, tergantung pada karakteristik dan kebutuhan masing-masing individu pemilik usaha. Mulai dari permodalan, pemasaran, izin usaha, hingga pengemasan, semua faktor ini diperlukan agar mereka dapat berkembang dan sukses di dunia usaha. Upaya yang dilakukan dengan memberikan pelatihan dan pendampingan setiap bulan sesuai kebutuhan merupakan cara yang strategis untuk membantu pelaku UMKM menghadapi segala kendala yang ada. Kemudian faktor usia juga mempengaruhi dalam hal akses terhadap permodalan, strategi pemasaran, izin usaha, pengemasan, dan teknologi digital. Karena mereka belum terbiasa dengan teknologi modern dan strategi pemasaran oleh karena itu butuh effort yang banyak.

Selain itu faktor mental juga berperan besar dalam keberhasilan UMKM. Pelaku UMKM harus memiliki keyakinan terhadap produknya dan

mengetahui bahwa produknya mempunyai nilai yang dapat dibandingkan dengan produk lain. Ketahanan mental yang kuat dan ketekunan dalam menghadapi pengembangan pasar sangat penting jika pelaku UMKM ingin terus bertumbuh. Oleh karena itu, pendampingan tidak hanya terfokus pada aspek teknis saja, namun juga pada pengembangan motivasi diri dan kesadaran diri agar pelaku semakin sadar akan potensi yang dimilikinya. Menurut pengamatan peneliti memang ada beberapa faktor yang menghambat sumber daya manusia seperti faktor umur dan mental. Kesimpulanya Perekembangan UMKM dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain permodalan, pemasaran, izin usaha, dan pengemasan, berdampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Pelatihan dan pedampingan yang dilakukan secara rutin sangat penting dalam membantu mereka menghadapi tantangan itu Namun tantangan terbesar muncul pada pelaku UMKM yang berusia di atas 50 tahun, terutama dalam adaptasi digital dan pengelolaan usaha saat ini sehingga memerlukan upaya yang lebih fokus dan intens. Selain itu, mental dan rasa percaya diri juga menjadi faktor penting keberhasilan UMKM. Oleh karena itu, pendampingan perlu bersifat teknis dan motivatif agar pelaku UMKM terus berkembang dan sukses.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Faktor-faktor yang saya alami dalam pengembangan sumber daya manusia ini seperti belum terlalu bisa menggunakan media sosial tetapi karena saya daya tanggapnya agak lama jadi selama pelatihan dan pendampingan saya ikuti tetapi untuk menerapkannya saya masih agak kesulitan. Hal ini disebabkan karena usia saya yang sudah agak tua dan perbedaan zaman ya mba. Kemudian dalam hal inovasi produk ya karena banyak produk yang sama jadi setelah saya mengikuti pelatihan-pelatihan

saya sudah bisa membuat produk saya menjadi farian mba". (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Ani diatas maka, peneliti dapat menganalisis Penyebab utama permasalahan ini adalah lambatnya adaptasi terhadap teknologi digital yang cukup lambat. Hal ini menjadi tantangan, terutama bagi pelaku UMKM yang usianya senior, karena perbedaan usia dan perbedaan zaman. Namun, setelah mengikuti pelatihan-pelatihan, mereka mengembangkan beragam produk, yang merupakan langkah baik dalam mendongkrak pertumbuhan bisnis. Hal ini menandakan meskipun terdapat tantangan dalam pemasaran digital, namun kemampuan berinovasi masih cukup kuat. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya walaupun penggunaan media sosial belum terlalu baik karena faktor umur dan daya tanggap yang sudah kurang. Kesimpulanya tantangan utama yang dihadapi pelaku UMKM adalah penerapan strategi pemasaran digital. Tetapi pelatihan yang diikuti juga membawa dampak yang baik bagi pelaku UMKM karena dapat mengembangkan variasi produk. Hal ini perlu diterapkan lagi pendampingan yang lebih personal didalam penggunaan media sosial secara bertahap dengan cara yang lebih mudah dimengerti.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya:

“Kendala saya didalam pengembangan sumber daya manusia ini mungkin dalam hal persamaan jenis produk ya mba, karena disini yang produknya sama cukup banyak. Tetapi ketika saya masuk di RPK setelah mengikuti berbagai pelatihan dan pendampingan saya saya mulai rubah teknik produksi saya yang mana dulunya selalu stok tetapi sekarang setelah habis dulu baru saya produksi lagi. Kemudian motifnya juga saya buat beda dari yang lain” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawacara dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa kendala yang di hadapai pelaku UMKM ini seperti adanay persamaan jenis produk. Namun disatu sisi karena sudah bergabung di RPK selama mengikuti pelatihan dan pendampingan telah mengubah teknik produksi yang dulunya selalu stok tetapi sekarang produknya habis dulu baru bisa diproduksi lagi. Perubahan-perubahan ini menunjukkan bahwa para pelaku mampu beradaptasi dengan kondisi pasar dan memahami pentingnya inovasi didalam usaha. Dengan terus mengembangkan strategi dan memperkuat daya tarik produk, usaha yang dijalankan akan semakin memiliki daya saing yang kuat. Kesimpulanya dari kendala yang dihadapi pelaku UMKM diatas maka ditemukan bahwa adanya peran penting dari RPK bagi pelaku UMKM.

Hal yang berbeda disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Kendala saya didalam pengembangan sumber daya manusia ini seperti akses pemasaran, inovasi produk, dan teknologi digital. Hal ini karena saya juga tidak mengikuti program dari pemerintah Kalurahan oleh karena apa-apa saya sendiri. Jadi kendala saya ketika produk saya belum laku berarti modal saya belum kembali kemudian untuk pemasarannya saya masih dor to dor masih dari warung ke warung, pasar ke pasar jadi belum tetap. Untuk inovasi produk kan banyak juga yang usahanya sama dengan saya jadi persaingannya banyak apalagi usia saya juga sudah senior jadi ya sebisanya saja saja, karena tidak mengikuti pelatihan dan pendampingan yang mendukung” (wawancara pada tanggal 26 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Ani diatas maka, peneliti dapat menganalisis bahwa terdapat beberapa faktor utama dalam pengembangan sumber daya manusia yang ada di Panggunharjo yaitu seperti akses pasar,

inovasi produk dan adaptasi terhadap media sosial. Dalam hal pemasaran, cara yang digunakan sangat konvensional, yaitu berpindah dari satu pasar ke pasar lain dan dari satu warung ke warung lainnya. Model pemasaran ini mempunyai karakteristik yang unik, terutama dalam hal konsistensi dan harga pasar yang sangat rendah. Meskipun pemerintah telah memberikan akses pemasaran melalui RPK, masih ada pelaku UMKM yang tetap ingin melakukan pemasaran sendiri karena mereka bearanggapan bahwa kalau menunggu di RPK pemasarannya lama. Akan tetapi pemasaran rumahan ini memerlukan lebih banyak waktu dan tenaga dibandingkan menggunakan jaringan yang sudah ada. Kemudian dalam hal inovasi produk, persaingan yang tinggi menjadi faktor yang menyebabkan sulitnya pertumbuhan produk. Banyak pelaku UMKM yang menjadikan inovasi sebagai prioritas agar produk mereka memiliki kualitas yang tinggi. Namun bagi pengguna usia senior, keterbatasan dalam menyelesaikan pelatihan dan mengembangkan inovasi produk menjadi tantangan tersendiri. Berdasarkan hasil pengamatan bahwasanya di dalam hal pengembangan sumber daya manusia masih ada pelaku UMKM yang belum mengikuti pelatihan dan pendampingan mereka kesusahan dalam akses pasar, inovasi produk dan adaptasi terhadap media sosial. Kesimpulanya faktor yang menghambat pengembangan UMKM ini seperti pemasaran, inovasi produk adaptasi terhadap media sosial. Hal ini yang menyebabkan pemasarannya masih dor to dor karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang baik

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Daniman selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“ Yang menjadi faktor penghambatnya adalah persamaan produk yang mana usaha saya kan batik pengantin jadi sekarang banyak modifikasi batik yang lebih modern sehingga dalam pemasaran belum maksimal. Karena usaha saya mandiri jadi apa-apa saya sendiri tanpa bantuan pemerintah Kalurahan. Karena waktu tahun 2021 kemarin saya sempat ikut bazar tetapi barang-barang saya rusak pemerintah tidak mau ganti rugi maka, dari situ saya tidak mau ikut pemerintah Kalurahan lagi dan untuk pelatihan dan pendampingan saya tidak ikut terlibat semuanya secara otodidak” (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Daniman diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Faktor utama yang mempengaruhi pengembangan sumber daya UMKM adalah persaingan dalam inovasi produk, khususnya di industri batik pengantin. Karena saat ini semakin banyak modifikasi batik dengan desain yang lebih kekinian, oleh karena itu yang menjadi tantangan utama adalah bagaimana agar setiap produk dapat menonjol di pasaran. Karena konsumen memiliki lebih banyak pilihan dan lebih cenderung mencari desain yang lebih sesuai dengan tren saat ini. Selain itu keterbatasan dukungan karena usaha yang dijalankan sifatnya mandiri tanpa bantuan pemerintah Kalurahan dan pengalaman buruk pada bazar tahun 2021, ketika barang dagangan mengalami kerusakan dan kurang ganti rugi dari pemerintah, mengakibatkan menurunnya kepercayaan terhadap program-program yang ditawarkan pemerintah saat itu. Akibatnya, pelaku UMKM ingin menjalankan usaha secara mandiri tanpa terlibat dalam program apapun. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya karena ketidak percayaanya kepada pemerintah Kalurahan maka di dalam pelatihan dan pendampingan mereka tidak dapat mendapatkan kesempatan tersebut. Kesimpulanya Dalam pemasaran, persaingan dengan produk batik modern merupakan suatu tantangan, terutama

karena tren yang terus berkembang. Keterbatasan dukungan dari luar juga memperberat tantangan, karena setiap aspek usaha harus dilakukan secara mandiri. Strategi yang dapat digunakan untuk mengatasi tren ini adalah dengan mencari cara agar produk akhir memiliki desain khas yang unik dan berbeda dari batik pengantin kontemporer yang sudah ada. Selain itu, melanjutkan akses ke program pemasaran atau kemitraan lain yang dapat membantu pelaku dalam meningkatkan kinerja jaringan.

Dari hasil wawancara bersama dengan beberapa narasumber di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang menghambat pengembangan sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM di dalam upaya pemerintah Kalurahan untuk mengembangkan UMKM yaitu faktor yang menyebabkan pengembangan UMKM di Kalurahan Panggunharjo salah satunya adalah masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di RPK sehingga pertumbuhan UMKM adanya ketimpangan disana yang mana mereka yang bergabung di RPK sudah berkembang sedangkan yang belum bergabung belum. Kemudian persaingan antar produk yang sejenis menjadi faktor utama yang dihadapi pelaku UMKM di Panggunharjo. Oleh karena itu, diperlukan inovasi dalam pengembangan produk agar mempunyai nilai lebih tinggi dan mampu bersaing di pasar yang lebih luas, kemudian pola pikir juga menjadi penghambat oleh karena itu harus ada perubahan pola pikir untuk pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan tidak sekedar kegiatan sampingan tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang serius. Pendidikan dan pelatihan mengenai manajemen usaha, strategi pemasaran, dan manajemen waktu sangat penting

agar UMKM dapat semakin berkembang dan berdaya saing. Pelatihan dan pedampingan yang dilakukan secara rutin sangat penting dalam membantu mereka menghadapi tantangan itu Namun tantangan terbesar muncul pada pelaku UMKM yang berusia di atas 50 tahun, terutama dalam adaptasi digital dan pengelolaan usaha saat ini sehingga memerlukan upaya yang lebih fokus dan intens selain itu, mental dan rasa percaya diri juga menjadi faktor penting keberhasilan UMKM

### **3. Sarana dan Prasarana**

Sarana dan prasarana UMKM adalah elemen penting didalam mendukung pertumbuhan dan keberlanjutan suatu ushaa. Sarana ini merujuk pada fasilitas yang pergunakan langsung didalam kegiatan produksi sedangkan prasarana adalah infrastruktur yang menunjang kelangsungan usaha.

Maka dilakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk sarana seperti peralatan produksi, bahan baku dan peralatan kemasan itu semua ada di RPK jadi kami mengadakan RPK kemudian RPK memfasilitasi pelaku-pelaku UMKM yang masuk disana. Kemudian untuk prasarana ini seperti tempat untuk produksi, terus akses transportasi yang sudah baik, dan jaringan internet yang memadai. Kemudian untuk mereka yang tidak masuk RPK tetap kami fasilitasi dan beri dukungan agar bisa bergabung” (wawancara pada tanggal 14 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah Panggungharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa RPK Panggungharjo berfungsi sebagai sarana yang mendukung pertumbuhan UMKM dengan menyediakan berbagai layanan penting, seperti peralatan produksi, bahan bangunan, dan peralatan pengemasan. Ketersediaan fasilitas

tersebut sangat membantu pelaku UMKM dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi produknya tanpa harus mengeluarkan biaya mahal untuk membeli sendiri barang tersebut. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya selain sarana produk, prasarana yang tersedia juga menjadi faktor pendukung yang krusial. Ketersediaan tempat produksi yang memadai memberikan kenyamanan bagi pelaku UMKM dalam menjalankan proses produksinya. Transportasi yang efektif juga berkontribusi terhadap kesejahteraan secara keseluruhan dengan mempermudah distribusi produk, baik untuk penjualan lokal maupun pengiriman internasional. Selain itu, jaringan internet yang stabil semakin meningkatkan kemampuan UMKM dalam memanfaatkan teknologi digital untuk promosi dan pemasaran produknya. Dengan hasil yang baik, UMKM dapat menjangkau khalayak yang lebih luas melalui platform digital, marketplace, dan media sosial semua di fasilitasi oleh pemerintah baik yang masuk RPK maupun yang tidak masuk di RPK. Kesimpulanya RPK menjadi pusat fasilitas dalam mendukung pertumbuhan UMKM dengan menyediakan fasilitas seperti sarana produksi, peralatan kemasan, dan temapat produksi namun tantangannya adalah memastikan fasilitas dimanfaatkan secara optimal dan semakin banyak pelaku UMKM yang ikut bergabung agar UMKM di Panggunharjo berkembang lebih merata dan berkelanjutan.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk sarana dan prasarana disini kami fasilitasi ya tadi di RPK semua nanti dilakukan di RPK. Kemudian ada pasar id. Yang mendukung pemasaran produk UMKM secara digital. Kemudian persebaran lokasi UMKM yang mana peta ini membantu mengidentifikasi dan mengakses

berbagai UMKM yang ada di Kalurahan. Kemudian untuk akses transportasi juga sudah baik, listrik dan air aman. Dan untuk lembaga pendukungnya ada PT Penggadaian, dan dinas-dinas” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Arif Suryanto lurah Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa RPK sebagai fasilitas utama sangat penting dalam membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan efisiensi dan kualitas produknya. Dengan seluruh kebutuhan produksi, bahan baku, dan peralatan pengemasan tersedia di RPK. Dari sisi pemasaran, pasar ID berfungsi sebagai platform digital yang memberikan akses lebih luas kepada pelaku UMKM untuk memasarkan produknya secara online. Dengan Pasar ID, UMKM dapat menjangkau konsumen di luar maupun didalam wilayahnya dan meningkatkan penjualan. Selain itu, persebaran UMKM merupakan sebuah inovasi yang sangat membantu dalam mengidentifikasi dan memudahkan operasional berbagai usaha kecil di Kalurahan. Hal ini tidak hanya membantu pemerintah, namun juga bermanfaat bagi konsumen yang ingin membeli barang-barang lokal dengan lebih mudah. Dengan adanya informasi yang jelas mengenai lokasi UMKM, potensi kerjasama antar pelaku usaha juga dapat meningkat. Secara keseluruhan, ketersediaan sarana dan prasarana yang baik, dukungan platform digital untuk pemasaran, serta kerja sama dengan berbagai lembaga menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan UMKM. Tantangan ke depan adalah bagaimana memastikan bahwa semua pelaku UMKM benar-benar memanfaatkan fasilitas yang tersedia secara optimal, dan bagaimana meningkatkan literasi digital agar pemasaran online bisa dilakukan secara lebih efektif. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya

memang ada fasilitas adri pemerintah Kalurahan yang berkaitan dengan sarana dan prasarana tetapi fasilitas tersebut tidak semua pelaku UMKM dapat mengaksesnya karena tidak semua pelaku UMKM masuk di RPK. Kesimpulanya selain RPK, fasilitas yang diberikan pemerintah Kalurahan ini seperti peta persebaran usaha yang mana ini juga dapat membantu konsumen untuk menemukan produk lokal.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh oleh Bapak Agung Prananto selaku Pamong Kalurahan (ULU-Ulu), berikut hasil wawancaranya:

“Jadi selain pelatihan dan pendampingan kami juga menyediakan sarana produksi seperti RPK ini. Kemudian tidak hanya dapur disana juga da sorum yang nanti digunakan untuk pusat pemasaran produk UMKM. Kemudian katalog digital yang memuat produk-produk digital. Jadi cukup banyak yang kita lakukan dan fasilitas untuk UMKM itu sendiri. Cuma dalam perjalanan kami juga butuh evaluasi mungkin ada beberapa hal yang perlu dibenahi” (wawancara pada tanggal 2 Januari 2025)

Berdasarkan wawancara dengan Bapak Bapak Agung Prananto selaku Pamong Kalurahan (ULU-Ulu), diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Upaya pengembangan UMKM di Panggunharjo sudah cukup komprehensif, mulai dari pelatihan dan pedampingan hingga penyediaan fasilitas produksi dan pemasaran. Pemanfaatan RPK sebagai tempat produksi sangat membantu UMKM dalam meningkatkan kualitas dan efisiensi usahanya. Dengan tersedianya fasilitas produksi, pelaku UMKM, khususnya yang bergerak di bidang kuliner, dapat memanfaatkan alat-alat tersebut untuk menjamin standar kualitas dan kebersihan produk yang lebih tinggi. Selain itu, status sorum sebagai situs pemasaran memberikan peluang bagi UMKM untuk lebih meneliti dan menjual produknya. Kemudian adanya katalog digital yang membantu

konsumen dalam menemukan produk unggulan. Menurut pengamatan peneliti bahwa dengan bantuan berbagai fasilitas tersebut, UMKM di Panggunharjo memiliki akses yang lebih mudah terhadap peralatan produksi dan pemasaran yang lebih kekinian sehingga memberikan lebih banyak peluang untuk berkembang. Meskipun banyak upaya yang sudah dilakukan tetapi evaluasi program juga harus agar dapat memastikan bahwa fasilitas dan strategi yang diterapkan dapat benar-benar memebrikan dampak yang maksimal bagi pelaku UMKM. Beberapa aspek yang perlu diperhatikan didalam evaluasi adalah sejauh mana pelaku UMKM telah mengakses teknologi digital dalam pemasaran agar program ini dapat terus ditingkatkan demi kemajuan UMKM di Panggunharjo. Kesimpulanya pemerintah sudah memfasilitasi pelaku UMKM dengan program-program yang ada tetapi program tersebut juga butuh evaluasi agar dapat memastikan bahwa fasilitas dan strategi yang diterapkan dapat benar-benar memebrikan dampak yang maksimal bagi pelaku UMKM.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Aisyah selaku koordinator Rumah Produksi Komunitas, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi disini RPK ini menjadi tempat untuk produksi, pemasaran dan distribusi. Kami memfasilitasi pelaku UMKM yang ada di RPK ini. Selain itu disini juga terdapat ruang pameran produk. Fasilitas juga di lengakpi dengan peralatan kemasan yang modern, sehingga UMKM dapat mengasilkan produk dan kemasan yang menarik. Dan disana juga ada ruang konsultasi untuk pelaku UMKM dengan pendamping. Sehingga jaringan dan kapasitas usaha terus dikembangkan”. (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Aisyah selaku koordinator RPK diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa RPK Panggunharjo berperan sebagai tempat yang tidak hanya melakukan peningkatan produksi saja tetapi

juga mendistribusikan dan menjual. Salah satu keunggulan dari fasilitas tersebut adalah tersedianya peralatan pengemasan yang modern, sehingga memungkinkan UMKM meningkatkan tampilan produknya agar lebih profesional dan profesional. Pengemasan yang baik tidak hanya meningkatkan penjualan produk tetapi juga membantu meningkatkan harga dan penjualan di pasaran. Karena kemasan merupakan salah satu faktor terpenting yang dapat mempengaruhi keputusan pembelian konsumen. Selain fasilitas produksi dan penjualan, RPK juga memberikan layanan konsultasi kepada pelaku UMKM untuk berdiskusi dan mendapatkan masukan. Menurut pengamatan peneliti bahwa kawasan ini menjadi lokasi strategis bagi para pelaku UMKM untuk memperkuat jaringan, memperoleh pelanggan baru, dan meningkatkan kapasitas usahanya. Dengan hadirnya pendampingan lanjutan, UMKM dapat lebih mudah merespon tantangan bisnis dan perubahan pasar yang terus berkembang. Kesimpulannya Sarana dan prasarana yang ada di RPK ini sangat membantu pelaku UMKM yang bergabung di RPK.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi saya kan mba masuk dan bergabung dengan RPK jadi untuk sarana dan prasarana saya tidak terlalu mengalami kesusahan. Mungkin awal-awal sebelum masuk RPK saya kesusahan di tempat produksi, saran untuk pengemasan tetapi setelah bergabung di RPK saya terbantu mba jadi RPK ini sangat membantu pelaku UMKM seperti saya ini mba” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka, peneliti dapat menganalisis bahwa setelah masuk di RPK pelaku UMKM di Panggunharjo dapat terbantu dengan

sarana dan prasarana yang ada disana. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya pelaku UMKM yang telah bergabung di RPK ini sangat terbantu dengan adanya RPK. Kesimpulanya jika banyak pelaku UMKM yang ikut bergabung maka UMKM di Panggunharjo berkembang lebih merata dan berkelanjutan.

Hal yang senada juga disampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Untuk sarana dan prasarana disni kami sudah terbantu dengan adanya RPK. Karena didalam RPK ini menyediakan tempat produksi, bahkan pusat pemasaran, dengan alat-alat yang canggih dan bersih jadi kami tidak kesusahan dalam memikirkan tempat produksi yang layak dan tempat pemasaran. Jadi program dari pemerintahan Kalurahan ini sangat membantu pelaku UMKM yang masuk di RPK” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa RPK yang disediakan oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo sangat bermanfaat dan masyarakat khususnya Pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo sangat terbantu akan kehadiran RPK yang difasilitasi oleh Pemerintah Kalurahan. Didalam RPK ini juga selain membantu pelaku UMKM dalam menyediakan tempat produksi dengan peralatan yang canggih dan higienis. Serta lewat RPK ini juga pemerintah Kalurahan membantu pelaku UMKM dalam hal memasarkan hasil produksi mereka. Kesimpulanya dengan adanya RPK ini sangat membantu pelaku UMKM dalam hal produksi, maupun pemasaran.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungahrjo, berikut hasil wawancaranya :

“Setelah saya bergabung dengan RPK ini mba saya merasa terbantu aplagi dengan umur saya yang begini, saya tidak lagi memikirkan tempat produksi yang layak apalagi pemasaran karena disini semuanya ada. Tempatnya bersih-bersih dan canggih yang sangat membantu kami. Jadi apa yang kurang dari kami disini dibantu dan difasilitasi”. (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Martina selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Martina selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat 2 disampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM yang ada di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya:

“Saya kan mba tidak bergabung di programnya pemerintah jadi untuk sarana dan prasarana saya sendiri terkadang saya kesusahan dalam bahan baku, peralatan kemasan, dan pemasaran sangat apa adanya. Mungkin juga karean saya kurang ikut pelatihan dan pendampingan jadi hasilnya juga ya intinya bisa memenuhi kebutuhan mba” (wawancara pada tanggal 26 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo diatas maka, peneliti dapat menganalisis bahwa walaupun dengan kehadiran pemerintah Kalurahan yang aktif pun masih terdapat sejumlah pelaku UMKM yang belum tergabung dalam program RPK dan pelatihan yang dilakukan, oleh sebab itu penulis berharap bahwa pemerintah Kalurahan dapat lebih sering melakukan pelatihan secara rutin untuk dapat menjaring pelaku usaha yang belum tergabung tersebut. Dari hasil pengamatan juga peneliti melihat bahwa tanpa kehadiran dan keikutsertaan pelaku usaha dalam program RPK dan pelatihan yang dilakukan oleh pemerintah Kalurahan Panggunharjo, bisa dilihat bahwa pelaku UMKM sangat sadar akan keterbatasan mereka seperti dalam bahan baku, pembuatan kemasan dan

pemasaran, oleh sebab itu besar harapan mereka untuk dapat kedepannya mendapatkan perhatian oleh pemerintah Kalurahan. Kesimpulanya dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah Kalurahan dalam membantu pelaku UMKM yang belum masuk di RPK dan kedasaran dari pelaku UMKM dalam memajukan usaha mereka.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh Bapak Daniman selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya kan mandiri ya mba jadi untuk sarana dan prasarana saya sendiri mulai dalam hal bahan baku, peralatan produksi, peralatan pengemasan bahkan di dalam hal pemasaran sekalipun saya benar-benar sendiri. Oleh karena saya ini tidak mengikuti program dari pemerintah Kalurahan walaupun ada saya lebih memilih sendiri saja”. (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Dari hasil wawancara bersama dengan Bapak Daniman selaku pelaku UMKM diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa selain pelaku usaha yang terjaring dalam program RPK dan pelatihan yang dibuat oleh pemerintah Kalurahan, terdapat juga pelaku usaha yang dengan sendiri mengelola usaha UMKM nya mulai dari permodalan, produksi dan pemasaran hasil produksi ia melakukan secara mandiri. Oleh sebab itu besar harapan bahwa pemerintah Kalurahan dapat bekerjasama dengan pelaku usaha tersebut dalam program RPK, dengan tujuan dapat memupuk semangat dari para pelaku usaha yang sedang dan akan Memulai usaha mereka, dan mengingatkan mereka bahwa kedepan mereka pasti bisa menjadi mandiri seperti pelaku UMKM tadi, dengan memupuk semangat kemandirian dari para pelaku UMKM lainnya, sehingga dapat terwujudnya kemandirian UMKM di Kalurahan Panggunharjo. Kesimpulanya masih ada pelaku UMKM yang belum masuk di programnya

pemerintah mereka masih memilih untuk mandiri oleh karena itu harapan untuk pemerintah Kalurahan agar melakukan pendekatan untuk pelaku UMKM yang belum masuk RPK agar terwujudnya kemandirian UMKM di Kalurahan Panggungharjo.

Dari hasil wawancara dengan beberapa narasumber diatas peneliti dapat menyimpulkan bahwa adanya faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Kalurahan Panggungharjo ini seperti pengembangan sumber daya manusia pelaku UMKM yang meliputi keterampilan pemasaran, manajemen keuangan, kemampuan inovasi produk dan pemahaman teknologi. Dan sarana dan prasarana yang ada di Kalurahan Panggungharjo. Pengembangan UMKM di Kalurahan Panggungharjo secara keseluruhan dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain permodalan, pemasaran, izin usaha, dan pengemasan, berdampak signifikan terhadap pertumbuhan UMKM. Kemudian untuk pelaku UMKM yang masuk di RPK memiliki faktor penghambat seperti pada pelaku UMKM yang berusia di atas 50 tahun atau usia senior terutama dalam adaptasi digital dan pengelolaan usaha saat ini sehingga memerlukan upaya yang lebih fokus dan intens. Kemudian untuk pelaku UMKM yang tidak bergabung di RPK juga memiliki faktor penghambat seperti pemasaran, inovasi produk dan teknologi yang belum dikuasi. Hal ini yang menyebabkan adanya ketimpangan pada pertumbuhan UMKM.

Kemudian untuk sarana dan prasarana bahwa kehadiran pemerintah Kalurahan Panggungharjo sangat kuat, kepada pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo. Dapat dilihat dari program fasilitasi yang di siapkan dan di

jalankan oleh pemerintah Kalurahan untuk memaksimalkan dan memodernisasi UMKM di Kalurahan Panggunharjo lewat kehadiran RPK. lewat program RPK selain menyiapkan sarana dan prasarana produksi serta pemasaran, pemerintah Kalurahan juga Melengkapi dengan peralatan kemasan yang modern guna memodernisasi hasil produksi UMKM. Dengan memodernisasi kemasan diharapkan hasil produksi UMKM selain dijual di sorum RPK dapat menjangkau pasar yang luas, seperti toko toko di kota dan pasar sekitar dan Indomaret Alfamart. Didalam RPK juga terdapat ruang konsultasi yang bertujuan untuk melakukan konsultasi pendamping kepada pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, seputar proses produksi sampai dengan pemasaran. Dan diharapkan juga dengan konsultasi yang aktif dapat membangun jaringan usaha yang luas bagi pelaku UMKM dan juga melalui RPK ini dapat menghadirkan kapasitas dan kemandirian UMKM di Kalurahan Panggunharjo.

#### **4. Pemasaran dan teknologi**

Agar bisa berkembang, pelaku UMKM perlu mendapatkan pelatihan dalam pemasaran digital, strategi branding, dan pemanfaatan teknologi agar usaha mereka bisa bersaing dan lebih mudah menjangkau pelanggan yang lebih luas. Maka di lakukan wawancara dengan Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Dalam hal pemasaran saya rasa tidak terlalu sulit karena kami mengadakan bazar yang di lakukan setiap tahun sekali untuk memperingati hari jadi Kalurahan untuk itu di sana pelaku UMKM dapat memasarkan produk-produk mereka. Bazar ini memberikan kesempatan bagi para pelaku UMKM untuk memperkenalkan dan memasarkan produk mereka secara langsung kepada masyarakat, sehingga dapat meningkatkan penjualan dan memperluas jangkauan pelanggan. Kemudian dalam hal teknologi kami juga melakukan pelatihan digital marketing yang dapat

membantu pelaku UMKM untuk memahami cara memanfaatkan platform digital seperti media sosial dan marketplace dalam memasarkan produk.” (wawancara pada tanggal 14 Janurai 2025)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Wahyudi Anggro Hadi selaku mantan lurah Panggunharjo diatas maka peneliti dapat menganalisis bahwa di dalam hal pemasaran, para pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo mendapatkan kesempatan untuk memasarkan produk mereka melalui bazar tahunan yang diadakan dalam rangka peringatan hari jadi Kalurahan. Bazar ini menjadi ajang yang sangat bermanfaat bagi UMKM karena mereka dapat langsung berinteraksi dengan pembeli, mengenalkan produk mereka, serta memperluas jangkauan pelanggan. Dengan adanya kegiatan ini, pelaku UMKM bisa meningkatkan penjualan dan mendapatkan umpan balik dari masyarakat mengenai produk mereka. Kemudian dalam bidang teknologi, pelatihan digital marketing juga menjadi salah satu upaya yang dilakukan untuk membantu UMKM beradaptasi dengan perkembangan zaman. Melalui pelatihan ini, para pelaku usaha diajarkan cara menggunakan platform digital seperti media sosial dan marketplace untuk mempromosikan serta menjual produk mereka. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya memang pemerintah sudah melakukan bazar yang sangat bermanfaat bagi UMKM karena mereka dapat langsung berinteraksi dengan pembeli, mengenalkan produk mereka, serta memperluas jangkauan pelanggan tetapi bazar tersebut tidak semua pelaku UMKM di Panggunharjo ikut terlibat dan di dalam pelatihan workshop digital juga belum semuanya pelaku UMKM terlibat karena faktor umur, kemudian ada yang tidak mendapatkan informasinya. Kesimpulanya adanya faktor yang

menghambat pelaku UMKM di dalam hal pemasaran dan digitalisasi seperti faktor umur yang mana pelaku UMKM merasa dengan umur yang sudah senior daya tanggap untuk media sosial mulai menurun bahkan ada yang tidak menggunakan media sosial kemudian faktor kurangnya akses informasi dari pemerintah Kalurahan karena untuk informasi terkait pelatihan dan pendampingan.

Hal serupa juga di sampaikan oleh Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Kami memprioritaskan pemesanan makanan dari UMKM dalam setiap acara resmi guna mendukung pertumbuhan UMKM. Langkah ini dilakukan sebagai bentuk dukungan terhadap pertumbuhan UMKM agar pelaku UMKM mendapatkan peluang lebih besar dalam meningkatkan penjualan dan pendapatan. Kemudian di dalam pengembangan digital kami melakukan pelatihan dan pendampingan lewat RPK jadi di sana pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dalam hal pemakaian media sosial untuk promosi produk” (wawancara pada tanggal 7 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan oleh Bapak Arif Suryanto selaku lurah Panggungharjo maka peneliti dapat menganalisis bahwa kami selalu mengutamakan pemesanan makanan dari pelaku UMKM dalam setiap acara resmi yang diselenggarakan oleh pemerintah Kalurahan. Langkah ini bertujuan untuk memberikan peluang lebih besar bagi pelaku UMKM dalam meningkatkan penjualan serta pendapatan mereka. Selain itu, dalam upaya mendukung perkembangan UMKM di era digital, kami juga menyediakan pelatihan dan pendampingan melalui RPK. Di sana, para pelaku UMKM diberikan pelatihan tentang cara menggunakan media sosial secara efektif untuk mempromosikan produk mereka. Melalui pelatihan ini, diharapkan UMKM dapat memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas jangkauan pasar,

menarik lebih banyak pelanggan, serta meningkatkan daya saing usaha mereka. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya memang pemerintah Kalurahan sudah melakukan upaya pemasaran dan teknologi di dalam membantu pelaku UMKM tetapi upaya tersebut belum maksimal karena pemesanan hanya di satu tempat saja tidak bergantian sehingga tidak merata dan untuk digital seperti penggunaan media sosial belum semuanya paham dan mengerti. Kesimpulanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemasaran dan digital dalam pengembangan UMKM seperti pemesanan hanya di satu tempat saja tidak bergantian sehingga tidak merata dan untuk digital seperti penggunaan media sosial belum semuanya paham dan mengerti karena yang masuk di RPK ini tidak semua pelaku UMKM di Panggunharjo.

Hal yang serupa juga disampaikan oleh ketua LPMKAL Bapak Abdul Razak berikut hasil wawancaranya :

“Pemasaran dan digitalisasi di Panggunharjo sudah difasilitasi di dalam di RPK disana pelaku UMKM di latih dan di dampingi dalam hal promosi, pemasaran, kemudian pembuatan akun media sosial, pemotretan produk yang dapat membantu pelaku UMKM di dalam meningkatkan UMKM. Kemudian di dalam penguasaan media sosial yang belum terlalu baik” (wawancara pada tanggal 3 Januari 2025)

Berdasarkan hasil wawancara dengan ketua LPMKAL Bapak Abdul Razak maka peneliti dapat menganalisis bahwa di Panggunharjo, pemasaran dan digitalisasi untuk pelaku UMKM sudah difasilitasi melalui RPK. Di sana para pelaku UMKM mendapatkan pelatihan dan pendampingan dalam berbagai aspek, seperti cara melakukan promosi yang efektif, strategi pemasaran yang tepat, serta pembuatan akun media sosial untuk bisnis mereka. Selain itu, mereka juga dibantu dalam pemotretan produk agar tampilan produk lebih menarik dan

profesional. Namun masih ada beberapa pelaku UMKM yang belum sepenuhnya menguasai penggunaan media sosial untuk pemasaran. Hal ini menjadi tantangan tersendiri, karena di era digital saat ini, kemampuan dalam memanfaatkan media sosial sangat penting untuk menjangkau pasar yang lebih luas. Berdasarkan pengamatan peneliti bahwasanya ada upaya dari pemerintah Kalurahan di dalam pemasaran dan digitalisasi maka di lakukan pendampingan dalam berbagai aspek, seperti cara melakukan promosi yang efektif, strategi pemasaran yang tepat, serta pembuatan akun media sosial untuk bisnis mereka tetapi ada pelaku UMKM yang tidak masuk di dalam RPK karena faktor kurangnya informasi mengenai keberadaan dan manfaat RPK itu sendiri, faktor lain bisa berasal dari kurangnya pemahaman tentang pentingnya digitalisasi dan pemasaran modern. Beberapa pelaku UMKM mungkin masih merasa cukup dengan metode pemasaran tradisional dan belum melihat perlunya bergabung dalam program seperti RPK. Kesimpulanya ada beberapa faktor yang mempengaruhi pemasaran dan digital dalam pengembangan UMKM seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya digitalisasi dan pemasaran modern dan beberapa pelaku UMKM mungkin masih merasa cukup dengan metode pemasaran tradisional.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Aisyah selaku koordinator Rumah Produksi berikut hasil wawancaranya :

“Jadi faktor yang menghambat pengembangan UMKM di dalam pemasaran dan digital ini seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital, banyak pelaku UMKM yang belum terbiasa atau tidak mengetahui cara memanfaatkan media sosial dan platform digital untuk memasarkan produk mereka secara lebih luas dan tidak semua pelaku UMKM memiliki smartphone yang memadai, serta

akses internet yang stabil untuk menjalankan strategi pemasaran digital” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Aisyah selaku koordinator Rumah Produksi di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa banyak UMKM mengalami kesulitan dalam pemasaran digital karena beberapa alasan utama. Pertama, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital banyak pelaku usaha kecil yang belum terbiasa atau tidak tahu cara menggunakan media sosial dan platform online untuk mempromosikan produk mereka secara lebih luas. Kedua, keterbatasan alat dan akses internet tidak semua pelaku UMKM memiliki smartphone yang mendukung atau akses internet yang stabil. Padahal, pemasaran digital membutuhkan perangkat yang memadai dan koneksi internet yang lancar agar bisa berjalan dengan baik. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya di dalam RPK faktor yang mempengaruhi pemasaran dan digitalisasi seperti kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital karena banyak juga pelaku UMKM yang sudah berusia senior jadi untuk penggunaan teknologi belum terlalu dipahami walaupun adanya pelatihan dan pendampingan kemudian tidak semua pelaku UMKM memiliki smartphone yang mendukung atau akses internet yang stabil karena ada pelaku UMKM yang tidak memiliki smartphone. Kesimpulanya Oleh karena itu upaya pelatihan tentang teknologi digital dan dukungan akses internet sangat penting untuk membantu UMKM berkembang di dunia digital

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Jadi kami kan bergabung di dalam RPK oleh karena itu untuk pemasaranya kami disini, kalau selesai stok saya tambah lagi. Selain itu dalam memasarkan produk saya menggunakan media sosial dan offline. Selain itu juga di RPK kami mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan, jadi di dalam hal pemasaran dan digitalisasi saya terbantu jadi sejauh ini belum ada kendala” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Dwi Hening selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa keikutsertaan dalam pelatihan di RPK juga membantu meningkatkan keterampilan dalam pemasaran dan digitalisasi karena sudah mendapatkan ilmu dan dukungan yang cukup, sejauh ini pelaku UMKM tidak mengalami kendala dalam pemasaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa bergabung dengan RPK memberikan keuntungan besar bagi perkembangan usaha pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya memang ada pelaku UMKM yang bergabung di RPK ini sudah terbantu di dalam hal pemasaran dan digitalisasi kemudian karena pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan dalam pelatihan dengan baik jadi sejauh ini belum ada permasalahan. Kesimpulanya untuk beberapa pelaku UMKM yang bergabung di RPK ini sangat terbantu di dalam hal pemasaran dan digitalisasi oleh karena itu mereka tidak terlalu kesulitan.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil waancaranya :

“Kami kan bergabung di dalam RPK oleh karena itu untuk pemasaranya kami disini, kalau selesai stok saya tambah lagi. Selain itu dalam memasarkan produk saya menggunakan media sosial dan offline. Selain itu juga di RPK kami mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan, jadi di dalam hal pemasaran dan digitalisasi saya terbantu jadi sejauh ini belum ada kendala” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Ani selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa keikutsertaan dalam pelatihan di RPK juga membantu meningkatkan keterampilan dalam pemasaran dan digitalisasi karena sudah mendapatkan ilmu dan dukungan yang cukup, sejauh ini pelaku UMKM tidak mengalami kendala dalam pemasaran digital. Hal ini menunjukkan bahwa bergabung dengan RPK memberikan keuntungan besar bagi perkembangan usaha pelaku UMKM. Berdasarkan hasil pengamatan peneliti bahwasanya memang ada pelaku UMKM yang bergabung di RPK ini sudah terbantu di dalam hal pemasaran dan digitalisasi kemudian karena pelaku UMKM memanfaatkan kesempatan dalam pelatihan dengan baik jadi sejauh ini belum ada permasalahan. Kesimpulanya untuk beberapa pelaku UMKM yang bergabung di RPK ini sangat terbantu di dalam hal pemasaran dan digitalisasi oleh karena itu mereka tidak terlalu kesulitan di dalam usaha.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil waancaranya :

“Jadi kami kan bergabung di dalam RPK oleh karena itu untuk pemasaranya kami disini, kalau selesai stok saya tambah lagi. Selain itu dalam memasarkan produk saya menggunakan media sosial dan offline. Selain itu juga di RPK kami mengikuti pelatihan peningkatan keterampilan, jadi di dalam hal pemasaran dan digitalisasi namun saya belum terlalu tau untuk menggunakan media sosial untuk pemasaran dan kemudian saya juga smartphone belum terlalu mendukung” (wawancara pada tanggal 27 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Martina selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa bergabung dengan RPK memberi banyak manfaat dalam pemasaran, seperti

kemudahan menambah stok saat habis dan kesempatan menjual produk di tempat yang sudah ada. Selain itu, pelaku UMKM juga menggunakan media sosial dan pemasaran offline untuk menjangkau lebih banyak pelanggan namun masih ada beberapa tantangan seperti belum terlalu menguasai cara menggunakan media sosial untuk pemasaran, sehingga mungkin belum bisa memaksimalkan potensinya. Selain itu, smartphone yang kurang mendukung juga bisa menjadi hambatan dalam menjalankan strategi pemasaran digital. Berdasarkan hasil pengematan peneliti bahwasanya memang benar pelaku UMKM sudah bergabung di RPK dan mengikuti pelatihan-pelatihan tetapi masih ada beberapa tantangan seperti belum terlalu menguasai cara menggunakan media sosial untuk pemasaran dan smartphone yang kurang mendukung. Kesimpulanya pelaku UMKM sudah menggunakan media sosial dan pemasaran offline untuk menjangkau lebih banyak pelanggan namun masih ada beberapa tantangan seperti belum terlalu menguasai cara menggunakan media sosial untuk pemasaran, sehingga mungkin belum bisa memaksimalkan potensinya. Selain itu, smartphone yang kurang mendukung.

Hal yang berbeda di sampaikan oleh Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggungharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Saya kan mba tidak bergabung di programnya pemerintah jadi untuk pemasaran dan digitalisasi saya sendiri terkadang saya kesusahan dalam pemasaran. Mungkin juga karean saya kurang ikut pelatihan dan pendampingan jadi hasilnya juga ya intinya bisa memenuhi kebutuhan mba. Kemudian saya juga tidak bisa menggunakan media sosial di dalam promosi hanya whatshap itupun kalau ada paketan” (wawancara pada tanggal 26 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Ibu Amin selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa karena pelaku UMKM tidak bergabung dalam program pemerintah, maka di dalam mengelola pemasaran dan digitalisasi secara mandiri. Hal ini bisa menjadi tantangan karena tanpa bimbingan atau pelatihan, strategi pemasaran mungkin kurang maksimal. Kemudian kesulitan dalam pemasaran ini bisa disebabkan oleh kurangnya pelatihan dan pendampingan, sehingga hasilnya masih sebatas memenuhi kebutuhan sehari-hari. Selain itu, keterbatasan dalam menggunakan media sosial untuk promosi juga menjadi kendala karena hanya mengandalkan WhatsApp, itupun tergantung pada ketersediaan paket data. Menurut pengamatan peneliti bahwasanya memang ada pelaku UMKM di Panggunharjo yang belum mendapatkan pelatihan dan pendampingan di dalam mengelola pemasaran dan digitalisasi karena faktor kurangnya pelatihan dan pendampingan dan keterbatasan dalam menggunakan media sosial untuk promosi juga menjadi kendala karena hanya mengandalkan WhatsApp. Kesimpulanya faktor yang menghambat pemasaran dan digitalisasi bagi pelaku UMKM adalah kurangnya pelatihan dan pendampingan dan keterbatasan dalam menggunakan media sosial untuk promosi juga menjadi kendala karena hanya mengandalkan WhatsApp.

Hal yang serupa juga di sampaikan oleh Bapak Damian selaku pelaku UMKM di Kalurahan Panggunharjo, berikut hasil wawancaranya :

“Usaha saya kan mandiri ya mba jadi untuk pemasaran dan digitalisasi saya sendiri mulai dalam hal promosi dan pemasaran saya benar-benar sendiri belajar otodidak. Saya juga tidak masuk bergabung di dalam RPK karena saya lebih memilih untuk usaha mandiri karena usaha ini juga warisan dari orangtua saya. Oleh karena itu saya tidak mengikuti program dari pemerintah Kalurahan walaupun ada saya lebih memilih sendiri saja.

Tetapi di dalam penggunaan digitalisasi saya sudah menggunakan untuk pemasaran". (wawancara pada tanggal 23 Desember 2024)

Berdasarkan hasil wawancara bersama Bapak Damian selaku pelaku UMKM di atas maka peneliti dapat menganalisis bahwa tanpa akses ke pelatihan atau dukungan teknis, pemanfaatan teknologi dalam pemasaran mungkin belum optimal sebagai alternatif, pengembangan pasar dan digitalisasi dapat dilakukan melalui eksplorasi strategi pemasaran digital yang lebih luas guna meningkatkan daya saing usaha di era digital. Berdasarkan hasil pengamatan bahwasanya pelaku UMKM memilih usaha mandiri karena usaha merupakan warisan orang tua dan di dalam hal pemasaran pelaku UMKM sudah menggunakan digitalisasi untuk pemasaran jadi memudahkannya. Faktornya meskipun telah mulai memanfaatkan digitalisasi, keterbatasan dalam pelatihan dan akses ke sumber daya dapat menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pemasaran. Kesimpulanya ada faktor yang menghambat pemasaran dan digitalisasi meskipun telah mulai memanfaatkan digitalisasi, keterbatasan dalam pelatihan dan akses ke sumber daya dapat menjadi kendala dalam meningkatkan efektivitas pemasaran.

Berdasarkan hasil wawancara dengan beberapa narasumber di atas maka peneliti dapat menyimpulkan bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM adalah Pertama kebijakan dari pemerintah Kalurahan yang mana perlu di lakukan sosialisasi yang lebih luas dan pendekatan yang lebih personal, agar pelaku UMKM lebih memahami pentingnya fasilitas yang telah disediakan dan termotivasi untuk ikut serta dalam program yang dapat membantu pengembangan usaha mereka. Kurangnya informasi terkait kebijakan

tersebut, kemudian kurang memahami dengan kebijakan yang di karenakan faktor usia dan kurangnya informasi juga menjadi kendala bagi pelaku UMKM ini untuk mengikuti program yang tersedia. Kesimpulanya diperlukan strategi komunikasi yang lebih efektif agar semua pelaku UMKM termasuk yang menjalankan usahanya secara mandiri, tetap mendapatkan akses informasi dan kesempatan untuk terus berkembang. Tantangan terbesar muncul pada pelaku UMKM yang berusia di atas 50 tahun, terutama dalam adaptasi digital dan pengelolaan usaha saat ini sehingga memerlukan upaya yang lebih fokus dan intens. Selain itu, mental dan rasa percaya diri juga menjadi faktor penting keberhasilan UMKM. Kedua sumber daya manusia (SDM) pelaku UMKM faktor-faktor yang mempengaruhi seperti dalam hal masih adanya pelaku UMKM yang belum memiliki izin berusaha hal ini dapat mengakibatkan tidak adanya akses ke program dari pemerintah dan masih ada pelaku UMKM yang belum bergabung di RPK yang menjadi salah satu program dari pemerintah juga. Hal ini menyebabkan adanya ketimpangan pertumbuhan yang mana pelaku UMKM yang sudah bergabung di RPK sudah berkembang dengan baik sedangkan yang belum masuk RPK sulit berkembang karena kurangnya akses pelatihan dan pendampingan. Adanya strategi tambahan dalam memperluas jangkauan pemasaran agar semua pelaku UMKM mendapatkan manfaat dari program yang ada, harus ada perubahan pola pikir untuk pelaku UMKM agar usaha yang dijalankan tidak sekedar kegiatan sampingan tetapi juga menjadi sumber penghidupan yang serius, faktor umur dan daya tanggap yang sudah kurang, yang menghambat pengembangan UMKM ini seperti pemasaran, inovasi produk

adaptasi terhadap media sosial. Hal ini yang menyebabkan pemasaranya masih dor to dor karena kurangnya pelatihan dan pendampingan yang baik. Ketiga sarana dan prasarana pemerintah sudah memfasilitasi pelaku UMKM dengan program-program yang ada tetapi program tersebut juga butuh evaluasi agar dapat memastikan bahwa fasilitas dan strategi yang diterapkan dapat benar-benar memberikan dampak yang maksimal bagi pelaku UMKM tidak semua pelaku UMKM dapat mengaksesnya karena tidak semua pelaku UMKM masuk di RPK, dibutuhkan perhatian lebih dari pemerintah Kalurahan dalam membantu pelaku UMKM yang belum masuk di RPK dan kedasaran dari pelaku UMKM dalam memajukan usaha mereka. Dan Keempat pemasaran dan teknologi Kesimpulanya adanya faktor yang menghambat pelaku UMKM di dalam hal pemasaran dan digitalisasi seperti faktor umur yang mana pelaku UMKM merasa dengan umur yang sudah senior daya tanggap untuk media sosial mulai menurun bahkan ada yang tidak menggunakan media sosial kemudian faktor kurangnya akses informasi dari pemerintah Kalurahan karena untuk informasi terkait pelatihan dan pendampingan, faktor yang mempengaruhi pemasaran dan digital dalam pengembangan UMKM seperti pemesanan hanya di satu tempat saja tidak bergantian sehingga tidak merata dan untuk digital seperti penggunaan media sosial belum semuanya paham dan mengerti karena yang masuk di RPK ini tidak semua pelaku UMKM di Panggunharjo, kurangnya pemahaman dan keterampilan dalam menggunakan teknologi digital karena banyak juga pelaku UMKM yang sudah berusia senior jadi untuk penggunaan teknologi belum terlalu dipahami walaupun adanya pelatihan dan pendampingan

kemudian tidak semua pelaku UMKM memiliki smartphone yang mendukung atau akses internet yang stabil karena ada pelaku UMKM yang tidak memiliki smartphone.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang di lakukan peneliti dalam pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo Kabupaten Bantul dapat di simpulkan bahwa :

1. Upaya yang di lakukan pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam pengembangan UMKM seperti :
  - a. Pemerintah Kalurahan telah menyusun program pengembangan UMKM melalui RPJMDes tahun 2019-2025 beserta RKPDes yang telah ditetapkan setiap tahun. Tetapi ada pelaku UMKM yang belum memanfaatkan kesempatan tersebut.
  - b. Pemerintah Kalurahan mengadakan Rumah Produksi Komunitas (RPK), pasar online, peta analisis penyebarana UMKM, pembinaan dan pelatihan akan tetapi di dalam upaya tersebut ada beberapa kendala yang terjadi yaitu pelaku UMKM kurang terlibat dalam program dan pelatihan yang dibuat sehingga program tersebut kurang efektif.
  - c. Pemerintah Kalurahan membangun kerja sama dengan CSR PT Penggadaian, Dinas Koperasi UKM Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), Dinas agama dan Dinas kesehatan agar UMKM dapat menghadapi persaingan secara luas.

- d. Pemerintah Kalurahan melalui RPK memfasilitasi pendampingan dan pelatihan terkait pemasaran, manajemen, pembuatan nomor induk berusaha, dan sertifikat halal tetapi tidak semua pelaku UMKM bergabung di RPK.
  - e. Pemerintah Kalurahan melalui RPK memfasilitasi pendampingan dan pelatihan terkait peningkatan kualitas produk agar pelaku UMKM dapat menciptakan inovasi baru sesuai kebutuhan pasar baik online maupun offline.
  - f. Pemerintah Kalurahan melalui RPK melakukan pelatihan dan pendampingan terkait pemasaran dan platform digital.
2. Beberapa faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Kalurahan Panggungharjo seperti :
- a. Pemerintah Kalurahan sudah membuat kebijakan mengenai ijin berusaha, akses pemasaran dan kerja sama tetapi masih ada pelaku UMKM yang belum mengakses informasi tersebut.
  - b. Ketimpangan dalam pertumbuhan UMKM dimana pelaku UMKM yang sudah bergabung mengalami perkembangan sedangkan belum bergabung masih tertinggal.
  - c. Pemerintah Kalurahan sudah memfasilitasi sarana dan prasarana tetapi belum mencakup semua pelaku UMKM.
  - d. Pemasaran dan teknologi masih menjadi kendala karena faktor usia pelaku UMKM, keterbatasan akses informasi dari pemerintah Kalurahan, tidak semua pelaku UMKM memiliki smartphone atau

akses internet yang stabil, serta kurangnya pemahaman mengenai teknologi digital.

## B. Saran

Terkait dengan pembahasan permasalahan yang terjadi di Kalurahan Panggunharjo peneliti menguraikan beberapa saran sebagai berikut :

1. Upaya yang di lakukan pemerintah Kalurahan Panggunharjo dalam pengembangan UMKM
  - a. Pemerintah Kalurahan perlu mengidentifikasi faktor-faktor yang menyebabkan rendahnya keterlibatan pelaku UMKM dalam program yang telah dibuat. Dapat dilakukan pendekatan yang lebih personal, seperti pendampingan secara langsung, serta memberikan insentif bagi UMKM yang aktif mengikuti pelatihan dan pendampingan.
  - b. Pemerintah Kalurahan dapat memperluas kerja sama dengan lebih banyak lembaga, baik dari sektor swasta maupun pemerintah, guna memperkuat pembinaan dan pendampingan bagi UMKM. Selain itu, program yang sudah berjalan perlu dievaluasi secara berkala untuk memastikan efektivitasnya.
  - c. Pemerintah Kalurahan perlu melakukan pendekatan lebih inklusif, seperti pelatihan berbasis kebutuhan spesifik pelaku usaha dan menyediakan pelatihan daring bagi yang memiliki keterbatasan waktu dan akses agar lebih banyak pelaku UMKM yang bergabung di RPK.

- d. Pelaku UMKM perlu didorong untuk lebih inovatif dalam menciptakan produk sesuai dengan kebutuhan pasar. Pemerintah dapat memfasilitasi sesi diskusi dan mentoring dengan pakar industri guna memberikan inspirasi dalam inovasi produk.
  - e. Untuk mengatasi kendala dalam pemasaran dan teknologi, diperlukan pelatihan yang lebih intensif terkait pemasaran digital. Selain itu, dapat dilakukan kerja sama dengan penyedia layanan internet atau komunitas digital untuk membantu UMKM dalam pemanfaatan teknologi secara lebih optimal.
2. Faktor yang mempengaruhi pengembangan UMKM di Kalurahan Panggungharjo
- a. Pemerintah Kalurahan perlu melakukan sosialisasi yang lebih masif dan efektif terkait kebijakan UMKM, agar seluruh pelaku UMKM mengetahui dan memanfaatkan kebijakan yang telah dibuat. Sosialisasi dapat dilakukan melalui pertemuan langsung, media sosial, dan kelompok komunitas.
  - b. Untuk mengatasi ketimpangan dalam pertumbuhan UMKM, pemerintah Kalurahan perlu mendorong lebih banyak pelaku usaha agar bergabung dalam RPK. Sosialisasi yang lebih luas harus dilakukan agar pelaku UMKM memahami manfaat bergabung, seperti pendampingan, pelatihan, dan akses pasar yang lebih baik.
  - c. Agar fasilitas sarana dan prasarana dapat mencakup semua pelaku UMKM, pemerintah Kalurahan perlu melakukan pendataan lebih

lanjut untuk mengetahui siapa saja yang belum mendapatkan akses.

Setelah itu, dapat dilakukan penyediaan fasilitas secara bertahap agar semua pelaku UMKM bisa merasakan manfaatnya.

- d. Untuk mengatasi kendala pemasaran dan teknologi bagi pelaku UMKM, pemerintah Kalurahan dapat memberikan pelatihan yang mudah dipahami, khususnya bagi pelaku usaha yang kurang familiar dengan teknologi digital. Pendampingan secara langsung dan praktik sederhana dapat membantu mereka lebih cepat beradaptasi. Bagi mereka yang tidak memiliki smartphone atau akses internet yang stabil, fasilitas Wi-Fi gratis atau pusat pelatihan di Kalurahan menjadi solusi.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurohim, D. (2021). Strategi Pengembangan Kelembagaan UMKM (1 Digital). Bintang Pustaka Madani
- Abdussamad, Z. (2021). Metode Penelitian Kualitatif.
- Bungin, Burhan. 2007. Penelitian Kualitatif. Jakarta: Kencana
- Bambang Riyanto. (2010). Dasar-Dasar Pembelanjaan Perusahaan, ed. 4, BPFEYOGYAKARTA
- Milen, Anelli. 2004. Pegangan Dasar Pengembangan Kapasitas. Yogyakarta: Pondok Pustaka Jogja
- Eko,Sutoro. (2014). Kedudukan, Kewenangan dan Tata Kelola Desa. Forum Pengembangan Pembaharuan Desa (FPPD). Jl. Karangnangka No. 175 Dusun Demangan Desa Maguwoharjo Kec. Depok Sleman Yogyakarta
- Tambunan, M. R. (2013). Pedoman penyusunan Standard operating prosedur. Jakarta: Penerbit Maiesta Publisher
- Warkum Sumitro, Azas-azas Perbankan Islam dan Lembaga-lembaga Terkait (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), h. 168
- Sugiyono.(2009). Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D. Bandung : Alfabeta.
- Afifuddin. (2010). Pengantar Administrasi Pembangunan. Bandung: CV Alfabeta
- Tambunan, T. 2009. UMKM di Indonesia. Bogor: Ghalia.
- Siagian. Sondang P. 2012. Manajemen Sumber Daya Manusia. Edisi I. Cetakan Ketiga Belas. Bumi aksara. Bumi Aksara. Jakarta
- Suharsimi Arikunto (2003;3) menjelaskan penelitian deskriptif
- Hafsah, M. J. 2004. Upaya Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM). Jurnal Infokop. Nomor 25 Tahun XX
- Ahmad Kholik, & Dewi Rahmi. (2023). Strategi Pengembangan UMKM Makanan dan Minuman di Kelurahan Tamansari Kota Bandung. Jurnal Riset Ilmu Ekonomi Dan Bisnis, 133–142. <https://doi.org/10.29313/jrieb.v3i2.2796>

- Fibriyanti, Y. V., Zulyanti, N. R., & Alfiani, A. (2021). Pengembangan UMKM Kerajinan Anyaman Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa Sumberjo Kecamatan Sarirejo Kabupaten Lamongan. *Jurnal Karya Abdi Masyarakat*, 4(3), 612–616. <https://doi.org/10.22437/jkam.v4i3.11584>
- Florita, A., Jumiati, J., & Mubarak, A. (2019). Pembinaan Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Padang. *Jurnal Manajemen Dan Ilmu Administrasi Publik (JMIAP)*, 1(1), 143–153. <https://doi.org/10.24036/jmiap.v1i1.11>
- Idayu, R., Husni, M., & Suhandi, S. (2021). Strategi Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Untuk Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Desa di Desa Nembol Kecamatan Mandalawangi Kabupaten Pandeglang Banten. *Jurnal Manajemen STIE Muhammadiyah Palopo*, 7(1), 73. <https://doi.org/10.35906/jm001.v7i1.729>
- Ita Rosita. (2021). Efektivitas Program Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil Dan Menengah (UMKM) Di Kecamatan Sungai Sembilan Kota Dumai. *Jurnal Niara*, 14(3), 259–265. <https://doi.org/10.31849/niara.v14i3.8020>
- Notoatmodjo. (2018). Promosi kesehatan: Teori dan Aplikasi. Jakarta: Rineka Cipta
- Jayanti Mandasari, D., Widodo, J., & Djaja, S. (2019). Strategi Pemasaran Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah (UMKM) Batik Magenda Tamanan Kabupaten Bondowoso. *JURNAL PENDIDIKAN EKONOMI: Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan, Ilmu Ekonomi Dan Ilmu Sosial*, 13(1), 123. <https://doi.org/10.19184/jpe.v13i1.10432>
- Rohman, A., Kurniawan, W., Tia, D., Triadi, H., Al-Amar, S., & Subang, I. (2023). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil Dan Menengah Kerajinan Ukir Kayu. *Jurnal Karya Inovasi Pengabdian Masyarakat (JKIPM)*, 1(1), 21–30.
- Romadhoni, B. R., Akhmad, A., Khalid, I., & Muhsin, A. (2022). Pemberdayaan UMKM Dalam Rangka Peningkatan Kesejahteraan Masyarakat Di Kabupaten Gowa. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 6(3), 1074–1088. <https://doi.org/10.31955/mea.v6i3.2457>
- Sholicha, N., & Oktafia, R. (2021). Strategi Pemasaran dalam Upaya Peningkatan Omset Penjualan UMKM Desa Sumber Kembar, Kecamatan Pacet, Kabupaten Mojokerto. *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(2). <https://doi.org/10.29040/jiei.v7i2.2286>
- Wulansari, A., Hakim, L., & Ramdani, R. (2021). Strategi Dinas Koperasi dan UMKM Kabupaten Karawang Dalam Pemberdayaan UMKM. *Jurnal Penelitian Administrasi Publik*, 7(1), 82–93.

- Adolph, R. (2020). Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah. *1*(11), 1–23.
- Alyas, -. (2017). STRATEGI PENGEMBANGAN USAHA KECIL DAN MENENGAH DALAM PENGUATAN EKONOMI KERAKYATAN (Studi Kasus pada Usaha Roti Maros di Kabupaten Maros). *Sosiohumaniora*, *19*(2), 114–120. <https://doi.org/10.24198/sosiohumaniora.v19i2.12249>
- Dzulhadi, A. A., Wulandari, P., Aziz, N. A., Windani, A., & Pratiwi, R. (2022). Analisis Penerapan Prespektif Balanced Scorecard terhadap Kinerja UMKM (Studi Empiris Warmindo di Kota Semarang). *Prosiding Seminar Nasional Akuntansi Dan Manajemen (SENAMA)*, 127–136. <https://doi.org/10.52353/senama.v0i0.276>
- Egim, A. S., & Nenengsih. (2019). Strategi Pengembangan Industri Makanan Khas Daerah Di Kota Padang Dengan Pengemasan Dan Pemasaran Berbasis Teknologi. *Jurnal Menara Ekonomi*, *5*(3), 21–34.
- Hanim, L., Soponyono, E., & Maryanto, M. (2022). Development of Digital MSMEs during the Covid-19 Pandemic. *Prosiding Seminar Nasional Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat*, *2*(1), 30–39.
- Lasoma, M. D. (2015). Kewenangan Pemerintah Desa dalam Bidang Kemasyarakatan di Desa Bolangitang Dua Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Politico: Jurnal Ilmu Politik*, *2*(6).
- Ratnasari, J. D., Makmur, M., & Ribawanto, H. (2013). PENGEMBANGAN KAPASITAS (CAPACITY BUILDING) KELEMBAGAAN DAERAH DALAM MENINGKATKAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK DI ERA REVOLUSI INDUSTRI 4.0 PADA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (DPMPTS) KABUPATEN CIAMIS. *Jurnal Administrasi Publik*.
- Rochmadi, I., & Rohmah, S. (2019). Jurnal REP (Riset Ekonomi Pembangunan). *Riset Ekonomi Pembangunan*, *4*(2), 161–173. <http://jurnal.untidar.ac.id/index.php/REP>
- Siregar, R. T., Silitonga, H. P., & Putri, J. A. (2020). Strategi Pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Pematangsiantar. *JKBM (Jurnal Konsep Bisnis Dan Manajemen)*, *6*(2), 133–142.

## **Peraturan-Peraturan**

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2024 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro Kecil dan Menengah

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah

Permendagri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa

Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2022 Tentang Penyelenggaraan Perijinan Berusaha

Peraturan Bupati Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan

Peraturan Bupati Bantul Nomor 86 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan

Peraturan Desa nomor 6 Tahun 2019 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMdes).

Peraturan Kalurahan Panggungharjo Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Kewenangan Kalurahan

## Webiste

<https://www.masterplandesa.com/desa-mandiri/inilah-desa-panggungharjo-yang-disebut-sebagai-desa-mandiri/>

<https://mojok.co/terminal/desa-panggungharjo-bantul-desa-terbaik-di-indonesia/>

<https://mojok.co/terminal/desa-panggungharjo-bantul-desa-terbaik-di-indonesia/2/>

<https://storymaps.arcgis.com/stories/51111be1b30b4e8d99cc50d6e3b539d4>

[https://www.google.com/search?q=kenapa+desa+panggungahrjo+sebagai+desa+yang+mandiri&oq=kenapa+desa+panggungahrjo+sebagai+desa+yang+mandiri&gs\\_lcp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJMTQyMTNqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=kenapa+desa+panggungahrjo+sebagai+desa+yang+mandiri&oq=kenapa+desa+panggungahrjo+sebagai+desa+yang+mandiri&gs_lcp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIJCAEQIRgKGKAB0gEJMTQyMTNqMGo3qAIAsAIA&sourceid=chrome&ie=UTF-8)

<https://jdih.bappenas.go.id/peraturan/detailperaturan/146/undang-undang-nomor-23-tahun-2014#:~:text=UNDANG%2DUNDANG%20NO.%202023%20TAHUN%202014%20TENTANG%20Pemerintahan%20Daerah>

<https://margokatonsid.slemankab.go.id/first/artikel/7>

[https://www.google.com/search?q=Menurut+Tambunan+\(2013%3A+2\)+UMKM&oq=Menurut+Tambunan+\(2013%3A+2\)+UMKM&gs\\_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPATIBCDQ4NzdqMGo3qAIIsAIB&sourc eid=chrome&ie=UTF-8](https://www.google.com/search?q=Menurut+Tambunan+(2013%3A+2)+UMKM&oq=Menurut+Tambunan+(2013%3A+2)+UMKM&gs_lcrp=EgZjaHJvbWUyBggAEEUYOTIHCAEQIRiPATIBCDQ4NzdqMGo3qAIIsAIB&sourc eid=chrome&ie=UTF-8)

## PEDOMAN WAWANCARA

### **Daftar Pertanyaan**

No	Pertanyaan	Informan	Dokumen yang dibutuhkan
1	Apakah pemerintah Kalurahan Panggungharjo sudah membuat peraturan mengenai UMKM?	1. Mantan Lurah 2. Lurah	1. Dokumentasi
2	Program atau inisiatif apa saja yang dilakukan oleh pemerintah kalurahan dalam mengembangkan UMKM?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. Carik 4. LPMKal 5. Pelaku UMKM	2. Dokumentasi
3	Apakah ada kolaborasi antara UMKM dan sektor lainya didalam mengembangkan UMKM?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. Bumkal	
4	Apakah pemerintah kalurahan sudah melakukan pembinaan dan pelatihan yang relevan terkait pengembangan SDM UMKM?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu) 4. Rumah Produksi 5. Pelaku UMKM	3.Dokumentasi
5	Apakah ada pelatihan dan pendampingan dala membantu pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas produk?  Bagaimana cara agar pelaku UMKM dapat menghasilkan produk-produk yang berkualitas?	1. Pelaku UMKM 2. Rumah produksi	
6	Strategi yang di lakukan UMKM dalam menciptakan inovasi baru sesuai pasar	1. Pelaku UMKM	4. Dokumentasi

	Mengapa UMKM harus meningkatkan inovasi-inovasi baru?		
7	Apa saja jenis sarana dan prasarana yang dibutuhkan UMKM?  Bagaimana UMKM mengatasi keterbatasan sarana untuk produksi?	1. Pelaku UMKM	
8	Apakah pelaku UMKM sudah menggunakan platform digital?  Apa saja dukungan pemerintah di dalam menyediakan akses platform digital?  Bagaimana UMKM memanfaatkan platform digital untuk memperluas jangkauan pemasaran?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. Pelaku UMKM	5.Dokumentasi
9	Strategi pemasaran seperti apa yang dilakukan untuk oleh pemerintah dalam membantu pelaku UMKM?  Upaya-upaya yang dilakukan pelaku UMKM di dalam menghadapi persaingan pasar?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu) 4. Pelaku UMKM	
10	Apa tantangan utama yang dihadapi UMKM dalam proses perijinan usaha?  Apakah pelaku UMKM harus mendapatkan ijin usaha?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. Rumah produksi	
11	Faktor apa saja yang menghambat pengembangan UMKM?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. Pamong Ulu-Ulu 4. Pelaku UMK	
12	Faktor-faktor apa saja yang menghambat sumber daya pelaku UMKM	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. LPMKal	

		4. RPK 5. Pelaku UMKM	
13	Faktor-faktor apa saja yang menghambat sarana dan prasarana bagi pengembangan UMKM	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. LPMKal 4. RPK 5. Pelaku UMKM	
14	Faktor-faktor apa saja yang menghambat pemasaran dan digitalisasi bagi pelaku UMKM?	1. Mantan Lurah 2. Lurah 3. LPMKal 4. RPK 5. Pelaku UMKM	

## DOKUMENTASI PENELITIAN



Dokumentasi setelah wawancara dengan Lurah Panggungharjo pada (7/01/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Mantan Lurah Panggungharjo pada (14/01/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Ketua Lembaga Pemberdayaan Kalurahan pada (3/01/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Pamong Kalurahan (Ulu-Ulu) pada (2/01/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Ibu Carik (Ulu-uluh) pada (6/01/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Koordinator BUMDes pada (8/01/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Koordinato RPK pada (27/12/2025)



Dokumentasi setelah wawancara peneliti dengan Pelaku UMKM pada (23/12/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Pelaku UMKM pada (27/12/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Pelaku UMKM pada (27/12/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Pelaku UMKM pada (27/12/2025)



Dokumentasi setelah wawancara dengan Pelaku UMKM pada (27/12/2025)



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

Akreditasi Institusi B

• FAKULTAS PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• FAKULTAS STUDI PEMERINTAHAN DESA, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAKU SAKALI  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAKU SAKALI

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

Nomor : 936/I/U/2024

Hal : Permohonan ijin penelitian

Kepada Yth :

Lurah Panggunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul

Di tempat.

Dengan hormat,

Bersama ini kami beritahukan dengan hormat bahwa Mahasiswa Program Sarjana ( S1 ) Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta yang namanya tersebut dibawah ini akan mengadakan penelitian lapangan dalam waktu 1 bulan. Penelitian tersebut oleh Mahasiswa yang bersangkutan digunakan dalam rangka penyusunan Skripsi yang hasilnya akan diperhitungkan untuk penelitian dalam kemampuan Studi di Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD".

Adapun nama Mahasiswa dan judul Penelitian adalah :

Nama : Florida Maria Salvi Inaq Leumara

No Mhs : 21520070

Program Studi : Ilmu Pemerintahan

Judul Skripsi : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Kalurahan Panggunharjo Kabupaten Bantul

Tempat : Kalurahan Panggunharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul

Dosen Pembimbing : Dr. R. Widodo Triputro,M.M

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, kami mengharapkan kesediaan Bapak/ Ibu untuk berkenan memberikan izin serta bantuan fasilitas seperlunya guna memungkinkan dan memudahkan pelaksanaan penelitian tersebut.

Atas perhatian dan bantuan Bapak/Ibu, kami ucapan terima kasih.

Yogyakarta, 3 Desember 2024  
Ketua  
  
Dr. Sutoro Eko Yunanto  
NIY. 170 230 190



**YAYASAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN TUJUH BELAS YOGYAKARTA  
SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
YOGYAKARTA**

Akreditasi Institusi B

• PRODI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA, PROGRAM DIPLOMA TIGA, STATUS TERAKREDITASI B  
• PRODI KONSEP PEMBANGUNAN SOSIAL, PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDANG  
• PRODI STUDI ILMU FISIKA DAN PROGRAM SARJANA, STATUS TERAKREDITASI A  
• PRODI STUDI ILMU PEMERINTAHAN, PROGRAM MAGISTER, STATUS TERAKREDITASI BAIK SEDANG

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775, Fax. (0274) 515989, website : [www.apmd.ac.id](http://www.apmd.ac.id), e-mail : [info@apmd.ac.id](mailto:info@apmd.ac.id)

**SURAT TUGAS**

Nomor : 480/I/T/2024

Ketua Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta memberikan tugas kepada:

Nama : Florida Maria Salvi Inaq Leumara  
Nomor Mahasiswa : 21520070  
Program Studi : Ilmu Pemerintahan.  
Jenjang : Sarjana (S-1).  
Keperluan : Melaksanakan Penelitian.  
a. Tempat : Kalurahan Panggungharjo, Kapanewon Sewon, Kabupaten Bantul  
b. Sasaran : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Kalurahan Panggungharjo Kabupaten Bantul  
c. Waktu : 1 Bulan

Mohon yang bersangkutan diberikan bantuan seperlunya.



**PERHATIAN :**

Setelah selesai melaksanakan penelitian, mohon surat tugas ini diserahkan kepada Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa "APMD" Yogyakarta.

**MENGETAHUI :**

Kepala Desa/Kepala Kelurahan/Pejabat Instansi tempat penelitian bahwa mahasiswa tersebut telah melaksanakan penelitian.

Dr. Sutoro Eko Yunanto

NIY. 170 230 190



SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"

**PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN**

STATUS TERAKREDITAS A (SK BAN-PT No.3295/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/V/2020)

Alamat : Jl. Timoho No. 317 Yogyakarta 55225, Telp. (0274) 561971, 550775 Fax. (0274) 515989

Nomor : 095/PEM/J/X/2024

H a l : Penunjukan Dosen  
Pembimbingan Skripsi

K e p a d a :

Dr. Widodo Triputro, M.M

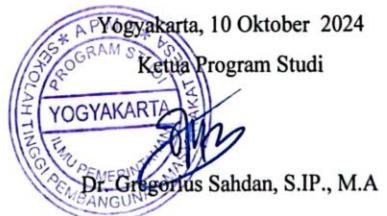
Dosen Prodi Ilmu Pemerintahan STPMD "APMD"

di Yogyakarta.

Sehubungan dengan pembimbingan Skripsi, kami mohon kesediaan Bapak/Ibu untuk menjadi  
Dosen Pembimbing mahasiswa tersebut di bawah ini :

Nama	:	Florida Maria Salvi
No. Mahasiswa	:	21520070
Program Studi	:	Ilmu Pemerintahan
Tanggal Acc Judul	:	10 Oktober 2024

Demikian, atas kesediaannya diucapkan terima kasih.





PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL  
KAPANEWON SEWON  
**KALURAHAN PANGGUNGHARJO**

Jl. KH. Ali Maksun Telp. (0274) 377863 Kode Pos 55188 Yogyakarta  
Website : [www.Panggungharjo.desa.id](http://www.Panggungharjo.desa.id) e-mail : [desa.panggungharjo@bantulkab.go.id](mailto:desa.panggungharjo@bantulkab.go.id)

No : 072/70

Panggungharjo, 17 Desember 2024

Lamp: -

Hal : Pengabdian/Penelitian

Kepada,

Yth.1. BUMKAL Panggunglestari

2. Perangkat/Pamong

Kalurahan

Panggungharjo.

di-tempat

Dengan hormat,

Menindak lanjuti surat dari Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa APMD Yogyakarta. Nomor: 936/I/U/2024, tertanggal 09 Desember 2024, bersama dengan surat ini dibertahukan bahwa:

Nama : Florida Maria Salvi Inaq Leumara.  
No KTP/NIM : 21520070  
Alamat/PT : Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa.  
APMD, Yogyakarta  
Tema : Pengembangan Usaha Mikro Kecil dan Menengah oleh Pemerintah Kalurahan.

Akan melakukan Pengabdian / Penelitian / Tugas Kuliah / wawancara /Survey/Pengambilan Data di Wilayah Kalurahan Panggungharjo tanggal 17 Desember 2024 s/d 17 Januari 2025.

Demikian Ijin ini disampaikan, atas perhatiannya dihaturkan terima kasih.

a/n LURAH PANGGUNGHARJO,

Catatan





SEKOLAH TINGGI PEMBANGUNAN MASYARAKAT DESA "APMD"  
PROGRAM STUDI ILMU PEMERINTAHAN

STATUS TERAKREDITASI (SK BAN-PT No. 003/BAN-PT/AK-XIII/SI/V/2010)

Jl. Timoho 317, Telp. (0274) 561971; Fax. (0274) 516989 – Yogyakarta 55225

KENDALI BIMBINGAN SKRIPSI

**Nama** : Florida Maria Sulwi wulan Leuwisia .  
**No Mahasiswa** : 21520070  
**Judul Skripsi** : Pengembangan UMKM oleh Pemerintah Kecamatan Pangunuhage  
**Dosen Pembimbing** : Dr. R. Widodo Triputro, M.M., M.Si.  
**Mulai Bimbingan** : 14 Oktober 2024.

Tanggal	Uraikan Perbaikan	Paraf Dosen Pembimbing
14/10/2024	Bimbingan awal fokus judul dan penulisan latar belakang mesalah Rumus matematik.	w
22/10/2024	bimbingan latar belakang -RS, dan revisi	w
25/10/2024	Ravision dan lantat latar belakang	w
28/10/2024	Ravision latar belakang	w
01/11/2024	Ravision kerangka teksup	w
08/11/2024	Pedoman wawancara	w
26/11/2024	Rombi Pedoman wawancara	w
2/12/2024	ACC proposal	w
14/1/25	Bimbingan bab 2 dan Ravision.	w
24/1/25	bimbingan dan ravision bab 2 dan 3	w
30/1/25	Bimbingan bab 1 -4	w
4/3/25	ACC Skripsi bab 1-4.	

--	--	--

Mengetahui / Menyetujui

Dilaksanakan Ujian Skripsi

Ketua Prodi

.....

Dosen Pembimbing

